



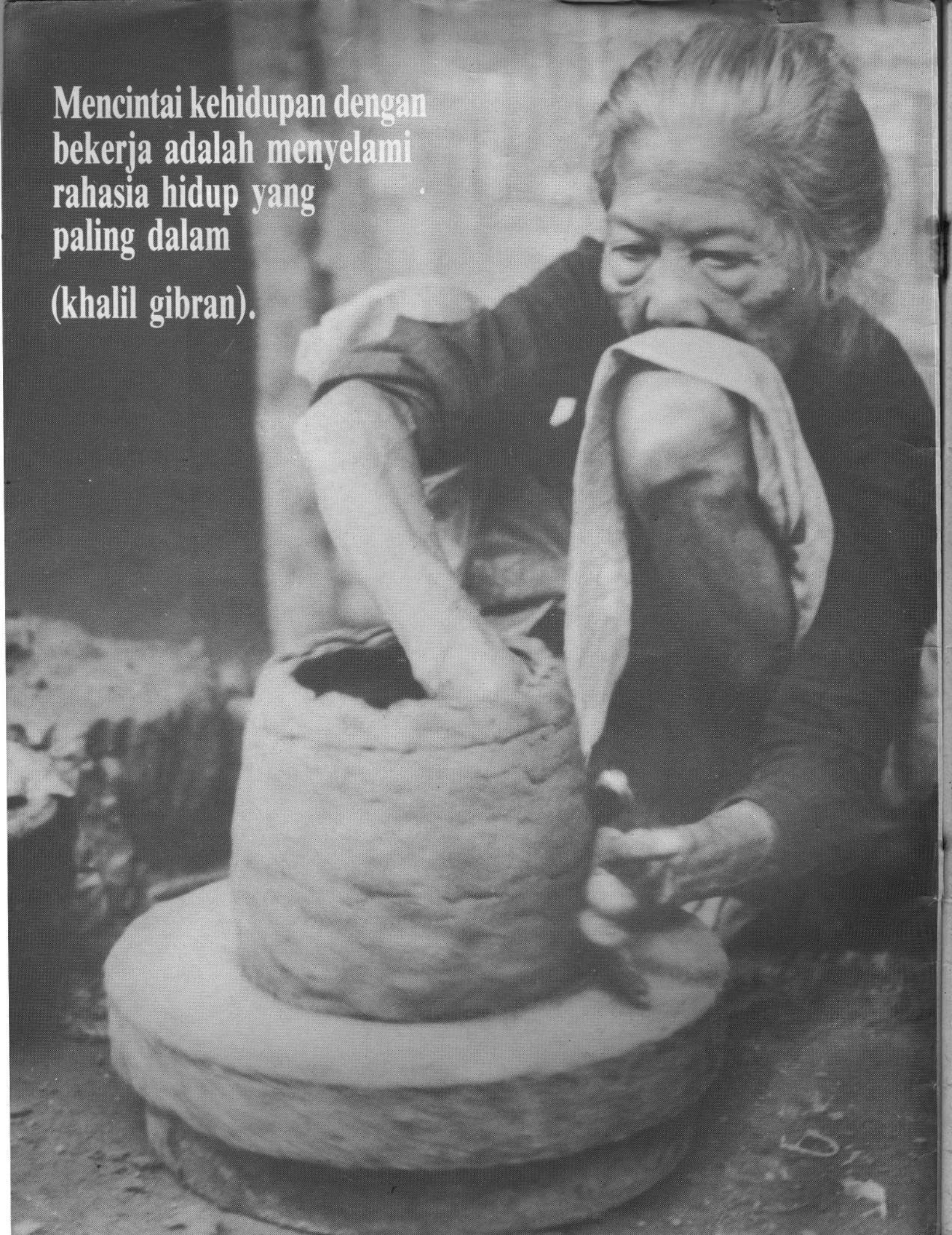
TING
TI
BAT

**MENGUGAT
PERAN (POLITIK)
MAHASISWA**

**SOFYAN WANANDI:
GINA BISA LARI**

RAME-RAME SOAL SMPT

Mencintai kehidupan dengan
bekerja adalah menyelami
rahasia hidup yang
paling dalam
(khalil gibran).





Kalau cuma duduk-duduk nggak apa-apa kok, mau tiduran... silakan.

SEKADAR KONGKOW KONGKOW

Kita tahu semua bahwa sejak gagalnya IPMI berkongres di Lampung tahun 1989 idealisme permahasiswaan seakan-akan menjadi tentram. Berita-berita tentang epos pers-mahasiswa jarang bergaung lagi. Saya belum dapat menangkap, dengan situasi semacam itu bakal muncul gejala apa? Kondisi sudah 'aman' atau memang kita tidak lagi memiliki keberanian bersuara, atau telah kehabisan tenaga, tidak punya dana yang cukup, atau memang karena kehidupan pers-mahasiswa tidak boleh tumbuh dan berkembang?

Yang jelas, gejala yang nanti muncul di permukaan adalah kekalahan mahasiswa dalam menghadapi situasi yang sedang tidak menentu.

Ada satu bukti yang memperlihatkan kekalahan tersebut. *Himmah* tidak terbit lagi. *Dian Budaya*, maaf, cuma 'kacang bawang'. Lalu tidak diakuhinya hasil penelitian tentang pencemaran di dukuh Tapak Kabupaten Semarang oleh tim dari LPM Undip, oleh katakanlah Pemda Kodya Semarang. Bahkan dengan sombongnya pihak pemuda mengatakan, "kami telah memiliki tim peneliti yang valid". Maafkan tidak hanya mahasiswa saja yang kalah, tetapi juga dosen dan kampus sebagai lembaga demokrasi dan nafas intelektualitas.

Kembali ke peran pers-mahasiswa, setidaknya ada tiga totalitas pers-mahasiswa. *Pertama*, mengapa harus ada pers-mahasiswa; *Kedua*, di mana posisi pers-mahasiswa; dan *ketiga*, tujuan apa yang ingin dicapai pers-mahasiswa. (Ana Nadhya Abror, 1989). Dan sebenarnya masih belum cukup pertanyaan yang kita ajukan. Apakah pers-maha-

siswa mampu mengelola dan menjaga kepribadiannya lewat rutinitas penerbitannya? Penyakit kita sekarang ini adalah latah: bangga dengan penerbitan perdananya, meskipun kemudian nomor itu juga nomor penghabisan.

Majalah BALAIRUNG sebagai eksponen dan bahkan ditunjuk sebagai 'pilot project' pers-mahasiswa sudah semestinya mampu dan harus mampu menjawab 'tantangan' dan amanah tersebut. Persoalan klasik yang katanya selalu menjadi momok, yaitu dana, kemampuan menulis dan mengelola perusahaan secara profesional-- jelas bukan masalah penting bagi pengurus BALAIRUNG. Saya ingat dengan berita tentang *Asahi Shimbun*, koran Jepang dengan oplah terbesar di dunia. Demikian cekatannya, sehingga mereka mampu memasukkannya ke mobilnya ke garasi sehari 450 kali. Dengan kerendahan hati para wartawan, sikap moral adalah

satu-satunya cara untuk menjadi besar tanpa harus membuat orang lain merasa kecil. Dan rutinitas penerbitannya dilakukan tanpa mengorbankan vitalitas, pembaruan dan intelektualitasnya.

Ilustrasi ini agaknya perlu kita tuliskan. setidaknya agar dapat dijadikan cambuk, motivasi dan semangat kerja. Dengan itu semua, kita akan menjadi besar, disegani karena mampu menjadi 'lidah intelektualitas' yang gagah berani. Pers-mahasiswa tentunya bukan WTS (wartawan tanpa surat kabar), yang selalu muncul di seminar-seminar, diskusi-diskusi, selidik sana selidik sini, tetapi tidak pernah menerbitkan berita-beritanya.

Berat memang, tapi apa boleh buat. Niat sudah diucapkan dan kaki pun telah dilangkahkan.

Dardo Pratoyo,
Majalah Gema, FNT-UGM

SARAN UNTUK REDAKSI

Sebagai mantan mahasiswa dan sekaligus mantan aktifis KODEMA, Alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberi nafas idealisme. Meski sebenarnya berbagai godaan selalu datang menghadang.

Awal bulan Maret tahun ini adalah perkenalan saya dengan BALAIRUNG. Saya tersentak, seolah saya kembali berada dalam kehidupan mahasiswa yang penuh kegiatan yang bersifat kritis, analitis dan dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Bermula dari inilah kemudian saya ingin memberikan beberapa masukan untuk BALAIRUNG beserta para "senator" mahasiswa Gadjah Mada.

1. Materi BALAIRUNG sebaiknya lebih banyak mengungkapkan prestasi mahasiswa di bidang keilmuannya masing-masing.
2. Untuk menjaga hubungan baik antara alumni dengan almamater, para alumni perlu dipacu untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja di instansi masing-masing.
3. Mencoba merintis kerjasama antara instansi tempat alumni bekerja dengan almamater.
4. Setiap pakar yang berce-ramah di kampus misalnya, sekaligus juga dipersilakan untuk memberikan temuan-temuan barunya kepada kampus.
5. Setiap upaya mengupas persoalan politik dan lainnya diupayakan untuk dibicarakan di ruang tertutup, antara wakil mahasiswa dengan pejabat yang berkepentingan. Karena sampai saat ini sistem politik kita belum menghendaki kevlugaran dan keterbukaan yang kadang-kadang (maaf) menyinggung perasaan.

Sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin, masih banyak para alumni yang tetap berpegang pada prinsip dan idealisme. Hanya saja belum banyak yang terungkap. Namun yang jelas,

Terima kasih atas perhatian Bapak. Saran-saran senada juga Redaksi terima dari beberapa alumnus UGM. Untuk itu Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kami mau berusaha merealisasikan saran-saran itu,

SURAT DARI PENJARA

Tembok dan besi aku diantara Nya
Tikar dan atap aku diantara Nya
Pembunuh dan perampok aku diantara Nya
Hujan dan panas aku diantara Nya
Buku dan pena aku diantara Nya
Tawa dan tangis aku diantara Nya

Aku masih bisa senyum
dan bersenandung....

Polisi dan penguasa aku diantara Nya
Kursi dan kursi aku diantara Nya
Uang dan kepuasan aku diantara Nya
Kekuasaan dan memo aku diantara Nya
Kemunafikan dan kekuasaan aku diantara Nya
Kerakusan dan kekejaman aku diantara Nya
Darah dan air mata aku diantara Nya

Aku ingin menjerit
dan meronta

Tuhan,....

Aku ingin diantara jemari-jemari Mu

Aku ingin diantara.....

Aku ingin diantara.....

Burhanudin*

LP Sukamula

Medan

(* penulis ditahan karena menentang "kebijaksanaan" fakultas di USU Medan)

bila dimintai bantuan, semua
tentu akan memberikannya
dengan senang hati.

Salam almamater,

karena hal tersebut juga menjadi
cita-cita kami. (Redaksi)

BALAIRUNG MANA KERJA SAMAMU

BALAIRUNG sebagai majalah mahasiswa tingkat univer-

Ir M Basuki,
Alumnus Fak Pertanian UGM (81)
Staf Teknis BTU-BUMN Dep Pertanian
Jln Harsono RM 3, Jakarta



sitas di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tentunya sangat memahami akan beragamnya kualitas aktivitas antara fakultas satu dengan yang lain. Apalagi di UGM ini yang konon adalah termasuk perguruan tinggi terbesar di negeri ini, dengan tiga-puluh ribu mahasiswa yang tersebar di 21 fakultas.

Beragamnya kualitas aktivitas masing-masing fakultas termasuk di antaranya aktivitas penerbitan fakultas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir di semua fakultas di UGM memiliki media komunikasi, baik yang berujud majalah ataupun yang sekedar buletin. Bahkan lebih dalam lagi sampai ke tingkat jurusan. Namun demikian tidak semuanya berkembang dengan baik. Memang ada juga yang telah mapan. Sampai-sampai peredarannya hingga keluar kampus, bahkan ke luar Jawa. Tetapi yang demikian ini hanya ada satu-dua. Selebihnya berkembang-kempis periode terbitnya.

Banyak faktor yang menyebabkan *seretnya* penerbitan fakultas ini. Hanya yang paling mudah adalah persoalan dana. Selain itu ada lagi, yaitu segi menajemennya.

Melihat permasalahan di atas, semestinya BALAIRUNG dapat memainkan peranannya sebagai majalah tingkat Universitas untuk turut memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya dengan memberikan pembinaan pada penerbitan fakultas. Bila fungsi ini dapat dijalankan dengan baik saya yakin BALAIRUNG akan lebih *eksis* di tengah ramainya penerbitan Pers-Mahasiswa sekarang ini.

Akhirnya, semoga BALAIRUNG mau bekerja sama dengan kami.

Subagyo

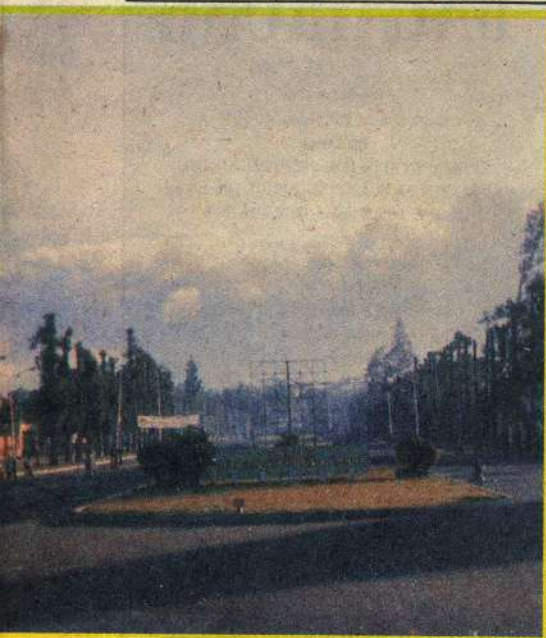
Pemimpin Umum Majalah
Mahasiswa FNE-UGM
'CAFNE'

Kami tengah berusaha merealisasikan kerja sama yang anda inginkan. Menurut anda bentuk kerja sama itu seperti apa? (Redaksi)

ARTIKEL LEPAS 74

Sejarah dari Sisi Kekuasaan

Ekonomika : Agen Sekuler si Peradaban



LINGKUNGAN 23

Tata Hijau di Kampus Biru

ARTIKEL TEMA 16

Gerakan Mahasiswa Indonesia
Pasca 80-an

Krisis Pemimpin Pasca 80-an

LIPUT 68

ISU 8

Kampus dan Kepekaan

IPEK 53

Mencari Pengganti Udang

OPINI 7

KONTAK 3

LAPORAN DAERAH 54

KULIT MUKA: MUDZAKIR

ARENA ALUMNI 72

Mewujudkan Wawasan Nusantara

KOLOM 80

Pertemuan dengan Mohring

POJOK 82

SENI BUDAYA 51

Konglomerasi Budaya di UGM

KESEHATAN 27

Mengenai Depresi

TIMBANGAN PUSTAKA 78

Meramal Negara Industri Baru

Istilah-istilah Kunci Psikologi

LINTAS 20

Kang To



LAPORAN KHUSUS 39

Mahasiswa dan Politik

KEMAHASISWAAN 35

Perlu Otonomi

DAPUR 6

ISI 5

TEMU WICARA

CATATAN PERISTIWA

INSAN WAWASAN

BERITA TEMA

JERAT

TEMU WICARA 12

Gerakan (Politik) Mahasiswa

CATATAN PERISTIWA 29

Merajalelanya Curanmor

INSAN WAWASAN 64

Prof. Dr. Mochamad Adnan



BERITA TEMA 09

Kilas Balik Protes Mahasiswa

LAPORAN DAERAH 54

Kegelisahan Rakyat Perbatasan

JERAT 59



HUDA



Sebagian pengurus mengunaurkan diri. Pos-pos yang ditinggalkan segera diisi.

Kami hadir dengan semangat baru. Inilah yang pertama kali ingin kami sampaikan kepada pembaca mengantarkan kehadiran edisi ini. Kunjungan kali ini adalah yang pertama sejak pergantian pengurus BALAIRUNG awal April lalu. Pergantian pengurus ini didahului dengan musyawarah, yang merupakan forum tertinggi organisasi kami, pada pertengahan Maret. Dalam forum ini dibahas dan ditetapkan garis-garis besar haluan kerja bagi pengurus periode berikutnya, disamping forum evaluasi dan pertanggung jawaban pengurus lama tentunya.

Berkaitan dengan pergantian inilah sementara waktu kami banyak berkibrah ke dalam. Aktivitas internal organisasi yang tak dapat dihindari untuk segera diselesaikan. Prioritas penanganan kedalam ini bukan berarti kami melupakan pembaca sekalian. Kami, perlu waktu untuk penataan kedalam agar supaya *output* yang kami sajikan kelak tidak mengecewakan pembaca sekalian, itu keinginan kami.

Kepengurusan yang berkesinambungan serta rutinitas terbit adalah cita-cita kami semua. Untuk itulah, jauh sebelum serah terima pengurus, BALAIRUNG telah mempersiapkan kader. Diawali dengan rekrutmen yang diikuti oleh sekitar seratus pendaftar. Setelah melalui serangkaian seleksi dan masa magang sekitar tiga bulan hanya 18 orang yang dinyatakan lulus, dan mereka dilantik sebagai pengurus pada akhir Februari yang lalu. Pemasukan ini lebih kecil jumlahnya ketimbang pengurus lama yang mengundurkan diri. Tapi, setidaknya dengan masuknya pengurus baru yang rata-rata dari angkatan muda, harapan di atas bisa jadi kenyataan.

Bila sebagian pengurus mengundurkan diri itu hal yang wajar-wajar saja. Bermacam-macam alasannya. Ada yang merasa 'letih' karena sudah sejak tahun 86 bergabung. Ada yang studi-nya sudah selesai, adapula yang *back to study*. Kepada mereka semua kami mengucapkan selamat berjuang di tempat yang baru dan semoga dapat berbuat lebih baik. Mudah-mudahan pengorbanan selama ini tidak sia-sia.

Pembaca sekalian, persiapan penerbitan edisi ini memakan waktu yang cukup panjang. Banyak target yang kami tetapkan. Banyak kerja yang direncanakan, meskipun akhirnya terjadi pergantian ditengah jalan. Sehingga merupakan hasil kerja dua kepengurusan. Kerja lapangan pengumpulan bahan tulisan edisi ini menjangkau sampai daerah Lampung, Kalimantan Barat dan perbatasan Serawak serta Sulawesi Utara. Dalam hal ini tentu kami tidak lupa untuk mengucapkan berjuta terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi menyantuni hingga terwujudnya kunjungan wartawan kami tersebut. Juga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para alumnus atas kesediaannya untuk mendampingi BALAIRUNG sebagai penasehat, sebagaimana yang diamanatkan oleh musyawarah kepada kami.

Penjaga Dapur

BALAIRUNG

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Pers Mahasiswa UGM

Ijin Terbit:

SK MENPEN RI No 1039/DIRJEN PPG/ST/1986,
SK REKTOR No UGM/82/7789/UM/01/37, International
Standard Series Number (ISSN) 0125-176 X

Pelindung:

Prof. Dr. Ir. Mochamad Adnan, M.Sc (Rektor UGM)

Penasehat:

Ir. Haryana, M.Arch. (Purek III UGM)

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.

Ir. dra. Larasati Suliantoro S.

Drs. Jakob Oetama

Ir. Boma Wikan Tyoso, M.Sc., Ph.D.

Drs. Amir Effendi Siregar, M.A.

Pemimpin Umum:

Rahman Hidayat

Pemimpin Redaksi:

Didik Supriyanto

Wakil Pemimpin Redaksi/koordinasi reportase:

Nur Hidayat

Pemimpin Perusahaan:

S. Luthfie Rohman

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Abdul Rahman

Ketua Litbang:

Rahman Hidayat

Wakil Ketua Litbang:

M. Burhan Bariton

Biro Administrasi:

Sri Wahyuningtyas (Kepala Biro)

Derny Irawati, Jajang Hernandar, Suseno, Retno Suprihatin

Biro Keuangan:

Hamidah Rosidanti S. (Kepala Biro)

Rina Prihatiningsih

Dewan Redaksi:

Wahyudi Marhaen, Maria Selastiningsih, Islami Rusdianawati,

Abdul Rahman, S. Luthfie Rahman, M. Burhan Bariton,

Sri Wahyuningtyas, Rahman Hidayat

Sekretaris Redaksi:

Islami Rusdianawati

Reporter:

Andriana Kartikawati, Dwi Djoko Winarno, Riestianti,

Nizar Heikal, Ismu Subroto, Hesty Dyah Lestari,

Rudy Madanir

Staf Litbang:

Wahyudi Marhaen, Nizar Heikal, Retno Suprihatin

Fotografer:

M. Burhan Bariton, Kelik Supriyanto, Nurul Huda

Produksi/Artistik:

Dyah D. Orbandini (Kepala Bagian)

Amir Fatah, Haryanto, Mudzakir, M. Djaubar Setyadi

Iklan:

Ustarmen J.P.

Distributor:

S. Maria Wantania (Kepala Bagian)

Prihayudi

Alamat:

Gelanggang Mahasiswa UGM, telp. 88688 psw 676

Bulaksumur B-21, Yogyakarta (55281)

YANG KREATIF, YANG TRENDI

Merupakan hal yang wajar bagi kita untuk setiap kali menyoroti mahasiswa yang punya sedecetan prestasi akademik membanggakan. Lebih-lebih bila ditambah dengan segudang aktifitas ko-kurikuler baik di dalam maupun di luar kampus. Misalnya saja mereka yang sering tampil dalam kontes "ratu-ratuan". Mahasiswa kategori inilah yang sering menjadi bahan pembicaraan, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Apalagi dengan adanya media massa yang mampu memanipulasi informasi dengan menyoroti mereka lebih jauh. Bukannya suatu hal yang buruk untuk mengekspos mereka yang barangkali berada di lingkungan gemerlap di kampus kita. Karena itu toh prestasi mereka, yang tentu saja memerlukan proses perjuangan yang tidak gampang untuk mencapainya.

Kalau kita mau menyimak lebih jauh, maka sebenarnya ada segelintir mahasiswa kreatif yang sering luput dari sorotan kita, yaitu mereka yang di samping aktif kuliah juga bergerak dalam bidang usaha. Jumlah mereka memang tidak begitu banyak, tetapi kehadiran mereka layak untuk mendapat perhatian. Yang dalam hal ini, perhatian dari pers-mahasiswa. Sebab dengan mengekspos mereka, barangkali akan memberikan manfaat bagi mahasiswa lainnya.

Fenomena "kuliah sambil bekerja" telah menjadi kecenderungan mahasiswa di kota-kota besar. Di Yogyakarta misalnya, ada beberapa mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) yang berani menerima order pekerjaan di luar kegiatan akademiknya. Di Jakarta hal semacam ini akan lebih banyak kita jumpai. Sering kita mengenal nama seseorang justru dari profesinya, bukan dari universitas mana, fakultas apa, dan jurusan apa dia kuliah. Di Jakarta bahkan ada BOM (Bursa Orang Muda), yang menyediakan sarana promosi, pameran dan jual beli produk orang-orang muda yang nota bene adalah pelajar dan mahasiswa.

Iklim kreatifitas memang harus selalu digalakkan di kalangan mahasiswa. Karena dengan hanya kuliah, lulus dan bekerja sudah bukan jamannya lagi. "Sarjana menciptakan lapangan kerja" bukan lagi slogan yang hanya bisa diucapkan. Melainkan justru merupakan suatu upaya yang sudah sepatutnya mulai diwujudkan sejak sekarang.

Melalui media pers-mahasiswa diharapkan akan tampil figur-figur wiraswastawan muda, baik yang masih kuliah maupun yang sudah sarjana. Dengan anggapan bahwa mencari kerja akan mempersempit lapangan pekerjaan yang ada dan hanya akan merepotkan pemerintah, maka eksistensi mereka sudah barang tentu patut untuk kita tonjolkan. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka. Meskipun biasanya sulit bagi mereka untuk dicalonkan menjadi mahasiswa teladan.

Abdullah Sundaru
Pogung Baru D 32
Yogyakarta

MAHASISWA UGM PEMBOHONG

Agent of change, kelas menengah, pemegang tongkat estafet, penyambung lidah, intelektual muda, dan seabrek atribut lain melekat di pundaknya. Kemudian lagi, mereka berbicara soal moral yang terkontaminasi oleh 'virus' jalan pintas yang menggejala di masyarakat akibat dilegalisirnya SDSB dan sebangsanya. Saya terpesona dan terkesima melihatnya, sambil jempol ini diam-diam saya acungkan, itu pada awalnya. Akan tetapi kemudian sejarah berkata lain, sehingga membuat kepala ini tak henti-hentinya menggeleng.

Long live education diterjemahkan secara plesetan. Pola budaya utak-atik angka yang kemudian dikenal dengan ramalan SDSB diam-diam mulai dicicipi. Belajar seumur hidup mereka artikan sebagai tindakan merenung di tempat yang sepi, sambil menggenggam secarik kertas dan sebatang pensil. Bencana alam yang tersiar di media massa diterimanya bukan lagi semata-mata sebagai berita, melainkan sebagai 'ilham'. Tokoh-tokoh pemikir yang ada dalam bacaan-bacaan kuliah mulai digeser oleh nama-nama aneh: Mbah Bejo, Kong Siok Pwee, Eyang Wisnu dan sebangainya. Absurd!

Absurditas itu dapat kita saksikan dengan mata telanjang. Mr. Agent of change itu, pagi-pagi sekali sudah nongkrong di parkir, bekerja sama dengan penjaga parkir fakultasnya. Kemudian berdebat seru sekali. Angka 0 sampai dengan 9 mereka diskusikan. Plat-plat nomor kendaraan mereka pandangi satu per satu. Lalu tiba-tiba, "Eureka..Eureka..," katanya.

Aneh, memang. Kalau tiba-tiba pengemis, gelandangan dan orang gila yang hilir mudik dan yang dulu justru mengilhaminya untuk berdiskusi mengenai persoalan-persoalan humanitis-sosiologis berubah menjadi mitra tiban untuk diberondong dengan pertanyaan; "Nomernya besok, berapa yang keluar?". Sekali lagi, absurd!

Gadiah Mada, yang dilahirkan oleh sejarah yang panjang dan selalu menjadi ciri Yogyakarta, akankah berubah menjadi arena *nebak lepat*, arena utak-atik angka dan segala jenisnya? Akankah penghuninya selalu memakan makanan yang berasal dari muntahannya sendiri? Wallahua'lam!

Wahyu Harjanto
Jurusan Sejarah Fak. Sastra
UGM angkatan 1988

KAMPUS DAN KEPEKAAN

Tidaklah berlebihan bila Seymour Martin Lipset mengatakan: sangatlah keliru setiap usaha menganalisa masa depan politik dalam negeri maupun luar negeri bilamana mahasiswa diabaikan. Meskipun Seymour tidak sepenuhnya benar, namun sejarah Indonesia modern setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa peran mahasiswa dalam perjalanan sejarah bangsa ini memiliki arti yang tidak kecil.

Gerakannya yang bersifat jujur, penuh idealisme dan berani, bahkan terkadang terkesan radikal, mampu mengekspresikan uneg-uneg dan ketidakberdayaan masyarakat bawah dalam hubungannya dengan seluruh dinamika dan kondisi sosial politik dan ekonomi. Sehingga meskipun tidak ada koor kebulatan tekad untuk mendukung mahasiswa, masyarakat sangat berterima kasih kepada kampus dan seluruh warganya.

Kepekaan warga kampus yang diwakili angkatan 66 tersebut — karena keberhasilannya — seringkali ditiru oleh angkatan berikutnya, betapapun kondisi dan momentumnya berbeda. Dan kini yang lebih menarik adalah munculnya perbedaan pendapat secara bebas dan terbuka di antara para mahasiswa sendiri, baik untuk masalah-masalah yang bersifat mendasar maupun hal-hal yang bersifat teknis. Untuk itu — agar tak menguap begitu saja — diperlukan wahana interaksi yang sehat bagi kristalisasi perbedaan-perbedaan tadi.

Suasana dialogik yang tumbuh — baik melalui seminar maupun diskusi ilmiah — akan melahirkan gagasan-gagasan segar. Dan sebaliknya, kelesuan akan muncul bila tidak ada rasa bebas, mandiri dan aman, yang pada akhirnya akan menyebabkan layunya tunas-tunas bangsa. Dan pendidikan akan kehilangan makna.

Bagi Paolo Fraire, pendidikan harus dapat menghasilkan manusia-manusia yang mampu dan berani bertindak sebagai hati nurani zamannya. Tetapi, betulkah produk pendidikan saat ini sudah mengekspresikan hal yang demikian itu. Pertanyaan tersebut bisa dicari jawaban dengan melacak tentang siapa yang akan dididik, bagaimana pendidikannya, untuk apa pendidikan tersebut, siapa yang menjadi pemilik biaya pendidikan dan untuk apa biaya itu dikeluarkan.

Kalau kita amati, sejauh mana ketertarikan mahasiswa terhadap masalah-masalah politik, masa depan bangsa dan negaranya, nampaknya hanya terbatas pada segelintir mahasiswa saja. Lalu, kemanakah sebagian besar yang lainnya? Mengapa mereka tidak berani membicarakan masalah lingkungannya, dan bersikap masa bodoh terhadap kenyataan yang ada? Tentu kita tidak bisa berharap terlalu

banyak bagi lahirnya pemimpin bangsa dari suatu komunitas yang tidak memiliki kesadaran akan bangsa dan negaranya.

Meminjam istilah Muchtar Buchori, untuk menjadi hati nurani zamannya, keterampilan saja tidaklah cukup. Lebih dari itu yang dibutuhkan ialah kepekaan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat. Dan kepekaan adalah masalah internalisasi nilai-nilai. Jadi bukan sekedar masalah tempat — di Yogyakarta atau di Jakarta — di mana kampus itu berada. Sebab, seilmiah apapun kegiatan di dalam kampus, ia tetap harus merupakan salah satu fungsi masyarakat.

Namun sayangnya, kita sering terjatuh menjadi intelektual timur dengan menggunakan penyelesaian model atau pola-pola Barat. Yang antara lain — menurut mantan rektor UI, Nugroho Notosusanto almarhum — disebabkan oleh besarnya pengaruh ideologi liberalisme yang masuk melalui perkuliahan dan bacaan-bacaan di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu politik. Penggusuran becak dan pedagang asongan misalnya, yang mestinya diperlakukan ekstra manusiawi karena posisinya yang lemah, adalah dampak dari logika berfikir yang individualis. Tidak tepo seliro, tidak welas asih dan jauh dari sikap ramah. Ironisnya, hal itu justru terjadi di kota yang memiliki puluhan perguruan tinggi yang selalu sibuk mempelajari dan mengajarkan teori-teori pembangunan.

Dalam suatu komunitas yang semakin kapitalis ini, terasa adanya kesenjangan antara kesadaran nasional dan kesadaran sosial. Keberhasilan kesadaran nasional, baik itu berupa kedisiplinan, ketertiban maupun kebersihan, tidak diimbangi oleh kesadaran sosial di mana harkat orang sebagai manusia telah terdegradasi. Pertimbangan aspek estetis telah menggeser aspek etis.

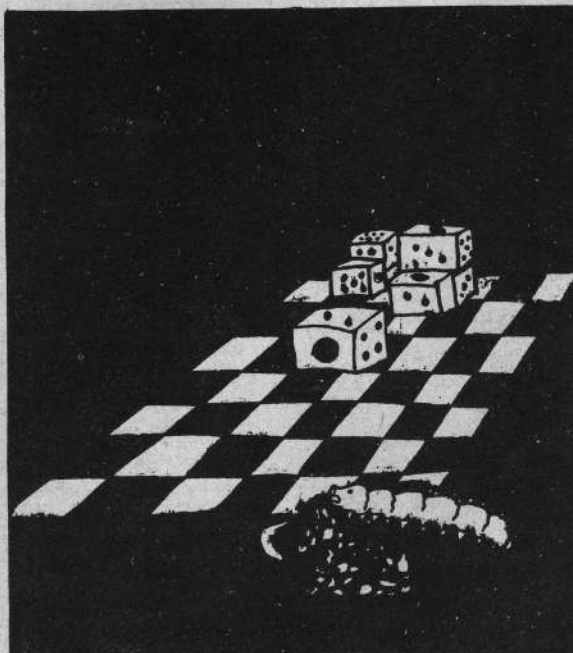
Penolakannya terhadap kemiskinan tidak dibarengi dengan pemihakannya terhadap kaum miskin. Sikap ramah tidak lagi merupakan ekspresi dari ketulusan. Sikap ramah hanya memiliki makna jika ia dikaitkan dengan lobi dan devisa para turis.

Jadi, bila masyarakat — yang dulu berterima kasih — semakin merasa asing terhadap kampus, maka saatnyalah bila kampus mempertanyakan kembali sejauh mana kepekaan dan responnya terhadap permasalahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat.

Pedagang asongan dan tukang becak tidak memerlukan teori yang njlimet, sebab perut mereka tidak bisa diajak kompromi untuk menunggu terlalu lama. Tantangan yang mereka hadapi, tidak akan terpecahkan dengan hanya disuguhi jazz live show dan sejenisnya.

Mahfudz Ahmad

HARYANTO



KILAS BALIK PROTES MAHASISWA

Bila kita perhatikan cara dan gaya mahasiswa dalam menyampaikan gagasannya, seringkali mereka lekat dengan cap mahasiswa radikal, berani, terbuka, emosional, sarat idealisme dan slogan, namun juga kurang perhitungan dan — maaf-maaf — kurang santun.

Sikap seperti itu, banyak diwarnai oleh latar belakang mereka yang tidak terikat oleh kekuatan dan kurun waktu tertentu, bahkan tidak permanen dalam kancah percaturan politik nasional. Ketidak permanenan tersebut tercermin pada gampangnya mereka melakukan perubahan misi, visi dan orientasi. Setidak-tidaknya, gambaran tersebut terlihat dari siapa yang di dukung oleh angkatan 66 dan siapa yang dituntut dalam peristiwa Malari di tahun 1974.



DI YOGYAKARTA : Protes terhadap proses pengadilan Isti dan Subono.

Bila dibandingkan dengan para pendahulunya di tahun 66, 74 dan 78, aksi mahasiswa yang muncul belakangan ini, lebih mengarah pada tuntutan perbaikan-perbaikan daripada tuntutan perubahan mendasar yang dilakukan para pendahulunya. Masalah yang dihadapi memang sudah berbeda. Sehingga citra mahasiswa sebagai kekuatan politik mulai memudar. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan mereka memasuki universitas adalah untuk menuntut ilmu, jembatan untuk mencari makan atau bahkan untuk sekadar status sosial.

Dalam catatan sejarah mahasiswa, angkatan 66 memiliki kedudukan yang cukup penting. Bukan saja melahirkan Tri Tuntutan Rakyat yang berisikan tuntutan terhadap pembubaran PKI, pembentukan kabinet baru dan penurunan harga, tetapi juga, bersama-sama dengan kelompok militer, mereka mendobrak kepemimpinan orde lama.

Aksi-aksi mahasiswa telah ikut memper lancar pengambil alihan kekuasaan dari tangan Soekarno oleh kelompok militer, sehingga lahir pemerintah orde baru. Dan sebagai tanda terima kasih, beberapa mahasiswa yang dulu tergabung dalam KAMI, diminta untuk menjadi anggota parlemen.

Tak lama setelah pemerintahan orde baru berjalan, aksi mahasiswa kambuh kembali yang lebih dikenal dengan peristiwa *malari*. Tuntutan mereka berkisar pada masalah ekonomi dan pemerataan, terutama kaitannya dengan besarnya pengaruh modal asing. Seminggu setelah peristiwa tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang erat kaitannya dengan masalah pemerataan, dilibatkannya modal swasta dalam pembangunan dan pribumisasi ekonomi Indonesia.

Namun, kebijakan itu saja belum cukup. Maka pada bulan Agustus - September 1977, aksi mahasiswa dalam menggalang ke permukaan politik Indonesia. Di sini peran Dewan Mahasiswa dalam menggalang komunikasi antar universitas di berbagai kota sangat besar. Mereka menuntut diberantasnya korupsi, kapitalisme, pemborosan dalam penyelenggaraan negara, monopoli dan tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah. Buntutnya, beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap.

Strategi pembangunan yang lebih meng-anak-emaskan pada pembangunan ekonomi semakin mengukuhkan kehadirannya. Pembangunan politik lebih di artikan sebagai menciptakan keadaan stabil, dan menekan sekecil mungkin munculnya aksi-aksi yang mengganggu stabilitas. Maka, pada tahun 1978, lahir keputusan Pangkoptib mengenai pembekuan Dewan Mahasiswa yang diikuti oleh munculnya konsep NKK/ BKK yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada masing-masing rektor di kampusnya.

Bulan madu mahasiswa-militer nampaknya sudah berakhir, lebih-lebih jika dilihat dari ikut sertanya militer dalam penangkapan beberapa mahasiswa dan intervensinya ke dalam wilayah kampus.

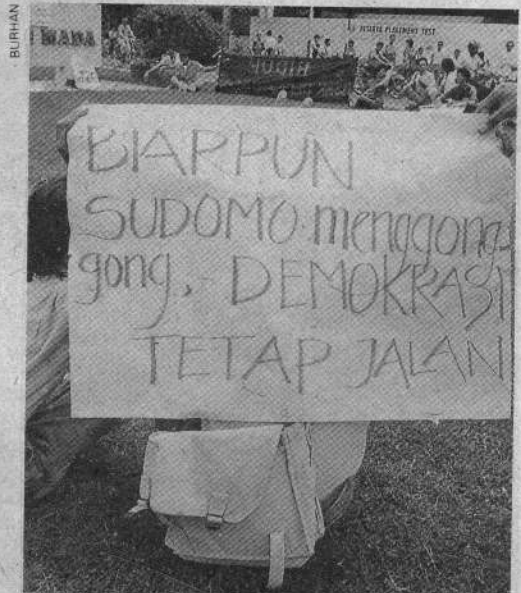
Sebenarnya, retaknya hubungan mahasiswa-militer sudah dirasakan jauh sebelumnya. Hal tersebut terungkap dari ceramah jenderal AH. Nasution di Universitas Andalas pada 24 Agustus 1972, antara lain Nasution mengatakan 'Kita tetap perlu mengingatkan kepada koreksi total. Dan

kita sayangkan, bahwa partnership tidak terbina terus sebagaimana tahun 1966, terutama TNI - mahasiswa dan kepeloporan angkatan '66 tekad kita dalam seminar AD dahulu'.

Tindakan pengamanan yang berlebihan terhadap aspek stabilitas ini, oleh beberapa kalangan, baik pemerintah sendiri maupun para cendekiawan yang tercerahkan, dianggap justru akan merugikan bangsa dan negara. Keprihatinan tersebut cukup beralasan bila dilihat dari bungkemnya para mahasiswa dalam waktu yang cukup lama dan tidak nampak tanda-tanda lahirnya pemimpin bangsa yang tangguh dari kalangan mahasiswa. Sampai-sampai, LB. Moerdani bekerja sama dengan Taman Siswa mendirikan Sekolah semi militer, untuk melahirkan calon pemimpin yang handal.

Setelah berbagai kritik dan sindiran terhadap mahasiswa mewarnai lembaran-lembaran media massa, baik yang diterbitkan oleh pers umum maupun oleh pers mahasiswa sendiri, maka pada tahun 1980 aksi mahasiswa mulai menggeliat kembali, dengan isu-isu disepertar masalah intern universitas.

Di Yogyakarta, sekelompok mahasiswa UII, menggoyang badan wakaf dalam kaitannya dengan ketidak beresan di kampusnya. Bahkan dua mahasiswanya terlibat saling bunuh menyusul adanya manipulasi dalam pembangunan kampus terpadu. Peristiwa ini mendapat perhatian luas dari media massa. Dan Munawir Sadzali menyatakan prihatinannya yang sangat dalam. Padahal, sebelumnya, kampus ini pun telah diributkan dengan berbagai aksi



DI BULAKSUMUR : Sarat idealisme, dan berani.

Isu yang bersifat intern semakin merebak dengan lahirnya Komite Pembelaan Pers Mahasiswa yang memperlakukan pembekuan LPM Unas, pembredelan pers mahasiswa di Universitas Satya Wacana dan sensor yang berlebihan terhadap majalah Arena IAIN Yogyakarta. Selain itu, solidaritas sesama pers mahasiswa terjalin baik, bahkan bermanfaat bagi pertukaran informasi antar mahasiswa di berbagai kota.

Pada tanggal 10 Desember 1988, Gelanggang Mahasiswa yang biasanya hanya disibukkan oleh kegiatan olah raga dan kesenian, oleh mahasiswa digunakan juga untuk mengadakan mimbar bebas. Hadir dalam acara tersebut beberapa aktivis pers mahasiswa dan tidak kurang dari 350 mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Yogyakarta. Dengan beberapa poster dan spanduk, mereka menuntut peninjauan ulang terhadap NKK/BKK, kebebasan mimbar akademis dan kebebasan pers. Selanjutnya, acara-acara mimbar bebas seperti itu, sering mewarnai gelanggang mahasiswa UGM, Bulaksumur.

Namun yang paling ironis adalah, ketika kelompok unjuk rasa menghadang Mendikbud Fuad Hasan di kampus ISI Yogyakarta. Mereka yang tadinya emosional menuntut dicabutnya NKK/BKK, seketika tertunduk malu ketika dengan tenang Fuad bertanya "Kalian tahu enggak isi NKK/BKK, sudah baca atau belum". Pertanyaan Mendikbud sama sekali di luar dugaan mereka yang kebanyakan memang belum membaca konsep NKK/BKK.

Semenjak isu intern banyak mewarnai kehidupan mahasiswa di sepanjang awal tahun 80-an, maka sejak tahun 1988 mulai terlihat adanya perubahan orientasi isu. Mereka tidak lagi memperlakukan kepentingan dirinya secara langsung dengan universitas, melainkan mereka mulai melibatkan diri dengan kepentingan masyarakat banyak, khususnya dalam kasus-kasus pengusuran dan ganti rugi yang tidak memadai.

Di Ujung Pandang misalnya, aksi penolakan terhadap porkas dan pemakaian helm sempat mengagetkan. Karena penyelesaiannya menggunakan cara kekerasan yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka. Penanganan yang kurang simpatik ini diadakan oleh beberapa mahasiswa ITB ke DPR-RI di Jakarta. Sementara itu, Forum komunikasi mahasiswa Yogyakarta menggalang aksi protes terhadap proses pembangunan waduk kedung omba. Aksi ini sempat menari perhatian fihak Bank Dunia yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi pinjaman dana. Mereka menggelar poster di kantor Gubernur Semarang dan di lokasi waduk.

Yang menarik dari fenomena tersebut adalah, munculnya kota Yogya yang semula tentang — di berbagai pemberitaan mass media dalam kaitannya dengan aksi-aksi mahasiswa. Isu-isu yang dilontarkan pun bervariasi. Isu moral misalnya, diwakili oleh Gerakan Mahasiswa Sadar Wisata yang memprotes perihal peraturan daerah yang mengizinkan beroperasinya panti mandi uap, kelab malam, diskotik dan panti pijat yang bersifat hiburan di Yogyakarta. Begitu juga aksi Solidaritas Tiannamen yang digelar di UGM, lebih mewakili isu internasional. Dan sebelumnya, di tempat yang sama, beberapa aktivis dari kelompok study, pers mahasiswa dan kelompok unjuk rasa, mengadakan pangung terbuka untuk menolak tindakan kekerasan. Puncaknya, aksi protes terhadap proses pengadilan Bambang Istinugroho dan Bambang Subono, yang di vonis 8 dan 7 tahun penjara akibat mengedarkan buku terlarang — berbau ke kiri-kirian — Rumah kaca karya Pramudya Ananta Toer.

Aksi tersebut mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat di DPR-RI. Bahkan, mereka berkunjung ke UGM, bertemu dan berdialog dengan para mahasiswa untuk memperoleh masukan tentang "persitiwa kusumanegaran" (lihat Balairung Edisi 11).

Di Bandung, 26 mahasiswa mendatangi ketua DPR Kharis Suhud. Dengan menamakan diri Komite Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Badega, mereka memprotes perampasan atas tanah rakyat badega dan meminta penyelesaian yang adil.

Di Jakarta, 40-an mahasiswa menandatangani deklarasi yang isinya antara lain, agar setiap penelitian ilmiah dijamin kebebasannya, dan mendukung penelitian Dr. Tri Sutanto yang menggegerkan masyarakat karena isu lemak babinya telah melum-

puhkan perdagangan beberapa jenis makanan kemasan.

Tidak kalah menariknya adalah fenomena Kusnadi Hardjasoemantri, mantan rektor UGM yang mendampingi delegasi mahasiswa dari Forum Komunikasi Sema dan BPM UGM, mengunjungi fihak pemerintah daerah pada tanggal 27 Desember 1988, untuk menyatakan keberatannya atas beredarnya SDSB dikota pelajar Yogyakarta. "Menurut kami, SDSB tidak lain merupakan judi yang mencerminkan sikap hidup melarikan diri dari kenyataan" kata salah seorang anggota delegasi.

Menarik apa yang dipertanyakan oleh Muhtar Effendi: mengapa mereka tiba-tiba meninggalkan perpustakaan dan buku-buku untuk terjun ke jalanan? Dan mengapa mereka kembali ke perpustakaan dan ruang kuliah, sementara tujuan perjuangan mereka masih belum berhasil dan tuntas, kecuali sebagian atau bahkan tidak sama sekali. Dalam tulisannya, Muhtar mengatakan, sampai saat ini belum ada kesempatan untuk menjelaskan kedua pertanyaan tersebut di atas.

Menurutnya aksi protes mahasiswa dan kurang berhasilnya tuntutan mereka tidak luput dari pengamatan Arief Budiman yang juga aktivis mahasiswa pada jamannya. Dalam berbagai kesempatan, Arief mengatakan: ada tiga syarat atau prakondisi yang harus dipenuhi jika gerakan mahasiswa ingin muncul dan berhasil; adanya konsep atau ideologi alternatif, adanya momentum sejarah dan adanya organisasi yang teratur rapi.

Nampaknya, kurang terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, aksi-aksi mahasiswa menjadi layu sebelum berkembang.

Mahfudz Ahmad



DI BANDUNG : Mahasiswa ITB menghadang Menteri Rudini.

GERAKAN (POLITIK) MAHASISWA

BUKAN ZAMANNYA LAGI

Paling tidak semenjak pertengahan tahun 80-an, riak-riak kecil ulah mahasiswa mulai nampak di beberapa kampus negeri ini. Pada mulanya memang mahasiswa hanya memprotes kebijaksanaan atau kondisi kampusnya sendiri, tetapi dari sana kemudian orientasi "perjuangan" mulai merambah melampaui batas-batas kampus. Lihatlah protes anti helm di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), aksi pembelaan tanah Badega dan Cimacan (Jawa Barat), protes terhadap pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh pabrik kertas di Sumatera Utara dan yang menonjol adalah aksi mahasiswa di Kedungombo (Jawa Tengah).

Namun sampai sejauh ini tampaknya aksi-aksi mahasiswa itu tidak banyak didukung oleh kebanyakan mahasiswa. Bahkan dalam banyak hal yang melakukan aksi-aksi selama ini adalah **orang-orang itu saja**. Mengapa demikian halnya yang terjadi? Bukanlah aksi-aksi mahasiswa akhir-akhir ini belum mendapatkan "tekanan" yang berarti jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya? Apakah hal itu disebabkan oleh trauma "pe-

nunggaran" keberhasilan angkatan 66, atau juga trauma terhadap kegagalan gerakan mahasiswa tahun 70-an? Atau memang gerakan mahasiswa sudah bukan zamannya lagi. Tapi, bukankah di masyarakat kita masih saja terdapat tindak-tindak kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, yang mana hal ini bisa menggugah nurani kaum muda? Atau barangkali perlu dicari model-model gerakan partisipasi sosial mahasiswa yang sesuai dengan zamannya?

Untuk mengkaji masalah-masalah tersebut, *Temu Wicara* kali ini BALAIRUNG mengundang **Prof. Dr. Tedjoyuwono** (Guru Besar Fak. Pertanian UGM), **Ipang S Azhar** (Mahasiswa Fak. Pasca Sarjana UGM), **Suporaharjo** (Mahasiswa Fak. Kehutanan UGM), **Yayan Sopyan** (Mahasiswa Fak. Filsafat UGM) dan **Dadang Yuliantoro** (Mahasiswa Fak. MIPA UGM) serta ditambah sedikit wawancara dengan **Haryanto MA** (Dosen Fak. Isipol UGM). *Temu wicara* dipandu oleh **Didik Supriyanto** yang sekaligus menuliskannya.

Mahasiswa adalah agen perubahan. Proposisi ini didasarkan oleh peristiwa-peristiwa bersejarah yang dimotori oleh mahasiswa yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 60-an. Lihatlah, Revolusi Mahasiswa Berkeley (1964), Peristiwa Perancis (1968) atau gerakan protes mahasiswa di Turki (1965), Jepang (1966) dan tentu saja Indonesia (1966). Peristiwa-peristiwa itu mempunyai pengaruh sosial politik yang dalam sehingga terjadi perubahan sistem kehidupan sosial politik.

Adalah mahasiswa yang tahun 66 "berhasil" menumbangkan rezim di Indonesia. Orde Lama digantikan oleh Orde Baru. Tetapi sesudah rezim baru mengukuhkan diri, banyak mahasiswa —terutama pemimpinnya— merasa tidak puas. Sebab perubahan-perubahan yang mereka kehendaki ternyata tidak muncul-muncul. Penguasa berganti, tetapi situasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis seperti yang mereka cita-citakan dahulu belum berlangsung — kalau tidak boleh dikatakan lebih buruk.

Karenanya kemudian beredar pernyataan-pernyataan yang bernada *olok-olok* bagi "keberhasilan" gerakan mahasiswa 66. Mahasiswa bergerak hanya untuk mendapatkan kursi empuk. Mahasiswa hanyalah kuda yang ditunggangi atau wayang yang didalangi. Demikianlah. Olok-olokan itu tidak hanya dikemukakan oleh generasi mahasiswa berikutnya, tetapi juga dari kalangan mahasiswa 66 sendiri. Berangkat dari olok-olok inilah bola diskusi dalam *Temu Wicara* digelindingkan.

Meremehkan Mahasiswa

"Kita memang terlalu meremehkan gerakan mahasiswa yang pernah terjadi di negeri ini. Penilaian ini tidak adil." Demikian Ipong menanggapi olok-olokan itu. Menurutnya, penilaian itu sepihak dan terlalu memaksakan fenomena gerakan mahasiswa di Barat untuk diterapkan di Indonesia. Gerakan mahasiswa di Amerika, kata Ipong mengambil contoh, memang selalu dilatarbelakangi oleh *vested interest* tertentu. Dalam arti, pemimpinnya merebut kekuasaan

untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi, "apakah benar gerakan mahasiswa Indonesia dilatarbelakangi oleh *vested interest* macam itu?" tanya Ipong.

Untuk menjawab pertanyaan Ipong, Dadang merasa perlu untuk memilah mahasiswa sebagai pribadi dengan mahasiswa sebagai kelompok. Menurut Dadang, kita sering semena-mena menuduh semua orang yang terlibat dalam gerakan mahasiswa mempunyai ambisi atau kepentingan tertentu. Memang ada beberapa yang terbuai dengan jabatan enak, tetapi, "kalau mau diteliti jumlahnya jauh lebih banyak dengan mereka yang tetap konsisten dengan idealismenya," tegas Dadang.

Sedang menurut Suporaharjo, tuduhan mahasiswa ditunggangi atau didalangi atau bahkan diklaim sebagai *orangnya si anu* muncul disebabkan oleh seringnya para aktivis menemui pihak-pihak tertentu. "Padahal mereka ini cuma mencari informasi atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan," tuturnya. Memang pihak-pihak yang bersimpati sering memberi *sangu*, tetapi bagi Suporaharjo ini wajar, karena kebiasaan masyarakat kita: orang berduit memberi uang jajan pada mereka yang belum berprestasi. Cuma persoalannya, "orang-orang yang ditemui mahasiswa sering mengklaim bahwa mahasiswa itu *orang saya*," tambahnya. "Kondisi seperti ini yang harus disadari mahasiswa lainnya," pinta Suporaharjo.

Sementara Ipong meminta perhatian agar mahasiswa tidak termakan oleh isu penunggang-an atau pendalangan. "Saya mencurigai pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut berkeinginan melemahkan gerakan mahasiswa. Karena dengan isu tersebut mahasiswa bisa diadudomba," tuturnya.

Bisa ditunggangi

Mengenai gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan (66 dan 70-an) Yayan bisa me-

mahami kalau terdapat tuduhan penunggang-an. Mengaku tidak paham dengan data-data sejarah, Yayan bilang, "gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan sangat mungkin ditunggangi." Kenapa?

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka adalah bagaimana mengembangkan cita-cita kemerdekaan yang sudah diraih. Di satu pihak terdapat usaha merealisasi cita-cita kemerdekaan, tetapi di lain pihak terdapat berbagai *isme* yang beredar dalam masyarakat, sehingga sangat terbuka sekali kemungkinan berbagai konsep *metodis* untuk menggarap cita-cita kemerdekaan. Di sinilah percaturan politik itu dimulai antar kelompok yang memiliki *isme* yang berbeda. "Nah, dalam keadaan seperti itu, sangat mungkin mahasiswa ditunggangi," tutur Yayan.

Bukan tanpa alasan kalau banyak *isme* politik, atau lebih tepatnya kepentingan politik harus memilih mahasiswa. Secara *natural*, pemuda yang didominasi oleh mahasiswa merupakan simbol pembaharuan dan kebaruan. "Dia adalah matahari, dia adalah fajar yang menggantikan kegelapan malam," ungkap Yayan. Secara *psikologis*, anak muda adalah pemberontak yang mempunyai sikap tergesa-gesa untuk berubah. Dan secara *sosiologis*, pemuda adalah agen paling nyaring bunyinya. "Suaranya harus didengar oleh kelompok sosialitasnya, karena mereka yang menjadi perpanjangan sejarah," tutur Yayan lagi.

Lain halnya dengan gerakan mahasiswa pada masa pra kemerdekaan, sebagaimana diungkapkan oleh Tedjoyuwono. Situasi



YAYAN
SOPYAN

Sekarang bukan zamannya mahasiswa lagi. Orang mulai percaya pada spesialisasi-spesialisasi yang kita pilih.



IPONG
S AZHAR

Saya masih menaruh harapan pada mahasiswa, sebab mahasiswa satu-satunya kelompok yang belum dikooptasi pemerintah.

objektif memang berbeda. Pertama, pembicaraan politik waktu itu terfokus pada soal kemerdekaan dan kedaulatan. Kedua, bangsa Indonesia berurusan dengan bangsa asing yang menjajah. Waktu itu isunya be-

sar dan jelas. "Setiap orang merasa dan melihat nasib bangsanya dihadapkan pada kekuasaan penjajah," kata Tedjoyuwono. Walau sudah banyak isme beredar di masyarakat, sudah banyak kelompok bermunculan, tetapi tujuannya satu dan jelas, "kemerde-

katasi ketidakberesan itu," jelas Dadang.

Implikasi dari gerakan macam ini: pertama, tidak terdapat ikatan ideologis di antara para aktivisnya. Kedua, tidak ada kerangka organisasi yang jelas, dan ketiga, tidak memiliki rencana yang matang. Sehingga, "potensi untuk ditanggung sangat besar," tambah Yayan.

Sementara Yayan melihat peranannya mahasiswa dalam kancah politik dalam arti pengembangan berbangsa dan bernegara sejak 08 sampai 70-an tidak bisa dilepaskan dari kondisi kebudayaan pada setiap zamannya. Memakai kaca mata *Strategi Kebudayaan* Van Puiersyen, Yayan memasukkan masa 08 - 45 merupakan tahap *transisi mistis ke ontologis*.

Pada masa itu relatif sudah banyak anak muda yang disekolahkan, karena itu tidak heran kalau kemudian banyak orang yang mempertanyakan mitos-mitosnya. Bagai-

manapun dalam tahap transisi mistis ke ontologis ini peran kaum cendekia — termasuk mahasiswa — mempunyai posisi yang penting. Karena pada tahap ontologis — yang dicirikan dengan tradisi berfikir memilah-milah — orang sangat mendewakan mereka yang bisa memetakan masalah. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh kaum cendekia. "Dengan demikian masyarakat percaya kepadanya," simpul Yayan.

Pada tahun 60-an, orang berbudaya mistis sudah mulai tersingkir. Unsur ontologis kelihatan makin kuat, sehingga sebagai kaum cendekian mahasiswa diberi peran istimewa oleh masyarakat.

Tidak Zaman-nya Lagi

Sementara tahun 70-an, menurut Yayan merupakan tahap *transisi ontologis ke fungsional*. Banyak orang yang masih berfikir onto-

logis, tetapi banyak pula yang mulai berfikir fungsional. "Pada masa inilah predikat mahasiswa sebagai *orang yang serba tahu* mulai ditanggalkan." Orang mulai percaya pada

lembaga, kelompok atau perorangan tertentu yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu pula. Mahasiswa dianggap tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi politik. "Toh sudah ada lembaga khusus untuk itu, yang mungkin lebih efektif," tambah Yayan.

Menurut Yayan memasuki tahun 80-an sampai sekarang, budaya masyarakat Indonesia sudah menginjak ke ciri berfikir fungsional. Membicarakan hal itu Yayan bermaksud menengok kembali: Apakah benar mahasiswa masih dipercaya atau diperlukan oleh banyak orang? Apakah benar mahasiswa masih diharapkan peran politiknya seperti dulu, dengan gaya gerakan protes dan turun jalan?

Menanggapi lontaran Yayan, Haryanto membenarkan bahwa pengalaman sejarah Indonesia telah memberikan peran politik yang besar bagi mahasiswa. Sudah terlalu sering diomongkan, kalau mahasiswa merupakan kekuatan moral, pembawa suara rakyat. Mahasiswa paling tidak bisa membenarkan ketika melihat kepincangan di masyarakatnya. Itu idealnya. "Sekarang bisa tidak mahasiswa berperan seperti itu?" tanya Haryanto sangsi.

"Mahasiswa sekarang dihindangi rasa ketakutan," Haryanto menjawab pertanyaannya sendiri. Secara psikologis, ketakutan itu tidak disebabkan dari pihak lain, tetapi dari diri sendiri. Mahasiswa secara umum tidak yakin akan kemampuannya untuk mendapatkan lapangan kerja. Mahasiswa tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa masa

depannya akan lebih baik. "Bagaimana dapat menjadi sandaran masyarakatnya kalau mengatasi persoalan sendiri saja masih kesulitan?" tutur Haryanto lagi. Padahal sebuah gerakan, apalagi gerakan politik itu butuh idealisme, kepercayaan diri dan sekian banyak perangkat organisasi.

Yayan melihat dari sisi kebudayaan, sementara Haryanto dari sisi psikologis, tetapi tampaknya mereka se-

pakat gerakan mahasiswa dalam arti gerakan politik — karena gerakan mahasiswa selalu mengidentifikasikan dengan gerakan politik — sulit untuk dilakukan, atau dalam



TEDJO
YUWONO

Kalau sudah begini, lalu apa bedanya dengan zaman kultur stelsel. 'Siapa pun tahu yang jadi korban adalah rakyat kecil.

kaan!", tegas Tedjoyuwono.

Faktor Penyebab

Walaupun situasi obyektif berbeda antara masa pra dengan pasca kemerdekaan berbeda, tetapi terdapat faktor kondisional yang tetap yang menjadi sebab utama terjadinya gerakan mahasiswa. Sambil mengutip tulisan *George T Kahin*, Ipong membeberkan munculnya gerakan Boedi Oetomo yang dimotori oleh mahasiswa STOVIA tidak lepas dari beredarnya isu ketidakadilan perlakuan Pemerintah Belanda terhadap sarjana-sarjana pribumi.

Hanya dua persen dari sarjana pribumi yang menempati posisi yang berstatus sosial tinggi, misalnya pegawai pangreh projo. Sementara orang Belanda dan Timur Asing, yang sebenarnya tidak banyak memiliki tingkat pendidikan tinggi malah mendapatkannya. "Di sini lah terdapat kondisi riil yang berkaitan langsung dengan masa depan mahasiswa," kata Ipong. Isu ketidakpastian masa depan inilah yang menurut Ipong merupakan faktor penyebab yang tetap dari setiap gerakan mahasiswa.

Dari sisi lain Dadang merasa perlu memisahkan gerakan mahasiswa sebagai *moral force* dengan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik. Baginya, gerakan mahasiswa belumlah gerakan politik. Gerakan mahasiswa hanya sebagai moral force. Sebagai gerakan moral, gerakan mahasiswa muncul karena *nurani*. "Artinya, sebagai manusia, mahasiswa melihat ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya dan bergerak untuk



SUPO
RA
HARJO

Kalau ada momen ketidakadilan, pengusuran atau pengrusakan lingkungan harus diperjelas. Sebab bila diurut-urur bisa jadi kasus itu melibatkan para pejabat.

bahasa mudahnya sudah tidak zamannya.

Pilihan Terakhir

Lain halnya dengan Ipong. "Dalam sistem politik sekarang ini saya masih menaruh harapan kepada mahasiswa sebagai penarik picu adanya perubahan," tutur Ipong. "Bukan apa-apa, sebab mahasiswa adalah satu-satunya golongan yang belum dikooperasi oleh pemerintah," tambahnya.

Seperti halnya di negara berkembang lainnya, menurut Ipong pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan *politik birokrasi-otoriter*. Model kebijaksanaan seperti ini bersifat formal legalistik dan bersih keras bahwa kekuasaan tidak boleh menyebar. Karena itu penguasa tidak akan mentelior gerakan politik yang sifatnya inskonstitusional dan melarang aktivitas-aktivitas yang memungkinkan akan mengancam kekuasaan. "Partai politik dikendalikan dan mahasiswa diredam. Dalam bahasa politik birokratik otoriter, demonstrasi dan protes adalah tidak sah," jelas Ipong.

Sementara itu Tedjoyuwono melihat kebijaksanaan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan, yang ingin cepat menghasilkan uang, menyebabkan rencana pembangunan (pertanian) berubah-ubah. Akibatnya rakyat kecil — yang tidak memiliki akses politik — menanggung beban ketidakpastian hukum. "Hal inilah yang memunculkan keruwetan masalah tanah akhir-akhir ini," kata Tedjoyuwono.

Di sisi lain, pembangunan pertanian kita ibarat membangun sebuah pabrik. Petani

dianggap sekrup, kalau ada sekrup yang rusak, diambil terus dibuang. "Aktor-aktor pertanian itu dianggap tidak sebagai manusia," kata Tedjoyuwono prihatin. Belum lagi petani dipaksa menanam jenis tanaman tertentu. Petani dilarang menanam komodite yang mereka anggap menguntungkan.

"Kalau sudah begini, lalu apa bedanya dengan zaman *cultuur stelsel*, yang waktu itu petani diwajibkan tanam kopi?" "Siapa pun tidak bisa membantah yang jadi korban adalah rakyat kecil," tambah Tedjoyuwono. Karena itu sudah seharusnya kalau mahasiswa membela mereka yang

jadi korban pengatasnamaan pembangunan. Dan tampaknya aksi-aksi mahasiswa dua tahun terakhir ini sering dilandasi oleh masalah-masalah itu. Lihatlah misalnya aksi Kedungombo, Kacapiring, Badega, dan Cimacan.

Mencari Bentuk Gerakan

Menyinggung soal masalah-masalah yang diangkat oleh aksi mahasiswa tahun 80-an ini, Ipong menyatakan isu-isunya sudah benar dan mengakar, walau sifatnya kasuistik dan lokal. "Hanya saja di masa depan, agar gerakan mahasiswa muncul maka isu-isu yang dilonarkan perlu diperkuat," tutur Ipong. Kenapa? Ipong melihat, dalam sebuah gerakan politik — lagi-lagi karena gerakan mahasiswa selama ini identik dengan gerakan politik — semakin kabur isu gerakan akan semakin baik dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok yang terabaikan. Misalnya isu ketidakadilan atau demokratisasi. Semua kelompok yang ada di masyarakat sepakat dengan isu tersebut, sehingga mereka bisa menyatu untuk melakukan gerakan. "Makin kabur isu gerakan makin baik," tegas Ipong.

"Saya mau menegaskan. Saya tidak mengatakan bahwa di masa depan tidak ada gerakan mahasiswa lagi. Cuma saya mengatakan: sekarang bukan zamannya mahasiswa lagi," kata Yayan menyambung pembicaraan Ipong. Yayan khawatir kalau mahasiswa mau seperti tahun 70-an dan sebelumnya, nanti jadi omong kosong. Namun bukan berarti mahasiswa harus kembali "duduk membaca" terus selesai. Yang perlu diperhatikan, kata Yayan lagi: bagaimana mencari bentuk-bentuk baru keterlibatan mahasiswa dalam memecahkan persoalan masyarakatnya.

"Kini zamannya orang berfikir fungsional, orang mulai percaya dengan spesialisasi-spesialisasi yang kita pilih," sambungnya.

Menurut Yayan kesetaraan masyarakat sekarang makin pragmatis. Di pihak lain

masyarakat mulai muak dengan kondisi kebudayaan yang dikuasai oleh sikap *hipokrit*. "Kita terlalu banyak omong, tetapi tidak ada realisasinya," tegasnya. "Juga termasuk



DADANG
YULIANTORO

Mahasiswa melihat ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya dan tergerak untuk mengatasi ketidakberesan itu.

omong kosong adalah turun ke jalan dengan membawa poster 'tidak adil', tanpa tahu di mana letak ketidakadilan itu," jelasnya. "Kalau lebih konkrit, orang akan lebih tersentuh," tegas Yayan lagi. Yayan mengambil contoh: kenapa mahasiswa dari fakultas Teknologi Pertanian dan Ekonomi tidak membentuk kelompok penelitian makanan, sehingga kalau terjadi kasus lemak babi atau biskuit beracun, mahasiswa bisa langsung mengatasinya.

Rupanya Suporaharjo sepakat dengan apa yang dikemukakan Yayan. Menurut-nya, isu yang kabur justru akan membongkar masyarakat. "Justru kalau terdapat momen ketidakadilan, entah itu pengrusakan lingkungan atau penggusuran harus diperjelas. Soalnya kalau kalau diurut-urur bisa jadi kasus itu melibatkan para pejabat. Kalau sudah demikian masyarakat tidak berani," tutur Suporaharjo. Baginya, kasus pembangkangan misalnya, merupakan kesempatan masyarakat untuk mengungkapkan hal yang salah dalam masyarakat. "Saya kira mahasiswa bisa terus menerus mengangkat masalah ini hingga tuntas, entah melalui loby, aksi atau selebaran gelap," tambahnya.

Evaluasi dipaparkan. Pengalaman telah kita renggut. Alternatif-alternatif juga sudah disuguhkan. Sementara di hadapan kita, di masyarakat kita persoalan masih menumpuk. Mau apa kita mahasiswa Indonesia?

Dibantu: Wahyudi, Nizar, Hesti, Tanti, Prihayudi



HAR
YANTO

Bagaimana mahasiswa dapat menjadi sandaran masyarakat kalau mengatasi persoalan sendiri saja masih kesulitan.

GERAKAN MAHASISWA INDONESIA PASCA 80-AN

MT ARIFIN

Kemandulan demikian menyebabkan terjadinya ketimpangan umum antara pertumbuhan pengetahuan dengan wawasan moral keilmuan. Akibatnya, tumbuh ketimpangan mahasiswa dalam melihat realitas diri dan sosialnya.

Penulis:
Mantan Ketua
Dewan Mahasiswa IKIP
Negeri Yogyakarta.

Membicarakan gerakan mahasiswa di Indonesia sama luasnya dengan membicarakan sejarah Indonesia sendiri, setidaknya tidaknya semenjak awal abad ke-20. Fenomena seperti itu menuntut diadakannya periode-sasi untuk mempersempit kajian; di samping pertimbangan ruang lingkup yang memberikan kemungkinan diperolehnya spesifikasi yang membedakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap babakan periode. Tulisan ini mencoba membatasi diri pada gerakan mahasiswa periode pasca 80-an. Pembatasan tersebut didasarkan atas pelbagai pertimbangan.

Pertama, gerakan mahasiswa pasca 80-an merupakan aktivitas aksi mahasiswa yang muncul setelah kemunduran gerakan mahasiswa periode sebelumnya (tahun 70-an), yang oleh **Albach** dikatakan sebagai pengaruh dari pelbagai faktor sosial tertentu yang paling terkait secara simultan (**Altbach**, 1988).

Kedua, gerakan mahasiswa pasca 80-an merupakan gerakan mahasiswa yang berbeda dengan masa sebelumnya. **Arbi Sanit** mengatakan bahwa setelah tahun 78 mahasiswa tidak lagi tampil sebagai pencetus dan penggagas ideologi yang mewarnai pemikiran politik nasional (**Arbi Sanit**, 1989). Sedangkan pertimbangan ketiga menyangkut gerakan mahasiswa pasca 80-an yang merupakan proses yang mungkin hingga kini masih berlangsung sehingga menarik untuk diperbincangkan guna memperoleh masukan-masukan yang akan bermanfaat dalam merumuskan konsep yang lebih baru dan akurat.

Dalam pelbagai bentuknya, gerakan mahasiswa sering menampilkan sikap korektif dan mengajukan alternatif perubahan-perubahan politik. Hal demikian biasanya bertumpu pada cita-cita (idealisme) kemandirian bangsa baik secara politik

maupun ekonomi yang menurut sebagian mahasiswa telah mulai bergeser dalam kehidupan masyarakat.

Anehnya sikap mahasiswa yang demikian sering dianggap sebagai oposisi, dan karena itu diatasi bukan sekadar melalui "penjinakkan" terhadap aksi-aksi mahasiswa, melainkan dengan pengaturan strategi kehidupan kampus. Pemandangan seperti itu kentara sekali ketika terjadinya gerakan-gerakan mahasiswa tahun 70-an.

Ada dua langkah penting yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi gerakan mahasiswa yang dianggap dapat mengancam stabilitas politik dan kelangsungan pembangunan nasional. Kedua langkah itu adalah: pertama, pemerintah mencoba melakukan intervensi kebirokrasian terhadap kehidupan kampus; kedua, diadakannya pembenahan dan penataan kembali tatanan politik yang sedikit banyak melibatkan unsur-unsur kampus. Kebijakan-sanaan ini berhasil dilakukan dengan cara memperbesar peranan pemerintah dalam pengangkatan dosen dan pejabat perguruan tinggi, pengelolaan anggaran, pemisahan kampus dari politik praktis, pengaktifan **Korpri** bagi tenaga edukatif, memonopoli pengertian kebebasan mimbar dan akademik serta keterlibatan yang semakin intens para pimpinan perguruan tinggi di dalam Golongan Karya.

Langkah strategis penguasa telah berhasil menekan peran politik kampus dan pergerakan mahasiswa secara nasional. Karena itu pergerakan mahasiswa yang berpijak dari pengembangan isu nasional mengalami kegagalan sebelum berhasil meluaskan pengaruhnya. Dapat dilihat, hingga pasca tahun 80-an pergerakan mahasiswa tidak berhasil menggunakan permasalahan nasional untuk mengarahkan aksi-aksi yang menekan kebijakan politik, serta tidak berhasil menjadikan kampus dengan lembaga-lembaga kema-

hasiswaannya sebagai sarana konsolidasi politik mahasiswa secara resmi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Pembinaan kemahasiswaan pada umumnya belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh konsep **NKK** maupun wawasan almamater, karena di dalam prakteknya, pembinaan kemahasiswaan lebih berperan sebagai "polisi" untuk menangkalkan gerakan aksi mahasiswa. Berkenaan dengan itu, **Arbi Sanit** mengatakan bahwa sistem pembinaan kemahasiswaan dewasa ini menghasilkan orang yang apatis terhadap politik dan mengembangkan sikap tidak bersedia mengkaji politik kemasyarakatan secara kritis.

Secara konseptual sesungguhnya keinginan konsep **NKK** maupun wawasan almamater terhadap pembinaan kemahasiswaan itu juga memiliki sisi yang baik, antara lain kehendak mengembangkan konsep belajar secara modern, yang menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah. Akan tetapi kondisi pembinaan kemahasiswaan yang diterapkan selama ini tampaknya tidak siap mengembangkan proses pendidikan yang oleh **John Klenig** disebut dengan *a critical valuable concept*. Konsep ini ditandai oleh tiga ciri; pelibatan perspektif kognisi secara luas di dalam proses belajar; kemampuan kognisi tersebut untuk mempengaruhi jalannya kehidupan masyarakat; dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam komitmen "kedisinian" bagi pemikiran pembangunan sosial.

Upaya pengembangan pokok pikir di atas memang telah dicoba dilakukan, tapi tidak banyak berhasil mengingat besarnya kekuatan struktural dalam proses akademik, sehingga aktivitas para dosen dan mahasiswa semakin menipis. Semangat ilmiah dan suasana akademik yang dinamis boleh dibilang kurang mewarnai kehidupan kampus, sehingga intelektual yang

merupakan esensi kriteria produktivitas akademik tidak muncul dalam aktivitas kampus. Kemandulan demikian menyebabkan terjadinya ketimpangan umum antara pertumbuhan pengetahuan dengan wawasan moral keilmuan. Akibatnya, tumbuh ketimpangan mahasiswa dalam melihat realitas diri dan sosialnya. Kebutuhan mahasiswa yang terorganisasi di dalam kawasan gerak sensoris, emosi sosial dan intelektual tak berkembang sepadan dengan pertumbuhan fungsi reseptif, integratif dan ekspresifnya. Proses belajar di universitas pasca NKK dan wawasan almamater secara umum belum berhasil mengembangkan kepercayaan diri mahasiswa untuk menjadi manusia penganalisa bagi pemecahan masalah sosial secara padu dalam artian sistematis dan sistemik. Program-program Kuliah Kerja Nyata dan penelitian mahasiswa memang besar manfaatnya untuk kepentingan tersebut, namun belum mampu membangun satu kesadaran mahasiswa sebagai intelektual, karena hingga sekarang program-program tersebut lebih banyak menempatkan mahasiswa dalam kerangka aksi sosial dan atau sebagai pekerja di bawah pengawasan kekuatan struktural. Mungkin yang sangat memperkuat ketidakberhasilan proses akademik itu adalah ketidakberhasilan pelaksanaan sistem kredit semester dan kecurigaan para pembina kemahasiswaan terhadap aktivitas mahasiswa.

Belum terlaksananya sistem kredit semester secara benar umumnya dikarenakan oleh orientasinya yang berlebihan kepada administrasi akademik, di samping kurang proporsional. Kurikulum yang syarat beban, penjurusan yang kaku dalam studi, serta mentalitas dosen dan mahasiswa yang kurang mendukung pengembangan akademik telah memacetkan kecanggihan sistem SKS tersebut untuk menopang proses pengembangan intelektual.

Lain dari itu, kecurigaan

terhadap aktivitas kemahasiswaan dan masuknya pengaruh organisasi mahasiswa ekstra kampus sering memberi kesempatan pembina kemahasiswaan untuk campur tangan dalam aktivitas lembaga kemahasiswaan. Apalagi motivasi "kum" dan "penyingkiran" bekas tokoh mahasiswa dari lingkungan pembina kemahasiswaan telah pula menimbulkan suasana pembinaan kemahasiswaan tidak kondusif bagi penampilan tokoh mahasiswa yang memiliki keseimbangan *performance* kepemimpinan intelektual.

Kemandulan proses akademik dan pembinaan kemahasiswaan yang demikian memang menghadirkan "kestabilan", namun juga kerugian. Sikap apatisisme dunia kampus terhadap

bandingkan dengan masa-masa 80-an telah mendorong gerakan mahasiswa yang muncul pasca 80-an memiliki ciri yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

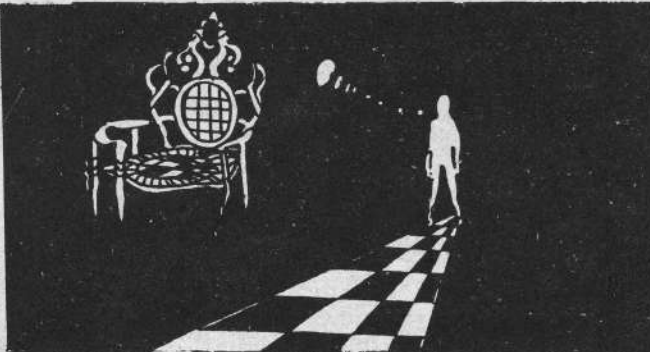
Gerakan mahasiswa pasca delapan puluhan lebih cenderung berorientasi mikro seperti yang terjadi dalam gejolak-gejolak kampus di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 1988. Sifat kasuistik dan regional menandai gerakan mahasiswa dekade delapan puluhan. Pada kasus pergerakan yang bersifat gejolak kampus lebih merupakan aksi yang didorong oleh kepentingan-kepentingan mahasiswa, atau karena dorongan-dorongan untuk melakukan perubahan kepemimpinan perguruan tinggi. Jika gejo-

Lain lagi dengan gerakan mahasiswa ke dua. Ia mencoba mengangkat kasus-kasus lokal sebagai tema aksi protes. Peristiwa di Kedung Ombo, Kaca Piring, Cimacan dan beberapa kasus lainnya. Dalam peristiwa tersebut kelompok mahasiswa mencoba mengangkatnya menjadi isu lokal, regional atau bahkan nasional melalui aksi protes dan demonstrasi. Memang, ada upaya mengatasnamakan Perguruan Tinggi dalam melakukan aksi tersebut, namun sering kali diragukan kebenarannya, seperti dalam selebaran tentang kasus Kedung Ombo dan pasar Singosaran di Solo. Demikian pula mereka tidak mempergunakan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang resmi yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Tampaknya gerakan-gerakan itu lebih bertumpu pada kasus-kasus lokal yang diinterpretasikan sebagai agregasi gerakan. Jadi bukan gerakan yang didasarkan pada ketimpangan-ketimpangan sosial, melainkan pada satu kasus tertentu sebagai pengikat solidaritas mereka. Berdasar pelbagai informasi yang sulit untuk dibuktikan, pembentukan solidaritas tersebut bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu yang kaya memiliki data tentang pengembangan level bawah. Namun demikian popularitas gerakan yang demikian sangat ditopang oleh medium yang paling tidak mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, seperti munculnya tokoh-tokoh ternama, keikutsertaan media massa tertentu serta beberapa daya dukung dari lembaga-lembaga luar negeri. Kiranya perlu diingat bahwa kasus yang demikian sulit mengangkat figur kepemimpinan para tokoh gerakan-nya.

Sementara itu Arbi Sanit menilai bahwa gerakan mahasiswa pasca 80-an belum berhasil menjadi pencetus ideologi sebagaimana yang telah terjadi pada masa awal kemerdekaan dan antara tahun 65 hingga 78.

HARYANTO



ketimpangan-ketimpangan sosial mendorong berbagai kritik dan tanggapan dari luar, seperti apa yang dilontarkan Prof. Dr. Mukti Ali, Harsya W. Bachtiar dan Emil Salim. Kritik-kritik tersebut mulai mendapat sambutan dari pihak penguasa tat kala secara tegar Direktur Kemahasiswaan, Enoch Markum, mulai menyuarkan pemikiran baru dalam pembinaan kampus.

Kemandegan regenerasi kelembagaan mahasiswa setelah penghapusan *student government* (78), keterputusan hubungan antar kampus melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan, menciutnya kemandirian lembaga mahasiswa, ketidakberhasilan pengembangan iklim keilmuan, serta stagnasi proses pembinaan kemahasiswaan oleh organisasi-organisasi ekstra di-

lak itu menyangkut persoalan teknis, biasanya lebih banyak didorong oleh kepentingan mahasiswa itu sendiri. Namun jika sudah menyangkut masalah kepemimpinan perguruan tinggi, pada umumnya telah melibatkan kekuatan-kekuatan non-mahasiswa, baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus.

Gejolak demikian biasanya tidak melibatkan organisasi-organisasi ekstra kemahasiswaan di luar Perguruan Tinggi, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Kalaupun ada, hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh figur-figur tertentu yang memiliki kaitan dengan suatu kelompok atau organisasi tertentu pula, sehingga melibatkan kelompok atau organisasi tersebut pada level atas.

Hal ini nampaknya dikarenakan lemahnya kelembagaan untuk mengkonsolidasikan gerakan seperti yang pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya.

Memang, ada upaya untuk menjadikan lembaga pers mahasiswa yang ada pada masing-masing kampus sebagai jalur konsolidasi tersebut, namun tampaknya belum dapat berjalan secara mulus mengingat banyaknya lembaga tersebut yang belum mapan di samping masih adanya pertentangan di antara lembaga pers mahasiswa itu sendiri.

Meskipun demikian, pergerakan demikian mampu mencoba memformulasikan satu gerakan mahasiswa ke tingkat nasional yang banyak memperoleh perhatian dari pelbagai media massa. Akan tetapi kekuatan moral yang berhasil dikembangkan umumnya terhenti pada tingkatan tertentu, karena isu-isu yang dikembangkan kurang mampu menarik mahasiswa di luar para aktivis yang ada di lingkungan pers kampus mahasiswa dan beberapa aktivis tingkat senat. Barangkali yang menjadi persoalan pula adalah terbatasnya komunikasi antara pimpinan gerakan dengan mahasiswa umumnya. Selama ini hubungan mereka umumnya menggunakan media tertulis yang jangkauan edarnya terbatas, dan ketertarikan mahasiswa terhadap tulisan-tulisan seperti itu juga terbatas.

Faktor komunikasi demikian juga didukung oleh keterbatasan informasi pergerakan melalui media. Media seperti itu memang mengangkat gerakan mahasiswa, namun hanya terbatas pada pemberitaan. Dimungkinkan karena adanya batas "kasat mata", di samping adanya pelbagai pertimbangan rumit. Sepertinya pada saat surat kabar besar melakukan praktek pemekaran usaha, instabilitas politik akan memburuk akibat kuatnya pemberitaan oleh surat kabar dianggap akan merugikan usaha dan investasinya itu.

KRISIS PEMIMPIN MAHASISWA PASCA 80-AN

HERI SANTOSA

Sering disalahtafsirkan, bahwa aktivitas pemuda, lebih-lebih mahasiswa hanya dianggap sebagai penyaluran kelebihan tenaga. Ada anggapan: mahasiswa hidup di masa tua, sedang masa muda hanyalah riak-riak tak berarti.

Penulis :
Ketua Umum BPM
Fak Kehutanan UGM
87-89.

Sewaktu menjabat sebagai Rektor UGM, Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri bilang, "Sekarang ini hampir tidak ada tokoh mahasiswa yang dapat dijagokan di sebuah universitas, termasuk UGM." Kalau yang disinyalir Koesnadi itu benar, berarti akan berakibat jauh yakni, krisis kepemimpinan di kalangan sipil, seperti yang sedang dirasakan sekarang ini.

Bagaimana juga --setidaknya sampai saat ini-- mahasiswa masih dianggap sebagai figur calon pemimpin bangsa. Melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas akan memunculkan tokoh mahasiswa di tingkat universitas, yang pada gilirannya bisa tampil sebagai tokoh nasional. Koesnadi tampaknya mencoba membandingkan mahasiswa pada zamannya dengan kondisi mahasiswa kini yang dianggap lesu.

Berbicara masalah tokoh mahasiswa bukan berarti mendambakan masa-masa romantik protes pada zaman KAPPI/KAMI dulu. Bukan berarti pula mendambakan pemikiran-pemikiran yang anarkhis. Perlu disadari, mahasiswa hendaknya paham akan eksistensi dirinya dan lingkungannya. Kampus bukanlah menara gading yang identik dengan buku, pesta, cinta dan olah raga.

Dunia mahasiswa adalah dunia pemuda yang pebuah potensi dan gejolak dalam setiap aktivitasnya. Sering disalahtafsirkan, bahwa aktivitas pemuda, lebih-lebih mahasiswa, hanya dianggap sebagai penyaluran kelebihan tenaga. Ada anggapan: mahasiswa hidup adalah masa tua, sedang masa muda adalah riak-riak yang tidak berarti dalam perjalanan hidup.

Di masyarakat berkembang masih kuat adanya anggapan klasik bahwa pembangunan memerlukan pemikiran yang mantap dan stabil, suatu hal yang hanya dimiliki oleh kaum tua. Dinamika mahasiswa belum di-

anggap sebagai dinamika kehidupan bangsa, tetapi hanya sebagai dinamika wawasan kehidupan. Keterlibatan mahasiswa dalam pola dan proses kehidupan sering dianggap belum berarti. Karena itu pemuda (mahasiswa) hanya dijadikan obyek pengeterapan kebijaksanaan. Dalam realitas kehidupan, prinsip, arah dan tujuan (pembangunan) bangsa dan negara semuanya ditentukan oleh generasi tua. Kesenjangan macam ini jelas akan mematikan potensi dan kreativitas pemuda (mahasiswa). Sadar atau tidak "budaya" ini tumbuh subur dalam kehidupan kampus maupun di luar kampus.

Kalau kita amati kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam wadah SEMA dan BPM mengarah pada kegiatan-kegiatan yang mendukung anggapan di atas. Mahasiswa kurang mempunyai kepercayaan diri untuk berbuat sesuatu terhadap masalah-masalah yang menghinggapinya.

Majalah **BALAIRUNG** pernah mensinyalir: mahasiswa perlu seminarkan dirinya. Ini himbauan yang tepat, agar mahasiswa mulai menyadari mengapa dia memilih dirinya sebagai mahasiswa, sebagai insan yang mau tidak mau harus "berpikiran lebih" dibandingkan dengan golongan muda lainnya yang tidak berkesempatan menjadi mahasiswa. Kesadaran "berpikiran lebih" memang bukan hal mudah diciptakan. Pengaruh lingkungan dan pola pendidikan tinggi yang ada sangat besar artinya bagi penciptaan insan "berpikiran lebih". Lalu bagaimana pengaruh diterapkannya NKK-nya Daoed Joesoef.

Sebagai salah satu pola yang diterapkan kampus, lembaga kemahasiswaan SEMA dan BPM berperan sebagai wadah kegiatan mahasiswa yang nantinya akan bisa mendukung tujuan global pendidikan tinggi, yaitu menciptakan intelektual yang mempunyai kekuatan penalaran individual pada masing-masing bidang ilmu yang digeluti sebagai pengisi lapisan tek-

nostruktur di setiap bidang penghidupan masyarakat.

Dengan pola ini pemikiran dan orientasi setiap mahasiswa sudah diarahkan, diatur untuk kepentingan tertentu. Kondisi inilah yang memberi kontribusi terhadap terjadinya krisis jiwa kepemimpinan mahasiswa. Tidak adil kiranya mengharapkan munculnya tokoh mahasiswa yang lahir dari dua lembaga intra universitas yang ada sekarang selama kebijaksanaan yang diterapkan masih menjadikan mahasiswa sebagai obyek.

Pendidikan di negeri ini di-

jauh keahlian itu memang sesuai dengan dituntut oleh usaha pembangunan."

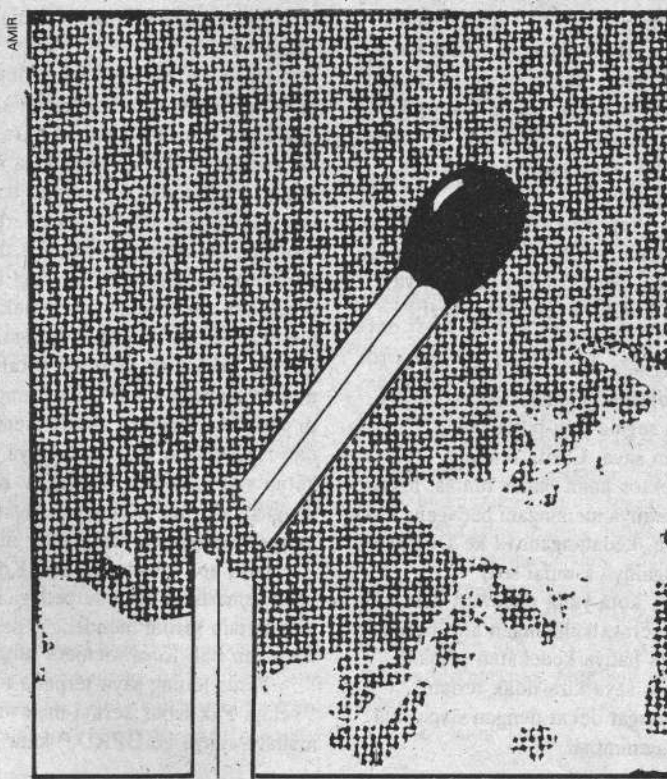
Dengan demikian perangkat-perangkat yang diterapkan dalam produksi tenaga (universitas), dalam hal ini SEMA dan BPM sengaja diciptakan untuk mendukung gagasan tersebut. Dapat dikatakan pola pikir mahasiswa terarah untuk menjadi tenaga ahli dalam pembangunan yang *notabene* hanya sebagai salah satu *sekrup* dalam mesin pembangunan. Esensi pendidikan terbatas pada ruang dan waktu pembangunan yang se-

Sudah saatnya kita "berdemokrasi" dalam berpikir. Kita sendirilah mahasiswa yang akan dan harus menentukan sikap kita terhadap pembangunan. Bahkan lebih luas lagi, hak kita pulalah untuk menentukan identitas kita sebagai mahasiswa.

Mahasiswa adalah calon pemimpin yang harus berpihak kepada pembangunan. Bukan pembangunan sembarang pembangunan, tetapi pembangunan yang berpihak pada rakyat banyak, bukan pada segelintir orang. Menyadari hal ini mahasiswa bukan sekedar calon intelektual yang malah memupuk kekayaan pemilik modal pembangunan. Karena kemiskinan dan ketimpangan pada dasarnya bukan akibat dari kondisi masyarakat setempat, seperti taraf pendidikannya, tetapi lebih banyak karena eksploitasi di segala bidang termasuk eksploitasi pemikiran yang pada gilirannya akan terjadi pendangkalan kreativitas.

Sementara iklim yang perlu untuk menumbuhkan kreativitas adalah kebebasan berpikir, demokrasi berpikir yang *notabene* adalah hak azasi manusia. Mengembangkan wawasan untuk mengerti siapa dirinya adalah cara yang paling tepat untuk kemudian dapat menemukan identitasnya sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa datang.

Pendangkalan berpikir mahasiswa sebagai akibat dari pengeterapan kebijaksanaan seperti tersebut di atas dikatakan sudah membudaya. Banyak mahasiswa dalam menganggapi kegiatan-kegiatan kampus cenderung naif. Jika kegiatan tersebut tidak memberikan imbalan yang langsung dapat dirasakan karena pengorbanan waktu dan tenaga, maka mereka "sungkan" aktif di dalamnya. "Apa yang saya dapatkan jika saya harus berkorban waktu dan tenaga?". Sebaliknya jika kegiatan tersebut memberikan imbalan langsung seperti yang dia harapkan, maka akan senang hati mereka mengikutinya.



arahkan pada lingkup yang dangkal, yakni menghasilkan intelektual yang akan memperlancar tercapainya tujuan pembangunan. Sebagaimana ucapan Daoed Joesoef, pendidikan tinggi sebagai jenjang terakhir pendidikan formal mempunyai fungsi yang berdemensi tiga, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui aktivitas pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi secara langsung menghasilkan berbagai jenis tenaga ahli. Produksi tenaga ahli ini berarti sudah mengabdikan pada masyarakat se-

dang dilaksanakan. Sulit kiranya bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan dan pola pikirnya, jika tidak menyadari eksistensi dirinya.

Cara berpikir yang demikian ini menjadi salah satu katalisator pengikis idealisme. Apa yang digembar-gemborkan bahwa mahasiswa adalah generasi pemimpin bangsa hanya ada dalam angan-angan. Akhirnya kita akan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin mempunyai idealisme yang dangkal-- jika tidak mau dikatakan tidak punya?

Waktu telah bergerak melewati pukul 23.00. Suara takbiran masih bergema di surau. Ir. Bambang yang duduk di samping saya sudah mulai lelah bercerita tentang petualangannya selama dua tahun di Jakarta mencari pekerjaan. Cerita tentang kuliahku yang amburadulpun telah kuhabiskan. Sementara kang To, tuan rumah, tampaknya tak berminat menambah pembicaraan. Suasananya menjadi agak sunyi, selain suara takbiran dan kesibukan istri kang To bersama mertuanya yang sedang masak di dapur.

Ir. Bambang Harsono yang duduk di samping saya itu, 17 tahun yang lalu saya panggil Bambang. Ia termasuk anak orang kaya di kampungku. Nakalnya minta ampun, tetapi nilainya selalu paling baik di kelas. Karena itu, meskipun nakalnya setengah mati dan suka memaki-maki, saya tetap paling suka belajar dengannya. Kini ia sudah dua tahun jadi insinyur dan masih menganggur. Sedangkan kang To, dulu ia sering kupanggil kang To koreng karena kakinya sering korengan. Namanya yang benar Sugiyanto. Ia cuma tamatan Tsanawiyah — setingkat SMP — dan setahun tinggal di pesantren. Sejak dulu ia sudah belajar membuat kursi atau meja pada *pak liknya* yang memang tukang kayu. Sekarang ia menjadi pengusaha meubel dengan sembilan orang tukang kayu, dua orang tukang plitur dan seorang tenaga pembukuan. Hebatnya ia juga memiliki yu Tarmi yang sudah mengandung dua bulan, gadis yang — maaf — dulunya sering saya lirik.

"Eh, ya, bagaimana khabarnya Prof. Koesnadi?" tiba-tiba Ir. Bambang bertanya memecah keheningan itu, sambil menyalakan kembali batang rokoknya yang sudah mati. "Sudah pensiun ya?"

"Belum, tetapi beliau memang sudah bukan rektor lagi," jawabku segera.

"Wah, dia itu hebat lho, jarang ada rektor sebegus dia. Orangnya ramah, pemberani, demokratis, memperhatikan orang kecil....." Maka berhamburanlah segala puji-pujian buat pak Koesnadi dari Ir. Bambang dan saya. Cerita tentang keberhasilan pak Koesnadi sebagai rektor kami bahas tuntas. Mulai dari pembangunan fisik di UGM, caranya menangani pedagang kaki lima, caranya menangani mahasiswa, kedatangannya ke DPRD membawa mahasiswanya, dan sebagainya sampai soal pertemuannya dengan para sopir bis kota yang melewati kampus.

"Barangkali betul bahwa kita merasa kehilangan atas perginya pak Koes dari jabatan rektor, tetapi hanya kedekatan pribadi saja saya kira yang hilang. Pak Koes saya kira tidak terlalu istimewa, kecuali pribadinya yang sangat dekat dengan siapa saja," tiba-tiba kang To mulai semangat menimpali.

KAN

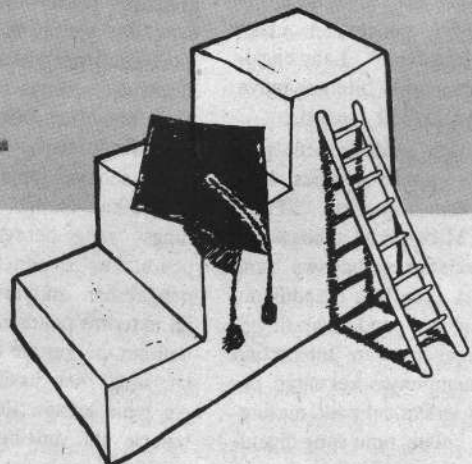
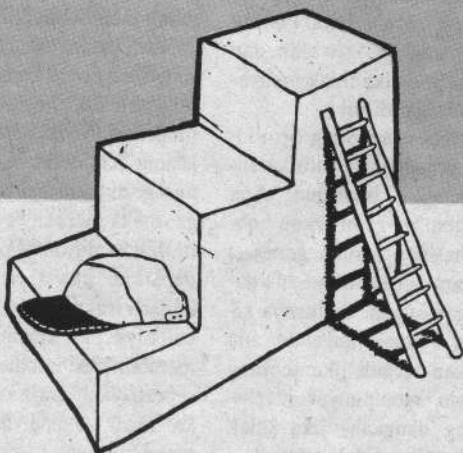
"Ah, kyai kampung kita ini juga tahu rupanya". Celethuk Bambang dengan gaya kanak-kanaknya. Kang To sekarang memang kami juluki kyai kampung karena sering dipanggil pemuda-pemuda kampung untuk ceramah di masjid-masjid.

"Ya jelek-jelek begini, masih suka lho mBang, kalau cuma langganan koran basi (maksudnya koran pagi, yang sampai di kampung saya pasti sudah sore)". Kalau dilihat secara substansial kebijaksanaan apa sih yang hebat dari Pak Koes? Beliau mulai meng-conblock- jalan lingkar UGM. Buat orang yang biasa melihat jalan berlubang-lubang, melihat jalan yang sudah ditambal saja sudah merupakan karunia. apalagi di-conblock. Seperti landasan kapal terbang.

Pak Koes berhasil menertibkan pedagang kaki lima di kampus dengan membangun shelter-shelter untuk mereka. Tak cuma pak Koes yang tahu bahwa para pedagang itu umumnya terbatas keuangannya. Tetapi andaikata mereka disuruh membuat shelter sendiri yang bersih dan teratur barangkali bisa. Cuma, persoalannya tak sesederhana itu. Mereka bertindak lebih banyak mengandalkan otot dan perasaannya. Mereka tidak mungkin hanya disuruh-suruh dan disodori peraturan, apalagi bila dikasari secara paksa. Mereka dibuatkan shelter dan diberi hak untuk menempati. Dengan begitu mereka merasa dihargai, dikasihani, dan dilindungi. Biasanya mereka kemudian menjadi patuh dan yang penting mereka jadi mudah diajak bicara. Inilah yang juga dilakukan para kyai di pedesaan. Mereka cukup memberikan ceramah yang dibutuhkan dan mendo'akan masyarakatnya. Kata-kata Kyai lebih ampuh ketimbang kata-kata pak lurah. Kalau ada pengajian atau keperluan keagamaan yang lain, sumbangan dari masyarakat jauh lebih banyak ketimbang pajak yang dikumpulkan pak lurah.

Jadi, apa kehebatan Pak Koes? Pak Koes, hanya melakukan yang semestinya kepada pedagang kaki lima itu. Tetapi karena kita terlalu sering mendengar pengusutan di mana-mana, maka tindakan Pak Koes menjadi sangat istimewa.

Terus terang saya terpana mendengar kata-kata kang To. "Tetapi Pak Koes berani melawan arus, dengan mengantar mahasiswanya ke DPRD," kata Ir. Bambang.



IAS G TO

"Bukan." jawab kang To. Pak Koes tidak melawan arus, sama seperti rektor-rektor yang lain, Pak Koes tidak mau mahasiswanya demonstrasi di luar kampus. Kalau mereka tidak diantar, mungkin yang ikut ke DPRD menjadi sangat banyak. Yang terjadi pasti demonstrasi. Sebenarnya Pak Koes hanya memperlakukan sama terhadap semua orang. Beliau tidak membedakan apakah itu sopir bis kota, pedagang kaki lima, mahasiswa, dosen, pejabat, atau anggota DPR. Beliau mau menerima tamunya selama lampu di rumahnya masih menyala. Beliau hormati mahasiswanya yang memiliki pikiran bagus, misalnya dengan mengantarkan ke DPRD atau menjadikannya pembicaraan dalam seminar. Pak Koes juga memandang mahasiswanya sebagai intelektual muda. Karena kita terlalu sering mendengar rektor dan dosen yang suka menekan dan memandang rendah mahasiswanya, maka tindakan Pak Koes ini jadi istimewa.

Pak Koes mendengarkan keluhan-keluhan pedagang kaki lima, sopir bis kota, mahasiswa, dosen, dan karyawan universitas, kemudian mencari jalan keluarnya. Tindakan yang hanya mendengarkan dan mencari jalan keluar ini, menjadi hebat di depan kita, karena kita sering melihat pejabat yang tak mau mendengarkan omongan 'orang bawah'.

Jadi, Pak Koes hanya memperlakukan sama terhadap siapapun. Oleh karena itu beliau marah kepada mahasiswa yang merasa lebih dibanding mahasiswa lain. Meski di depan Menpora, beliau marah-marah ketika ada mahasiswa *arogan* memandang rendah kegiatan olah raga dan kesenian sebagai hura-hura. Beliau juga marah-marah kepada anggota DPR yang dengan pertanyaan-pertanyaannya seolah-olah kegiatan kemahasiswaan di UGM hanya demonstrasi-demonstrasi.

Jadi apa hebatnya pak Koes ?

"Pak Koes sangat dekat dengan mahasiswa", jawabku.

"Ya, itulah yang hendak saya katakan", lanjutnya. Pak Koes tidak hanya dekat dengan mahasiswa, tetapi juga dengan penjual es, penjual bakso, dosen, karyawan, dan sebagainya. Itu semua karena Pak Koes mau bergaul dengan siapa saja, mau mendengar omongan siapa saja, mau mengasihi siapa saja, mau menerima kritik siapa

saja, tetapi juga memarahi siapa saja yang salah. Kita merindukan pimpinan seperti Pak Koes karena kebanyakan dari kita **tidak bisa seperti beliau**. Kebanyakan dari kita terlalu memilih-milih dalam bergaul, kita tidak tahan dikritik, tidak mau mendengar orang lain, kita penakut, tidak berani terus terang.

Pak Koes menjadi terasa dekat dengan kita seperti teman kita sendiri yang mau mendengar omongan kita, mau kita tanyai, mau kita kritik. Jadi, Pak Koes adalah pimpinan yang sekaligus teman dan sahabat kita. Dan siapapun yang berpisah dengan teman atau sahabatnya, sudah pasti sangat menegangkan. Inilah yang sedang terjadi pada kita.****

Andaikata yang berkata seperti itu aktifis mahasiswa, atau aktifis kelompok studi, mungkin saya tak sampai heran. Tetapi yang bicara itu hanyalah seorang kang To yang hanya lulusan Tsanawiyah dan sebentar di pesantren. Maka yang terjadi bukan cuma keheranan, tetapi saya sudah terlongo-longo dan terpesona sekian lama.

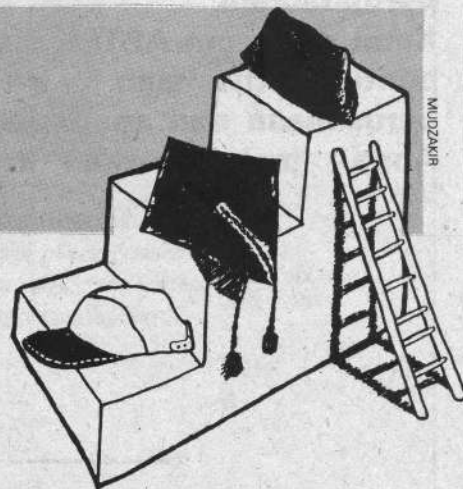
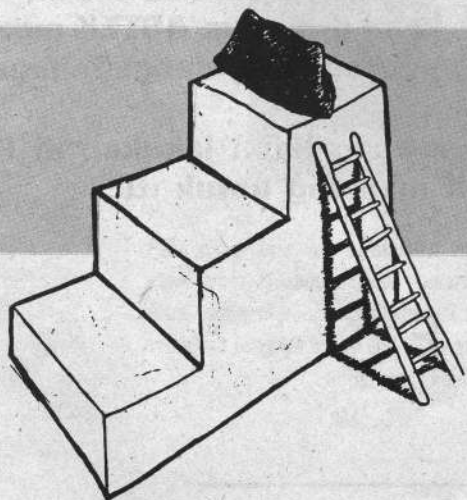
Keterlongo-longoan saya itu terulang kembali ketika kang To diminta ceramah dalam acara halal bihalal oleh ketua RT. Kang To tak cuma bicara soal-soal agama, tetapi juga masalah-masalah pertanian, peternakan, dan usaha meubel dengan sangat fasih dan kontekstual.

Kang To, ternyata telah mampu mengkomunikasikan persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan keilmuan, dan mengkaitkannya dengan moral (agama). Bagi saya, kang To telah berkembang menjadi seorang intelektual, meskipun hanya tamatan Tsanawiyah. Sementara itu, saya jadi ragu ragu, benarkah bahwa saya dengan status kemahasiswaan saya adalah intelektual muda ? Dan Ir. Bambang yang sudah dua tahun pekerjaannya hanya mencari kerja dan hanya berfikir bagaimana secepatnya mendapatkan uang. Apakah seorang intelektual atau hanya sekadar mantan intelektual ?

Kita perlu hati-hati dalam memahami kata-kata pak Koes; bahwa mahasiswa adalah intelektual muda. Saya yakin pak Koes tidak mengatakan untuk semua mahasiswa. Sebab tidak sedikit teman kita yang mabuk dengan ucapan itu sehingga marah-marah kepada adik-adiknya yang tidak ingin masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi bukanlah satu-satunya jaminan atas keberhasilan seseorang, bahkan banyak di antara kita yang perlu malu dengan kang To. Dan kang To pasti tak sendirian, di kampung-kampung yang lain, muncul pula kang To-kang To yang lain.

Ah, kang To !

Agung Suprihanto





ASTEK

MELINDUNGI TENAGA KERJA

Perusahaan wajib melindungi Tenaga Kerja dengan jaminan sosial yang memadai. Satu kewajiban berdasarkan perundangan.

Kami di Perum ASTEK siap siap membantu perusahaan —apapun bentuk perusahaan dan apapun bidang usaha Anda— melaksanakan kewajiban itu.

Karena Perum ASTEK adalah penyelenggara khusus dan resmi **ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA**. Dan tugas pokok kami di Perum ASTEK membantu perusahaan melindungi Tenaga Kerjanya.

Apapun yang kami lakukan di Perum ASTEK memang untuk itu.



ASTEK

Menjadikan kerja lebih mantap

MENJAMIN RISIKO
KECELAKAAN KERJA ■ CACAD ■ SAKIT ■ HARI TUA ■ MENINGGAL DUNIA

TATA HIJAU KAMPUS BIRU



Bila siang tiba, di Boulevard ini menjadi amat terik. Pohon-pohon cemara yang semula sebagai perindang dipangkas. Bahkan sebagian sengaja ditebang. Ada yang meng-

kait-kaitkan dengan pergantian rektor. Tapi konon, penanaman pohon cemara itu hanya sementara. Lalu, bagaimana sebenarnya UGM menata lingkungan hijaunya?



BOULEVARD : Penanaman cemara hanya sementara.

Tidak ada hubungannya dengan apa-apa, juga bukan karena pergantian rektor!". Demikian komentar dari hampir semua suber yang dihubungi BALAIRUNG sehubungan dengan penebangan dan pemangkasan pohon-pohon cemara di sepanjang pintu gerbang utama kampus UGM itu.

Diceritakan, bermula dari robohnya sebatang pohon cemara yang menimpa atap kantor Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK). Menyusul penebangan beberapa pohon cemara lainnya. Alasan utama tindakan tersebut adalah semata-mata karena usianya yang sudah tua. Sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak lagi yang tumbang. Sementara terhadap beberapa pohon yang dianggap tidak mengkhawatirkan hanya dilakukan pemangkasan. Seperti dijelaskan oleh **Dr. Ir. Oemi Hanin Suseno**, Koordinator Tim Penghijauan Kampus (TPK) Universitas Gadjah Mada, penanaman pohon cemara itu sebenarnya hanya untuk sementara. *Kok bisa begitu?* Ide awalnya, sebenarnya di sepanjang *Boulevard* tersebut akan ditanami pohon Damar (*Agathis Lorathyfolia*). Ceritanya sejak tahun 1963 pembenahan masalah pertanaman dan lingkungan hijau di kampus UGM sudah dimulai. Adapun kebijaksanaan pengaturannya diserahkan kepada Fakultas Pertanian. **Ir. Soetjipto**, dari Fakultas Pertanian yang juga Wakil koordinator I TPK mengatakan, bahwa pohon Damar yang dikenal megah dan anggun itu belum bisa ditanam pada masa itu. Dikarenakan berbagai keterbatasan, utamanya masalah pengadaan bibit dan pendanaan. Sebagai gantinya ditanamlah pohon cemara yang meskipun sama-sama mempunyai tajuk berbentuk kerucut

namun tidak dapat menggantikan makna filosofis dari pohon Damar. Damar yang berarti pelita atau lampu dimaksudkan agar UGM dapat menjadi penerang bagi seluruh masyarakat di negeri ini.

Sekarang ini, bila kita ingin melihat pohon Damar yang megah itu, coba lihat di depan kantor PIKSI UGM. Dan itulah satu-satunya pohon Damar yang sudah tumbuh tinggi di lingkungan Kampus. Sedangkan yang masih sekitar satu meter tingginya bisa ditemukan di antara pohon-pohon cemara yang sudah menjulang tinggi di sepanjang Boulevard.

Pengelolaan lingkungan hijau di Kampus Biru ini tidak lepas dari peran Tim Penghijauan Kampus. Tim ini dibentuk pa-

da tanggal 5 Juni 1988 dengan Surat Keputusan Rektor nomor UGM/43/3654/UM/01/37. Ide pembentukan TPK ini didukung oleh surat edaran bersama Mendikbud dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 1988 tentang Gerakan Perindangan Sekolah.

Harry Supriyono, SH, Sekretaris TPK, menjelaskan: TPK adalah lembaga non struktural yang dimaksudkan untuk membantu Rektor dalam bentuk sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah penghijauan di lingkungan kampus. Pedoman kerjanya jelas, yaitu menunjang pelaksanaan *Rencana landscape* Kampus UGM dan *Master plan*. Rencana Landscape itu sendiri, yang merupakan bagian dari Master Plan UGM, telah disusun pada tahun 1971. Waktu yang direncanakan untuk pelaksanaannya sekitar 10 tahun. Dalam rentang waktu yang sekian ini diharapkan pembangunan fisik kampus yang disesuaikan dengan Master Plan telah tercapai. Namun ada beberapa hal yang rupanya menjadi kendala dalam melaksanakan rencana tersebut. Utamanya dalam hal pendanaan. Selain itu, untuk selalu menselaraskan jenis tanaman yang seharusnya ditanam, sesuai dengan Rencana Landscape, tidak selamanya mudah. Seperti ketika penanaman pohon Damar harus diganti dengan pohon cemara, meski hanya sementara. Persoalan-persoalan semacam ini betapapun akan mengurangi kelancaran tercapainya Rencana Landscape yang telah disusun tersebut.

TPK dalam melaksanakan tugasnya agaknya memang harus selalu mengacu pada Rencana Landscape yang otomatis juga sesuai dengan Master Plan yang telah ada.



AGATYS : Satu-satunya yang tumbuh, anggun dan megah.

Untuk itu pulalah Tim yang beranggotakan 23 orang ini mengikutsertakan Ir. Soewandi Indanoe, Msc, Ketua Master Plan UGM sebagai salah satu anggotanya. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan Penghijauan dengan Master Plan. Dicontohkan oleh Pak Harry, ketika di kawasan Fakultas Kedokteran akan ditanami tanaman keras, setelah dikonfirmasi ke pihak Master Plan, ternyata daerah tersebut direncanakan akan dibangun gedung kuliah. Akhirnya di kawasan itu hanya ditanami tanaman perindang yang cepat tumbuh.

Adalah persoalan yang sering dihadapi di banyak lembaga, meskipun klasik, yaitu masalah pendanaan. "Hampir tidak sepenuhnya dana yang disediakan untuk Tim ini pihak Universitas," jelas Bu Oemi. Memang secara teoritis Tim ini hanya sebatas menyusun program, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Bagian Rumah Tangga Universitas. Namun kenyataannya, tidak jarang TPK harus terlibat banyak, mulai dari pengadaan bibit, perawatan sampai pada pendidikan terhadap para petugas. Keadaan semacam ini memang tidak bisa dielakkan. Sebab ini pula rupanya Tim merencanakan untuk membuat kebun persemaian tanaman, yang disamping untuk mencukupi kebutuhan sendiri juga dapat dijual kepada umum. Hasilnya dapat digunakan untuk keperluan Tim. Tetapi belakangan diketahui bahwa menurut peraturan Tim tidak diperkenankan memegang dana. Dan menurut peraturan yang sama Tim hanya berfungsi konsultatif.

Yang terakhir disebut memang sampai saat ini banyak dimanfaatkan oleh fakultas-fakultas maupun lembaga-lembaga di lingkungan UGM dalam mengelola taman maupun penghijauan di halaman gedung mereka. Sedangkan rencana lahan persemaian dan pembibitan tetap akan dilaksanakan. Tetapi memang tidak untuk dijual kepada umum. Bibit-bibitnya akan diambilkan dari kebun Biologi, hutan Wanagama serta kebun lain milik UGM. Sehingga nantinya untuk keperluan penghijauan di lingkungan kampus, termasuk di fakultas-fakultas tanamannya dapat diambilkan dari kebun tersebut tanpa dipungut biaya.

Sampai saat ini pengadaan bibit, yang sebagian besar didapat dari bantuan, terus dilakukan oleh Tim. Bantuan yang pernah diterima antara lain dari Yayasan Pecinta Lingkungan Hijau, milik **Pak Kardono**, yang menyumbang 35 jenis pohon berjumlah lebih dari 2000 batang. Perum Perhutani Jawa Tengah menyediakan bibit Agathis. Dari perorangan ternyata ada juga. **Ir. Mo-**



CEMARA : Tua usianya, rubuhkan saja.

mo Ratmawijaya, anggota Kagama Surabaya menyumbang tanaman Palm Raja. Ada lagi, sumbangan pupuk yang didapat dari Pabrik Gula Madukismo Bantul.

Meski masalah pengadaan bibit sebagian telah dapat diatasi, bukan berarti program penghijauan kampus telah dapat dikatakan 'lancar-lancar saja'. Banyak pihak, terutama anggota TPK sendiri merasa kecewa dengan sistem pelaksanaannya. Seperti yang terjadi pada penanaman Agathis. Meski bibitnya disediakan dalam jumlah yang cukup tetapi karena teknis penanaman dan

perawatannya tidak tepat, akibatnya tidak sedikit tanaman Agathis yang mulai tumbuh, mati terinjak atau kekeringan. Baik Ir. Sutjipto maupun Dr. Oemi Hani'in sepakat bahwa beberapa tanaman tertentu memang memerlukan perlakuan khusus, terlebih pada saat *aklimatisasi* (penyesuaian terhadap suhu dan kelembaban). Jadi tidak asal tanam, tetapi harus disiram teratur bahkan juga diberi *srumbung* (pagar melingkar).

Pelaksanaan penghijauan kampus yang semata-mata hanya diserahkan kepada Bagian Rumah Tangga memang kurang mema-

dai. Dari segi personelnnya pun jelas sangat kurang. Meski Universitas telah memiliki 'Pasukan Kuning' dan 'Pasukan Biru', namun jika dibandingkan dengan luas areal kampus, jumlahnya menjadi tidak seimbang. Sementara tenaga kerja yang memiliki keahlian memadai dalam teknis penanaman juga sangat minim. Sehingga sangatlah beralasan apabila TPK memandang perlu untuk mengadakan Diklat bagi petugas pertanaman dan kebersihan kampus. Materi pendidikan dan latihan ini mencakup aspek penanaman, perawatan, teknik pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan pertanian, bahkan sampai pengamanan dan teknik budidaya tanaman.

Setelah Diklat tersebut berhasil dilaksanakan, diharapkan tidak akan ada lagi keluhan tentang tanaman yang rusak atau soal tidak terawatnya taman. Taman yang demikian biasanya karena pengerjaannya dengan sistem proyek. Karena sistem ini, menurut Harry Supriyono, sangat tidak tepat. Sebab umumnya hanya mengejar target cepat selesai. Kualitas taman pun jadi tidak terjamin. Apalagi bila tenaga perawatannya tidak ada. Lengkapnya sudah ketidakterawatan tanaman dan taman itu.

Tidak jauh bedanya, taman yang dikelola oleh masing-masing fakultas dan yang langsung dibawah koordinasi Universitas. Seperti di kawasan Lembah, para mahasiswa yang akan berangkat KKN menanam beberapa bibit yang mereka bawa dari rumah. Namun setelah itu perawatannya pun sangat memprihatinkan. Akibat yang sama akhirnya menimpa tanaman-tanaman itu. Tetapi bila kita perhatikan di belahan Timur kampus, di atas telaga buatan yang biasa digunakan para mahasiswa untuk bercengkerama, telah tumbuh deretan pohon Gayam. Pohon ini salah satu jenis tanaman yang diprogramkan oleh TPK sebagai tanaman pembatas (*border*). Tidak hanya itu, di lapangan Pancasila kini muncul tanaman Palm Raja menghiasi tempat aktifitas olah raga tersebut. Tetapi sejauh mana perawatan dan



FAK PSIKOLOGI : Juara tiga kali.

pengawasannya? Apalagi tanaman-tanaman itu bukan sekedar penghijauan saja, melainkan juga dimaksudkan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan serta pengendalian iklim setempat. "Dalam fungsi pengawasan inilah mahasiswa dilibatkan bersama-sama dengan Satpam", tutur **Muttaqin**, Pramuka Gudap 01.06 UGM. Secara eksplisit kelompok mahasiswa yang dilibatkan dalam TPK adalah Mapagama Menwa dan Pramuka sendiri. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa lain untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan hijau di Kampus Biru ini. Bahkan diharapkan seluruh civitas akademika memiliki rasa *handarbeni* (rasa memiliki) kampus. Kalaupun tidak merawat paling tidak jangan merusak, tambah **Muttaqin**.

Dijelaskan pula, pihaknya mendapat bagian pengawasan di kawasan lembah dan kampus bagian Timur. Sedangkan Menwa bertugas mengawasi daerah Boulevard terus ke Utara sampai Gedung pusat. Sebelah Barat jalan Kaliurang dipercayakan pengawasannya kepada Mapagama.

Sejauh ini tampaknya TPK tidak tinggal diam dalam memasyarakatkan rasa *handarbeni* kepada seluruh sivitas akademika. Terbukti dengan diselenggarakannya lomba kebersihan dan keindahan antar fakultas serta lembaga-lembaga lain yang ada di UGM. Penilaian lomba yang diberi nama *Lomba Sriwatsih* ini dilakukan pada Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Kemudian hasil lomba diumumkan saat Dies Natalis UGM.

Siapa juaranya? Sejak tiga tahun terakhir ini ternyata Fakultas Psikologi tak terkalahkan. Ada yang berkomentar, "Tentu saja, dekannya 'kan wanita," Barangkali yang dimaksud adalah bahwa wanita dianggap lebih peka keindahan dan kerapian. Tetapi siapa bilang, Fakultas Hukum juga mempunyai dekan wanita. Bahkan Fakultas Kedokteran Gigi sebagian besar mahasiswanya adalah kaum yang dianggap lebih peka keindahan ini. Kenapa bukan mereka pemenangnya? Ah, rasanya akan berkepanjangan kalau dikaitkan dengan soal yang satu itu. Tetapi siapa tahu, tahun ini mereka menggeser kedudukan Fakultas Psikologi sebagai juara lomba "Sriwatsih".

"Sriwatsih" adalah sekedar bagian dari upaya meningkatkan rasa memiliki kampus Biru tercinta ini. Yang lebih penting adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri setiap anggota sivitas akademika. Tidak hanya anggota Tim Penghijauan Kampus, tetapi juga seluruh dosen, mahasiswa, bahkan karyawan. Agar tata hijau di kampus Biru tetap merupakan hijaunya tanaman-tanaman yang cantik dan indah, bukan hijau ilalang yang tumbuh karena tak pernah dirawat.



HIJAU BULAKSUMUR : Tak lepas dari peran Tim Penghijauan Kampus.

MENGENAL DEPRESI

Depresi dapat dikatakan sebagai gangguan kejiwaan yang universal, karena angka prevalensi/insidensi-nya cukup tinggi. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, kasus depresi juga cenderung meningkat. Diperkirakan setiap tahun paling sedikit seratus juta manusia di dunia mengalami depresi yang secara klinis cukup berarti sehingga memerlukan terapi psikiatrik. Bahkan sindroma depresi merupakan penyakit mental emosional yang paling banyak ditemukan dibanding gangguan jiwa lainnya. Prayitno (1984) dalam disertasinya mengenai percobaan bunuh diri (PDB) menyatakan 75,08% kasus PDB di Jakarta karena depresi. Di Amerika Serikat bunuh diri karena depresi merupakan penyebab kematian nomer lima pada remaja berusia 15-19 tahun. Dan dari penelitian **Dr. Prawiroharjo** (1989) diketahui prevalensi depresi pada remaja pelajar di Kotamadya Yogyakarta mencapai 38,7%.

Meski insidensi depresi dalam masyarakat cukup tinggi, namun hanya sekitar seperempat dari penderita depresi yang datang ke psikiater dan mendapat terapi. Padahal sindroma depresi ini tidak dapat dianggap remeh mengingat dampak lanjutnya yang sangat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itu pengenalan secara dini tentang depresi sangat perlu bagi penderita, orang-orang di sekitarnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pengertian depresi menurut Prawiroharjo adalah suatu penyakit jiwa dengan gejala utama sedih, yang dapat disertai oleh gejala-gejala psikologis lainnya, gangguan somatik (fisik) dan gangguan psikomotor dalam kurun waktu tertentu dan digolongkan dalam penyakit jiwa afektif. Tentu saja berbeda antara reaksi kesedihan biasa

yang normal dengan gejala sedih pada depresi; seperti intensitas kesedihannya, lama kesedihannya, faktor penyebab, dan sebagainya.

Gejala-gejalautama pada depresi adalah: *insomnia* (gangguan tidur), *anxietes* (kecemasan) dan gangguan *mood* atau emosi yang merendah. Setiap penderita depresi biasanya mengalami ketiga gejala tersebut, meskipun intensitasnya berbeda-beda. Pada



BUNUH DIRI: Manifestasi gangguan mood

depresi terselubung (*Mask Depression*) gejala-gejala khas tersebut sering tidak terungkap. Tapi yang disampaikan adalah keluhan-keluhan fisik seperti: sakit kepala, mual, mudah pingsan, perut nyeri dan sebagainya. Keadaan ini sering mengecoh dokter yang memeriksa sehingga terhadap penderita hanya diberikan obat yang bersifat *simptomatis* (menghilangkan gejala).

Akibatnya pen-

derita tersebut tetap mengalami depresi dan tidak pernah benar-benar sembuh dari penyakitnya.

Gangguan tidur dikeluhkan oleh hampir 80% dari penderita depresi. Gangguan tersebut dapat berupa sulit tidur, mudah terbangun ketika sedang tidur (Jawa: *nglilir*) dan tidur dengan banyak mimpi.

Pada depresi tahap awal mimpinya bersifat agresif, seperti berkelahi, dikejar-kejar dan sebagainya. Pada tahap lanjut mimpinya bersifat *impersonal* seperti bertemu orang yang sudah mati, menyendiri dan sebagainya.

Keluhan lain yang juga sering disampaikan penderita depresi adalah kecemasan. Dalam depresi, kecemasan ini ditunjukkan oleh beberapa manifestasi seperti: takut

tanpa penyebab yang jelas, perasaan selalu tegang, serta gangguan somatis (sistem organ tubuh). Keluhan somatis ini antara lain *palpitasi* (berdebar-debar), sesak napas, keluhan pada sistem pencernaan (mual, kembung, dsb). Pada seksual laki-laki biasanya terjadi *ejakulasi dini*, sedang pada wanita bisa terjadi *frigiditas* maupun gangguan haid. Keluhan pada sistem syaraf otonom dapat berupa sakit kepala, penglihatan kabur, berkeringat dingin, dsb.

Gangguan mood biasanya baru nampak jelas bila pasien sudah menderita depresi yang cukup lama atau berat. Manifestasi gangguan

mood ini antara lain: *disforia* atau kehilangan afeksi, gairah kerja turun, konsentrasi rendah, gejala bunuh diri, gejala *agitasi* dan *retardasi*. Pada penderita pasif, malas dan suka murung. Sebaliknya, pada agitasi penderita bersifat *irritable*: mudah tersinggung, emosional, suka marah, dan agresif. Pada bentuk yang lebih ringan misalnya gelisah, menggerak-gerakkan tangan, menggigit-gigit kuku, mencabut rambut, dsb.

Atas dasar gejala-gejala yang telah diuraikan tersebut, depresi diklasifikasikan menjadi: *Depresi Endogen dan Depresi Neurotik*. Depresi Endogen mempunyai gejala psikologik dan somatik, tidak ada *presipitasi* yang jelas, banyak dijumpai pada penderita depresi rawat inap. Depresi neurotik atau reaktif umumnya hanya mempunyai gejala psikologik dan faktor *presipitasinya* (dalam bentuk stress psikososial) jelas. Depresi jenis ini lebih banyak terjaring pada penelitian di masyarakat.

Dari sisi lain **Weiner** (1975) menjelaskan bahwa manifestasi depresi juga bisa berbeda atas dasar perbedaan umur. Depresi pada remaja manifestasi gejalanya sering tidak menyerupai gejala depresi yang lazim (sedih, retardasi, merasa berdosa dan pesimistik), namun termanifestasi dalam bentuk tindakan maladaptif (berontak, penyalahgunaan obat, identifikasi negatif untuk menarik perhatian, petualang sex dsb), sehingga sering tidak terdiagnosis sebagai kasus depresi.

Depresi sebagai gangguan jiwa dengan angka prevalensi/insidensi yang cukup tinggi, menjadikannya sebagai masalah yang universal. Ia tidak membedakan jenis sex, status sosial, ekonomi dan pendidikan, status marital, agama dan kepercayaan. Beberapa hal sering dikaitkan dengan kecenderungan meningkatnya insidensi depresi dalam masyarakat modern dewasa ini al:

- Perubahan sosial dan lingkungan fisik yang sering dihubungkan dengan stress psikososial (misal: gaya hidup modern).
- Meningkatnya harapan hidup di banyak negara, sehingga secara proporsional akan meningkatkan pula jumlah penderita depresi.

- Meningkatnya angka kesakitan penyakit-penyakit: kardiovaskuler, usia lanjut (termasuk kanker), kecelakaan lalu lintas, penyakit sistem syaraf dan otak, di mana 20% dari penyakit-penyakit tersebut mempunyai asosiasi dengan timbulnya depresi.
- Meningkatnya penggunaan obat-obatan dan alkohol. Terutama obat-obat: *sedative*/obat tidur, obat penenang, obat *hipotensif* (untuk *hipertensi*) dan *preparat hormon*).

Dr. Yul Iskandar dalam bukunya *Depresi dan Anxietas* menerangkan secara lebih rinci tentang '9 penyebab utama depresi', yaitu:

Kekecewaan,

Merasa terperangkap dan sulit keluar dari situasi yang tidak diinginkannya.

Penolakan, lebih-lebih penolakan yang dirasa bersifat tidak adil.

Pasca kuasa, biasa terjadi pada orang-orang tua yang mulai kehilangan pengaruh dan kekuasaannya.

Tujuan yang terlalu mudah untuk dicapai.

Sering tidak disadari bahwa proses untuk mencapai tujuan lebih menggairahkan ketimbang tujuan itu sendiri. Sehingga pada orang-orang tertentu jika tujuannya telah tercapai tidak tahu lagi apa yang akan dikerjakannya.

Kurang percaya diri, salah satu manifestasi sifat ini adalah ia tidak bisa percaya pada orang lain.

Perbandingan yang pincang, timbul karena rasa tidak puas. Sehingga membandingkan dirinya dengan orang lain tanpa memperhitungkan dan memperhatikan berbagai faktor.

Penyakit dan obat. Pada penyakit organik yang kronik (menahun) maka keluarga pa-

sien juga bisa mengalami depresi (seorang suami yang menderita *stroke* dan lumpuh bisa menyebabkan istrinya depresi)

Kehamilan dan persalinan (kehamilan yang tidak dikehendaki, melahirkan pada usia yang sangat muda atau terlalu tua, perbedaan antara harapan dan kenyataan dari anak yang dilahirkan dsb).

Meski depresi merupakan gangguan jiwa dengan berbagai faktor penyebab dan gejala yang cukup kompleks bukan berarti ia tidak bisa disembuhkan. Obat *anti depressan* telah ditemukan lebih dari 30 tahun yang lalu oleh **Kuhn**. Pemberian obat-obat yang bersifat psikofarmaka ini telah sangat membantu berbagai metode terapi yang diberikan, psikiater, seperti: psikoterapi, terapi keluarga, terapi drama dan seni, dll. Obat-obat psikofarmaka telah dapat mengatasi pada 70 % kasus. Dan pada 70 % kasus dengan hanya pemberian obat-obat psikofarmaka telah dapat mengatasi gangguan depresi. Tentu saja kombinasi antara psikofarmaka dengan psikoterapi serta kerjasama yang baik dengan keluarga dan lingkungannya, akan jauh lebih baik dalam upaya penyembuhannya.

Barangkali satu hal yang perlu disadari, bahwa depresi bukan penyakit yang bisa diabaikan begitu saja, karena pada keadaan yang berat bisa berakibat fatal. Oleh karena depresi dapat disembuhkan maka tidak seharusnya penderita diisolasi dan menjadikan penyakit depresinya sebagai bagian dari sisa kehidupannya. Kenali gejala depresi secara dini dan jangan segan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Nah, adakah anda depresi?

Islami Rusdianawati

Segenap Pengurus Badan Penerbit Pers Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada BALAIRUNG
Mengucapkan Selamat atas Perkawinan

LUSI MARGIANI

(Mantan Anggota Dewan Redaksi BALAIRUNG)

dengan

HENU PUTRANTO

Selamat Menempuh Hidup Baru
Semoga Selalu Mendapat Lindungan Allah Swt

"Kamu sama orang tua paminnya ke mana?"

"Teraweh..."

"Betul kamu teraweh? Kok nggak bawa perlengkapan sholat?"

"Betul! Saya teraweh.... Habis itu jalan-jalan,"

"Kok sampai begitu malam?"

Susi, sebut saja begitu, terdiam. Keheningan menguasai ruang jaga Satpam, yang juga berfungsi sebagai markas Unit Pemadam Kebakaran UGM.

Malam itu, pada bulan Ramadhan lalu, ia dididik Satpam bersama pacarnya di lembah UGM. Dua sejoli usia SLTA tersebut akhirnya diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan mereka di lembah. Apa yang telah mereka lakukan di sana

Bisa ditebak sendiri. Yang jelas, lembah UGM telah dikenal sebagai tempat memadu kasih. Kawasan yang terletak di sebelah Timur kampus UGM ini sebenarnya dibangun untuk kegiatan olah raga dan rekreasi bagi mahasiswa UGM sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi umum untuk memanfaatkannya. Tiga buah lapangan basket, delapan buah lapangan tenis, dua buah lapangan voli telah selesai dibangun. Berikut sebuah danau buatan yang terletak di tengah kawasan tersebut, menambah nyaman suasana, bagi mereka yang ingin berdiskusi ringan atau sekedar jalan-jalan sore.

Tetapi ketika siang menjadi malam, kawasan ini menjadi tempat yang romantis: suasana yang temaram, karena tanpa penerangan yang cukup, didung oleh riaknya air danau ditimpa sinar bulan. Maka berdatanganlah pasangan-pasangan manusia, sibuk dengan acara mereka sendiri-sendiri. Ketika itulah para aparat keamanan juga dibuat sibuk: mengamankan mereka karena tindak asusila. Buku Laporan Kejadian Sat-

55 PASANG DI LEMBAH UGM

Jangan kaget kalau suatu saat kampus menjadi tempat maksiat.

pam UGM mencatat: sepasang remaja belia sebuah SLTA di Sleman kedatangan berdua-duaan di tempat gelap di atas jam 21.00 WIB; sepasang mahasiswa sekolah musik memilih lembah karena kawasan itu cocok untuk tempat 'begituan' karena keadaannya yang sepi; bahkan seorang pelajar kelas satu SMA membawa WTS ke lembah.

Dari buku Laporan Kejadian Satpam dan Menwa UGM, terungkap dalam bulan Maret-April 1990 ada 55 pasang yang

untuk ditangkap, memang tidak ada. Tetapi pihak keamanan, Satpam dan Menwa, tampaknya ada kesepakatan, bahwa apabila masih ada yang berkeliaran di lembah melewati jam malam, yaitu di atas jam 21.00 WIB, apalagi berlainan jenis, maka akan ditindak. Wakil komandan Resimen Mahasiswa, **Winarjanto**, menganggap sudah menjadi tugas Menwa untuk bertanggung jawab atas keamanan kampus. Maka banyak juga anggota Menwa yang berpatroli



telah melakukan tindak asusila di lembah. 90% pelakunya adalah mahasiswa dan pelajar. Sebagian besar memang bukan mahasiswa UGM sendiri. "Pernah dalam satu malam tertangkap sepuluh pasangan. Ruangan ini penuh, Mas," tutur **Indarto**, salah seorang anggota Satpam. Itu terjadi pada bulan Februari. Tetapi kenapa sampai begitu banyak?

Kriteria sampai sejauh mana seseorang dianggap pantas

—atau lebih tepatnya mengintai di lembah. "Kadang kala anggota-anggota Menwa yang baru itu, 'kan masih semangat-semangatnya mengadakan patroli, *show of force*-lah. Jadi, ya benar mereka sering menangkap orang yang begitu-begituan di lembah," ujarnya sambil tersenyum.

Sejauh ini, para pelanggar tersebut dikenakan sanksi membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan me-

reka, dengan sepengetahuan pihak orang tua, sekolah atau

perguruan tinggi tempat mereka belajar. Untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap berat, misalnya sampai melakukan hubungan badan, surat pernyataan tersebut dilengkapi dengan meterai. Tetapi sanksi tersebut tidak cukup apabila tidak disertai dengan pembenahan di lembah sendiri. "Di sini yang perlu saya garis bawahi, sarannya itu! Jadi sebagai suatu *instrumental-condition* yang memungkinkan mereka berbuat menyimpang," tutur **Drs. Psi. Muhammad As'ad** mengomentari kasus lembah. Ia berpendapat, apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka akan seperti virus, akan menyebar pada yang lain. "Jangan kaget kalau suatu saat kampus menjadi tempat maksiat. Dan yang terkena getahnya....ya UGM," sambungnya. Untuk itu, Ia mengusulkan agar lembah diberi pagar dan penerangan sebagai *instrumental-prevention*.

Sebenarnya sarana penerangan di lembah ada tetapi sering rusak oleh tangan-tangan jahil. Pihak Satpam dan Menwa telah mengajukan permohonan kepada Universitas agar menambah sarana penerangan dilengkapi dengan pengaman agar tidak mudah rusak. Tetapi sampai sekian lama belum terealisasi. "Memang jauh-jauh hari kami telah merencanakan perbaikan penerangan di lembah, bahkan kalau perlu dengan pagar. Tetapi masalahnya terbentur dana. Rencananya nanti kami minta bantuan dari alumni," kata **Purek III, Ir. Haryana**.

Tampaknya, masalah lembah ini perlu segera dibenahi karena berdampak negatif bagi UGM seperti yang sering diberitakan media massa. "Itu memang mencemari UGM, tapi apa perlu mereka dibawa ke polisi?" kata Ir. Haryana kemudian.

Laporan : Prihayudi, Tanti, Hesty, Andriana

Siang itu pada saat jam kuliah penuh, seseorang masuk ke fakultas lewat pintu parkir. Penampilannya necis, lengkap pakai sepatu layaknya mahasiswa.

Setelah duduk-duduk selama sepuluh menit, orang itu menuju salah satu sepeda motor bermerek Astrea yang sedang diparkir. Setang sepeda motor dalam keadaan terkunci dapat dibuka. Lalu mesin dihidupkan. Pada saat itulah petugas parkir mencegatnya dan menanyakan pemilik motor. "Dia kelihatan gugup," tutur Legiman, yang sejak 1987 menjadi petugas parkir di Fakultas Pertanian. Kisah selanjutnya dapat ditebak: 'mahasiswa' tersebut babak belur dihajar massa dan diperiksa pihak keamanan. Darinya diperoleh barang bukti sebuah kunci kontak yang belum sempurna untuk melancarkan aksi.

Curanmor alias pencurian kendaraan bermotor akhir-akhir ini merajalela di lingkungan kampus UGM. Predikat universitas terbuka yang disandanginya sebagai universitas yang dekat dengan lingkungan masyarakatnya betul-betul nyata dalam arti fisik. Arealnya yang luas dan tidak berpagar, tidak melarang siapapun, dari daerah manapun untuk mengunjunginya, yang tentu juga mempunyai resiko menjadi sasaran empuk bagi para maling kendaraan bermotor. Dari data kepolisian sektor Depok tercatat 17 kasus curanmor selama bulan Maret-Mei 1990. Pelacakan BALAIRUNG sendiri mengungkapkan dalam satu minggu terjadi empat kasus pencurian pada bulan April, dengan rekor dalam satu hari bisa dua motor lenyap. Di Gelanggang Mahasiswa, pada bulan Februari-April telah kehilangan delapan sepeda motor sampai-sampai dibuat peringatan untuk tidak memarkir kendaraan di pintu utara Gelanggang tapi di sebelah Timur.

Dalam soal keamanan kampus, unsur yang paling ber-

MERAJALELANYA CURANMOR

Tujuh belas motor lenyap selama April-Mei. Penjagaan memang diperketat. Tapi konon ada suara-suara sumbang.

peran adalah pihak satpam UGM. **Ahmad Sudarisman**, Kepala Urusan Keamanan dan Kertibatan Kampus mengaku pihaknya merasa kewalahan.

"Hal ini terjadi karena kecerobohan pemilik dan petugas, te-

tapi yang utama adalah pemilik kendaraan yang kurang mendu-

di FE ini sudah sering terjadi pencurian dan kami sudah sering memperingatkan," ujarnya.

Tampaknya sikap mahasiswa yang ingin cepat dan memarkir kendaraan bermotor tidak pada tempatnya memperburuk keadaan. Lebih-lebih lagi keahlian penjarah sepeda motor sendiri cukup ahli. Mereka biasa-

kan sebagai senjata.

Mengenai fasilitas dan tenaga keamanan, Satpam UGM sendiri saat ini memiliki 66 personil yang dibagi dalam tiga peleton menempati tiga buah pos penjagaan yang masing-masing terletak di gedung pusat, di pool bergabung dengan unit Pemadam Kebakaran UGM, dan sebuah lagi di Bulaksumur. Untuk berpatroli mereka memiliki sebuah Kijang dan enam buah sepeda onthel. "Kalau dilihat luas areal UGM memang belum memadai, tetapi mengingat hanya ada tiga pos jadi untuk saat ini cukuplah," komentar Sudarisman lagi. Tetapi, yang perlu mendapat sorotan adalah tenaga petugas parkir di masing-masing fakultas yang rata-rata hanya mengerahkan dua orang per harinya. Ini tentu belum cukup melihat ada beberapa fakultas yang jumlah mahasiswanya relatif banyak dan jam kuliah sore yang berakhir sampai 18.00 WIB.

Usaha-usaha untuk menghambat curanmor ini bukannya tidak ada. Kepolisian sektor Depok menambah kuantitas patroli, terutama pada jam-jam kuliah dan di sore hari dengan enam personil ditambah beberapa petugas berpakaian *preman*. Tetapi masalah belum selesai karena kemudian timbul suara-suara sumbang, tiap kali mereka berpatroli. Kecurigaan mahasiswa memang cukup besar tiap kali ada unsur keamanan masuk kampus. "Kami mohon bantuannya agar patroli kami di kampus dinilai positif dan tidak mendapat tegoran atau sentilan," pinta seorang Lettu dengan keprihatinan yang dalam. Dalam menangani soal keamanan yang satu ini, pihak keamanan memang cukup repot. Tentu saja dibutuhkan saling pengertian di semua pihak.

Nur Hidayat
Laporan : Usarmen, Ismu

ISTIMEWA



PARKIR : Kecerobohan pemilik kendaraan.

kung petugas keamanan," katanya. "Bahkan kami sering mendapat jawaban yang kurang simpatik bila mengingatkan untuk memarkir kendaraan pada tempatnya." Slamet, petugas keamanan yang telah bekerja sepuluh tahun sebagai petugas keamanan di Fakultas Ekonomi membenarkan hal itu. "Mereka itu tidak kapok-kapok, padahal

nya menyalur sebagai mahasiswa. "Antara pencuri dengan mahasiswanya sama saja penampilannya, Mas," ujar Sudarisman yang berperawakan tegap dan berkumis ini. Selain itu, menurut Slamet, mereka biasanya menggunakan kunci palsu yang terbuat dari logam tajam sepanjang enam sentimeter dan dapat sekaligus diguna-

EMPAT BUTIR REKOMENDASI

Forkom mengadakan studi banding melihat konsep SMPT kesembilan perguruan tinggi. Kemudian, lahirlah rekomendasi.

Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada telah mengadakan satu aktivitas dalam rangka menyambut lahirnya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Kegiatan tersebut berupa studi banding ke sembilan Perguruan Tinggi, terdiri dari lima Perguruan Tinggi Negeri dan empat Perguruan Tinggi Swasta. Masing-masing adalah: Universitas Indonesia, Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS di Jakarta, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Parahiyangan Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro dan IKIP Semarang, serta Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Studi banding yang berlangsung dari tanggal 25-28 Maret 1990 itu diikuti oleh sembilan peserta sebagai wakil dari Presidium dan Komite Eksekutif FORKOM-UGM. Sembilan orang tersebut adalah **Reinhard Samah** sebagai koordinator dan wakil Sekber olahraga, **Sri Wandoyo** wakil BPM Fakultas Kedokteran Hewan, **Tanthowi Jauhari** wakil Jama'ah Shalahuddin, **Jujuk Setyowati** dari Unit Pramuka, **Janoe Arianto** dari SEMA Fakultas ISIPOL, **Iwan Samariansyah** wakil SEMA Fakultas Geografi, **Silvy Maria** wakil BPM Fakultas Filasafat, **Henrizal** dari BPM Fakultas Geografi dan **Natsir Noordin** dari BPM Fakultas Teknologi Pertanian.

Dari sembilan Perguruan Tinggi yang dikunjungi, pada umumnya memiliki lembaga kemahasiswaan berupa Senat Mahasiswa (SEMA) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) pada tingkat Fakultas. Kecuali di ITB, hanya ada organisasi intra tingkat jurusan, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Sedangkan untuk tingkat Universitas dikenal adanya Forum Komunikasi Mahasiswa Jurusan (FKHJ). Namun FKHJ ini hanya diakui sepihak oleh mahasiswa, secara institusional

belum diakui keberadaannya.

Pada tingkat Universitas, Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) diterapkan di USAKTI, UNPAR, UNDIP, IKIP Semarang dan UKSW. Kecuali di IKIP Semarang, penerapan konsep BKK di Perguruan Tinggi di atas tidak murni lagi, tetapi sudah mengalami penyesuaian. Misalnya di UKSW, meskipun namanya tetap BKK tapi sebenarnya yang dilaksanakan seperti konsep SMPT. Adanya Ketua BKK dari pihak mahasiswa menyeruati Sekjend pada Dewan Mahasiswa (DEMA) tempo dulu.

Seperti di UGM, UI juga

telah "setengah jadi" dibina oleh pelatih ahli. Dengan demikian tidak mengherankan bila STIE PERBANAS sering menjuarai turnamen dan banyak melahirkan atlet-atlet nasional.

Persiapan menghadapi datangnya konsep SMPT terlihat di ITB dengan terbentuknya Panitia Persiapan Lembaga Sentral Mahasiswa (PPLSM). Sementara UI masih mengadakan pendekatan-pendekatan untuk membentuk persamaan persepsi di antara mahasiswa. Sedangkan IPB sudah menerapkan konsep SMPT, bahkan dijadikan contoh. Selama itu IPB juga menerapkan adanya Lem-



FORKOM DAN PETINGGI UNIVERSITAS : Menyambut SMPT.

memiliki Forum Komunikasi pada tingkat Universitas. Sedangkan STIE PERBANAS hanya mengenal Unit Kegiatan dalam bidang olahraga. Memang Perguruan Tinggi ini mempunyai penekanan khusus untuk bidang olahraga. Hal ini terlihat pada kegiatan setiap hari Sabtu segenap Civitas Akademika berkumpul di Gelanggang Mahasiswa untuk melakukan olahraga bersama. Sistem rekrutmen terhadap minat-bakat lebih khusus; mahasiswa yang

baga Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

Berdasarkan pandangan dan pembicaraan delegasi FORKOM-UGM dengan sembilan Perguruan Tinggi yang dikunjungi, para peserta studi banding FORKOM-UGM telah membuat sebuah rekomendasi yang terdiri dari empat butir. Pertama, dalam rangka menyambut kedatangan SMPT dibutuhkan langkah-langkah positif untuk menciptakan suasana yang mendukung adanya peran

serta mahasiswa yang kritis, kreatif dan konstruktif sebagai pra-kondisi kearah otonomi pengelolaan lembaga kemahasiswaan yang nyata dan dinamis serta bertanggung-jawab; baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian.

Kedua, bahwa lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas mengandung muatan normatif dan representatif. Selain itu hendaknya diperhatikan bahwa lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas sebaiknya juga mengandung muatan aspiratif dan evaluatif. Yakni kemampuan serta mekanisme penampungan aspirasi-aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan mahasiswa UGM; dan kemampuan untuk menilai serta mencari pemikiran-pemikiran alternatif atas setiap kejadian dan masalah yang timbul di lingkungan Universitas sebagai Wawasan Almamater.

Ketiga, sebagai upaya kontribusi Perguruan Tinggi dalam membentuk pemimpin bangsa yang dapat diandalkan, mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin di masa depan hendaknya dibekali kemampuan menangkap esensi permasalahan serta menjawabnya dalam penjabaran dan penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah untuk diimplementasikan dalam langkah-langkah konkrit berupa program kegiatan. Dengan demikian seharusnya lembaga tingkat Universitas mencakup fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi-fungsi eksekutif.

Keempat, setiap produk kebijakan yang menyangkut lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas hendaknya memperhatikan ciri khas yang ada pada masing-masing Perguruan Tinggi. Untuk itu penyesuaian-penyesuaian intern oleh masing-masing Perguruan Tinggi tidak perlu dianggap negatif. Tetapi ditumbuh kembangkan sebagai aset yang dimiliki perguruan tinggi-perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Wahyudi

Laporan: Silvy

PROYEK NIKMAT UNTUK RAKYAT

*Masalah ganti rugi tanah adalah persoalan pelik.
Kali ini masalah tersebut mengancam proyek Rahayu-Samirono.*

Jalan-jalan protokol di Yogyakarta seperti jalan Sultan Agung, Oerip Soemohardjo, Malioboro, makin hari makin riuh saja. Perebutan kapling untuk berbagai kegiatan usaha semakin menambah sumpek dan ruwet. Areal pertokoan, tempat parkir, yang bercampur dengan kegiatan pedagang kaki lima, maupun trotoar yang telah bergeser fungsinya memaparkan segalanya. Itulah sebabnya, untuk kasus yang serupa, diharapkan tidak akan terulang pada proyek pembenahan kawasan Rahayu-Samirono. Proyek yang ditengah-tengahnya ditembus jalan seukuran jalan protokol sepanjang satu kilometer yang menghubungkan jalan Oerip Soemahardjo ke jalan Kolombo itu, diharapkan dapat membuka jaring-jaring ventilasi baik untuk fungsi usaha maupun sebagai peredam keruwetan lalu lintas.

Yang patut mendapat acungan jempol dalam proyek besar ini, adalah tekad pemerintah untuk melibatkan penduduk secara aktif. Dimulai dengan penyediaan lahan proyek seluas 86 ha, yang mencakup dua kategori yaitu 16 ha sebagai kawasan inti untuk kegiatan pusat perekonomian, dan seluas 68 ha disiapkan sebagai kawasan pendukung, sampai pada pemanfaatan hasil proyek itu sendiri. "Pokoknya menggunakan model pembangunan yang bersifat *bottom-up*," tutur Drs. Sudomo Sunaryo, Ka. Biro Humas dan Protokol DIY.

Proyek yang merupakan *pilot project* pembangunan kawasan dan lingkungan secara terpadu ini, telah dikerjakan semenjak tahun 1987 dan rencananya terbatas akhir sampai tahun 1994, sengaja memilih kawasan Rahayu-Samirono atas dasar pertimbangan ekonomis, kawasan

Secara ekonomis, kawasan yang sebenarnya bernilai ekonomi tinggi ini, sampai kini masih terlantar dan belum tergarap secara optimal. Kondisi ekonomis yang demikian ini sangat kontras dengan kawasan tetangganya sebelah selatan yang merupakan pusat

Tertundanya proyek berdana dari anggaran pusat maupun APBD sebesar Rp. 4,5 milyar ini, oleh Ir. Imam dikaitkan dengan proses pembebasan tanah yang belum tuntas. Menurutnya, sistem penyesuaian dan konsolidasi (*land readjustment and con-*



RAHAYU-SAMIRONO : Tertutup bagi wartawan.

pertokoan. Yang menjadi pertimbangan lain adalah faktor ekologis yang sangat terkait dengan kondisi perumahan yang semrawut, kondisi jalan yang amburadul dan sanitasi yang tidak memadai.

Menurut pimpinan proyek, Ir. Imam Hadi Santoso, tahap perencanaan dan *feasibility-studi* sudah rampung. Tahap berikutnya adalah tahap penataan ruang dan pemukiman, seperti pembangunan jalan tembus Rahayu-Samirono, pembangunan fasilitas sosial umum seperti perkantoran dan penyediaan kantong-kantong penampungan pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan Oerip Soemohardjo yang lebih populer dengan nama jalan Solo.

solidation) adalah jurus ampuh untuk membujuk dan melibatkan masyarakat dalam proyek ini. Pelaksanaan konsepnya, setiap pemilik lahan yang terkena proyek wajib memberikan tanahnya antara 10-30 %. Teknisnya, misal, satu deret rumah harus menyerahkan sepuluh persen, maka otomatis rumah dibelakang dan seterusnya juga harus kena kewajiban iuran tanah sepuluh persen, sehingga semua tanah dan rumah yang berada satu deret akan mundur.

Mengapa proses pembebasan tanah berjalan sangat lambat? Persoalan klasik yang dihadapi pemerintah biasanya selalu berkisar pada masalah ganti rugi tanah. Beberapa instansi terkait sering memberi-

kan keterangan simpang siur. Drs. Sudomo berkilah, "Kami jelas melibatkan masyarakat, dan rasanya tidak *urgent* bagi media massa untuk mencari detailnya."

Sementara itu, pimpinan proyek Ir. Imam menyatakan telah bertindak sangat hati-hati dalam upaya mengadakan pendekatan dengan penduduk. Hal itu cukup beralasan, sebab kasus tanah saat ini sedang menjadi isu besar. Contohnya tragedi Cimacan, Kedungombo, dan Kacapiring.

Dari hasil lacakan BALAIRUNG, seorang panitia pembebasan tanah yang tidak mau disebut namanya membeberkan, "Rakyat memang benar dilibatkan, namun tampaknya harga tanah yang diganti dibawah harga umum," Berapa harga yang pasti, sumber ini menolak memberi keterangan. "Pokoknya di atas Rp. 15.000, per meter persegi. Pastinya saya lupa."

Seperti biasanya, kasus seperti ini selalu tertutup rapi. Hal ini sempat dialami BALAIRUNG ketika mencoba mengecek sistem ganti rugi kepada penduduk. Seorang ketua RT yang pur-nawirawan ABRI mencegah BALAIRUNG. "Daerah ini tertutup bagi wartawan," katanya, "Kalau anda ingin wawancara, harus ada izin dari saya dulu."

Dan pejabat ini melanjutkan, "Tapi izinnya tidak sekarang, Anda dapat datang besok setelah saya bertemu dengan tim 16. Menurut Ir. Imam, tim 16 adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Kelurahan sebagai wakil penduduk. Namun nyatanya Ir. Imam sendiri sering jengkel. "Kami tidakmerasa diwakili oleh tim 16!" katanya menirukan ucapan penduduk

Tentang informasi harga

SETAHUN UNTUK KARTU NAMA

Dia berprestasi. Dia aktivis. Sepucuk surat melayang ke Dekan, skorsing lalu dijatuhkan.

ganti rugi tanah dan bangunan, ternyata tidak pernah tetap. Sebuah harian di Yogya membeberitakan, pedoman harga tanah dan bangunan di Kodya Yogya berdasarkan SK Wali-kotamadya no. 23/KD/1988 berkisar antara Rp. 94.000,00 sampai Rp. 160.000,00 per meter persegi. Anehnya, dua minggu sebelumnya, koran itu menulis bahwa harganya antara Rp. 150.000,00 hingga Rp. 275.000,00. Seorang penduduk yang terkena proyek menuturkan, "Ini tidak adil! Masak tanah saya hanya di-hargai lima ribu rupiah,". Salah seorang tetangganya ada yang mendapat Rp. 15.000,00 dan Rp. 20.000,00.

Sebagaimana layaknya, setiap proyek harus disertai dengan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPIH) UGM terbagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap perencanaan tiga tahun. Kedua, tahap pembe-lahan, dua tahun. Dan ketiga, tahap konstruksi, dua tahun. Pada tahap kontruksi dampak yang perlu diperhatikan adalah berkurangnya rasa nyaman penduduk akibat kebisingan dari kegiatan konstruksi. Bahkan eksekusi kebisingan itu jelas merembet pula ke kampus UGM dan IKIP di bagian utaranya. Oleh karenanya, yang mendesak untuk dipikirkan adalah kelayakan penetapan pola bangunan dan fungsi sosial ekonomi kawasan yang membelah jalan Solo dengan jalan Kolombo. Misalnya sampai seberapa luas kawasan pertokoan yang diizinkan, aturan main bagi investor yang ingin berpartisipasi dan berapa lebar jalan yang direncanakan. Menurut Ir. Imam, rencana lebar jalan 21 meter. Tetapi agaknya ada gelagat akan dipersempit menjadi 16 meter. **Bani Saksono**

Laporan : Andriana, Hesty, Prihayudi

Ada tiga fakultas kedokteran di UGM. Dua untuk bidang garap manusia, Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, satu untuk hewan, Fakultas Kedokteran Hewan. Beberapa waktu lalu mahasiswa FKU sempat tawur dengan mahasiswa FKG hingga hasilnya seorang mahasiswa harus opname di rumah sakit (lihat BALAIRUNG No. 11/89). Kini digilir FKH. Bukan tawur memang, tetapi toh tetap meminta korban. Seorang mahasiswa FKH tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademis, alias *diskors* selama satu tahun. Sebabnya, dia mencantumkan gelar *Drh* di depan nama pada kartu namanya. Lho, kok bisa *konangan*?

Memang semua bermula dari kasak kusuk di seputar dosen dan mahasiswa koas. Seorang mahasiswa profesi melakukan praktek di Gunung Kidul, demikian kabar itu mulai beredar. Lalu ada yang bilang, dia bekerja sebagai salesman dengan pakai gelar *Drh*. "Tidak, tidak buka praktek, tidak juga sebagai salesman. Dia sudah menjabat sebagai kepala cabang sebuah perusahaan," kata seorang mahasiswa angkatan 87.

Demikianlah isu-isu tentang dokter palsu itu terus beredar dilingkungan FKH, hingga akhirnya mayoritas mahasiswa fakultas tersebut ramai membicarakan. Sampai akhirnya menjadi jelas ketika Rapat Senat FKH pada tanggal 18 Januari 1990 menjatuhkan sanksi akademis berupa skors satu tahun terhadap seorang Drs. Med Vet yang selama ini

diberitakan memakai gelar *Drh* itu. Adapun jajaran pengajar FKH sampai mengetahui pemalsuan itu karena Dekan telah menerima sepucuk surat pengaduan. Demikian kata sumber di FKH kepada BALAIRUNG. Setelah usut punya usut, ternyata surat pengaduan itu terbukti benar. Dan jatuhlah sanksi satu tahun itu.

Mahasiswa yang terkena sanksi — sebut saja Ahmad — tampaknya bisa menerima. Cuma, "saya ingin tahu dasar hukum dan pasal mana yang saya langgar. Apakah ini hanya Kesepakatan saja?" tanya Ahmad yang sempat shok saat



mendengar sanksi itu jatuh. Kisah malang ini bermula dari pertemuan Ahmad dengan seorang direktur operasional perusahaan makanan ternak di Bandung. Walaupun sudah dikasih tahu kalau dirinya belum lulus kuliah, sang direktur tetap mengajak Ahmad untuk bekerja di perusahaannya. Dia diminta memasarkan produk perusahaan di wilayah Jateng dan DIY. "Saya diterima bekerja tanpa titel tanpa melamar. Hanya modal kepercayaan saja," tandasnya.

Pilihan sang direktur memang tidak salah. Setelah bekerja beberapa bulan di

perusahaan makanan ternak itu, prestasi Ahmad boleh dibilang di luar dugaan. Pada bulan Agustus misalnya, dia sempat menjual produk 9 ton, lalu bulan Oktober 12 ton. Dan ketika dia mengusulkan pembentukan cabang perusahaan di Jateng dan DIY, usul itu diterima sekaligus Ahmad diangkat sebagai kepala cabang. Oleh perusahaan Ahmad dibuatkan kartu nama dengan dibubuhi titel *Drh* di depan namanya. "Jadi yang membuat kartu nama itu perusahaan bukan saya," jelasnya.

Bisa dimengerti kalau perusahaan mencantumkan titel di kartu nama Ahmad. Bisnis toh butuh bonafiditas. Sementara sepengetahuan Ahmad, selama titel tidak dipakai untuk kegiatan medis itu tidak apa-apa. Bahkan teman-temannya yang dokter hewan pun juga tidak menegur. "Saya tidak pernah menggunakannya untuk kegiatan medis," tambahnya.

Yang membuat kartu nama memang perusahaan, tetapi Ahmadlah yang memakainya. Mestinya dia tahu kalau hal itu tidak benar. Demikian kata Dekan FKH **Drh Busono** kepada BALAIRUNG. Hal seperti itu dianggapnya bisa merugikan teman-temannya serta profesi kedokteran hewan. "Janji pelantikan dokter hewan kan begitu," katanya. Buru-buru dia menambah, "istilahnya bukan skors, tetapi cuti." Oleh karena itu Ahmad dia pinjami buku-buku untuk dibaca, agar lebih pintar dari pada teman-temannya.

Peristiwa ini sangat di-

sayangkan oleh Busono, mengingat prestasi Ahmad yang pernah membawa nama baik FKH. Mahasiswa angkatan 84 ini pernah menjadi juara ketiga LKIP. Ahmad juga termasuk mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan. Berdirinya Unit PPPK konon tidak lepas dari campur tangannya. Karena prestasi-prestasi-nya itu, membuat Rapat Senat FKH alot dalam membuat keputusan. Tetapi akhirnya toh Ahmad dipatok skor satu tahun, terhitung sejak semester genap 1989/90.

"Saya kira ini keputusan yang paling ringan," tutur Busono. Dewan Senat juga tidak bisa menghalangi Ahmad untuk tetap kembali sebagai

kepala cabang perusahaan tempat dia bekerja. Mungkin masih ada harapan baginya. Seperti dikemukakan Dekan FKH kalau keputusan Rapat Senat belumlah final karena menunggu pengesahan dari rektor. "Tetapi untuk fakultas, keputusan sudah berlaku, karena ini menyangkut urusan akademik, bukan urusan administrasi," tambah mantan PR I ini.

Memang jika dibandingkan sanksi lain, misalnya pemecatan, skorsing satu tahun sangat ringan. Apalagi kalau dihadapkan pada KUHP, pemalsuan macam dilakukan Ahmad bisa dikenai penjara 2,5 tahun. Tetapi menurut Soewondo, SH, dosen Fakultas

Hukum UGM, pemakaian titel belumlah tindakan pidana sebelum berakibat perbuatan hukum. "Selama yang diajak berbisnis tidak merasa dirugikan, tidak apa-apa. Tetapi bila lawan bisnis mensyaratkan gelar sarjana, padahal dia belum sampai. Ini merupakan penipuan, dan bisa dituntut," kata Soewondo.

Memang dari segi hukum tidak apa-apa, tetapi persoalan ini menyangkut masalah etika profesi kedokteran. "Perbuatan itu bisa merugikan profesi kedokteran. Jadi kejujuran harus tetap dipegang," tandas Busono lagi.

Sebenarnya kalau kita mau jujur, kasus seperti ini banyak terjadi. Hanya saja, Ahmad

yang ketiban sial. Maklum, siapa yang tidak iri pada dia, masih mahasiswa sudah diangkat menjadi kepala cabang perusahaan. Karena keteledoran, melayanglah surat pengaduan ke meja Dekan. Siapa sangka gara-gara kartu nama, masa mahasiswa bertambah lama.

Halo BPM FKH.! Bagaimana *ulah krido*-mu menghadapi kasus ini. "Untuk sementara kami telah membentuk komisi eksekutif," kata Sri Wandowo. Ketua Umum BPM FKH. Lalu buru-buru menambahkan, "tugasnya melacak kasus yang sebenarnya," *Bener nih?*

Didik

Laporan: Isma, Nizar, Tani

*Segenap Pengurus Badan Penerbit Pers Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada BALAIRUNG
Mengucapkan Selamat kepada:*

IR AGUS AMAN SANTOSO
(Mantan Pemimpin Redaksi)

DRS AHMAD RAPANI
(Mantan Wakil Pemimpin Redaksi)

DRA LUSI MARGIANI
(Mantan Anggota Dewan Redaksi)

DRS GAFAR YUTADI
(Mantan Kepala Bagian Iklan)

*Atas Keberhasilannya Mencapai Gelar Sarjana
Semoga Sukses di Medan yang Baru*

49TH SUMPAH
PEMUDA
DEWAN MAHASISWA UGM

Undang-undang Pendidikan Nasional Tahun 1989, pasal 22 mengatur kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Berangkat dari pasal inilah pemerintah menjanjikan mahasiswa akan diberi keleluasaan "yang lebih", dalam bentuk SMPT. Sejauh mana mahasiswa percaya akan janji itu?

PERLU OTONOMI

Saat ini mahasiswa sedang menunggu hadirnya sebuah "wadah" yang akan menampung dirinya. Setelah UU nomer 2 tahun 1989, yaitu Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional disahkan pemerintah, akan diikuti oleh beberapa kebijakan lebih lanjut. Salah satunya adalah rencana pembentukan Senat Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi (SMPT). Rencana ini masih *digodok* oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita belum tahu bagaimana bentuknya nanti serta kapan akan keluar.

Ada banyak tanggapan yang muncul dari para mahasiswa, baik yang optimis, pesimis atau yang skeptis. Namun ada juga yang masa bodoh, bahkan tidak tahu sama sekali tentang rencana tersebut. Menurut **Nur Hidayat Agam**, Ketua SEMA Fakultas Teknik, SMPT belum tentu akan mengubah kondisi mahasiswa. "Untuk mengubah kondisi mahasiswa sekarang perlu waktu yang cukup lama. Kita tidak berharap banyak dengan adanya SMPT" katanya. Sedang **Dadang Yuliahtoro**, Ketua Unit Penalaran, mencurigai konsep ini sebagai usaha menyalurkan aspirasi mahasiswa lewat satu corong. "Supaya mudah memegangnya; demi stabilitas nasional", tegasnya.

Pandangan yang senada dilontarkan oleh **John Soni**, mahasiswa Fakultas Filsafat. "Saya khawatir konsep ini lahir karena pemerintah melihat terjadi aksi mahasiswa akhir-akhir ini. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah merasa perlu memunculkan isu ini." Lebih lanjut dia mengatakan, "SMPT dirasakan mendasak setelah ada aksi-aksi; jadi manakala mahasiswa berdinamika. Nah, kalau pemerintah ingin minta usulan, yang paling relevan dimintai sebuah konsep adalah mahasiswa yang aktif dan berdinamika tadi." Pernyataan ini merupakan bentuk kekhawatiran apabila konsep itu lahir dari teman-teman yang pasif, yang kurang memahami organisasi intra kampus. Atau seperti istilah **Hasto Atmoko**, konsep itu harus dari "orang lapangan". "Orang lapangan yang tahu persis medan kampus", kata Ketua Sekber Olahraga itu.

Sementara itu **Ir. Haryana, MArch** lebih melihat rencana tersebut sebagai jawaban pemerintah terhadap kekhawatiran bahwa mahasiswa cenderung menjadi manusia yang terpola pada "profesional sejati". Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud menyatukan kegiatan mahasiswa dalam satu wadah, untuk itu akan dibentuk senat ma-

hasiswa dalam lingkup Universitas. "Kalau selama ini kita mengenal Senat Mahasiswa dalam lingkup Fakultas dan kegiatan-kegiatan yang berlingkup Fakultas, diharapkan dengan adanya SMPT ini ada kesatuan kegiatan dalam satu kampus." Lebih jauh Perek III-UGM itu mengungkapkan, "Mahasiswa juga dapat menjalin hubungan kerjasama yang erat antar Fakultas, sehingga dapat meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam forum regional maupun nasional."

Adanya berbagai pendapat dan tanggapan tentang latar belakang pembentukan SMPT di atas memang wajar. Apalagi untuk menyatukan pendapat para mahasiswa tentang bentuk yang tepat, jelas lebih sulit. Kenyataan ini juga diakui oleh **Drs. H.M. Jasman**, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun, menurut Jasman, masalah kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tidak perlu tergantung pada faktor strukturalnya. Tetapi sejauh mana Perguruan Tinggi, termasuk mahasiswa mampu memfungsikan struktur yang ada secara optimal sesuai fungsi dan tugas pokoknya (lihat Lembaga Kemahasiswaan Harus Fungsional). Jasman melihat bahwa konsep NKK sebenarnya belum dilaksanakan secara optimal. Walaupun dia juga mengakui adanya faktor keadaan, baik internal maupun eksternal, yang tidak mendukung berfungsinya lembaga kemahasiswaan.

Bagi UGM sendiri sebenarnya sudah ada wadah seperti SMPT, yaitu Forum Komunikasi (FORKOM) yang dibentuk pada tahun 1987. FORKOM berfungsi untuk menjalin kerjasama antar mahasiswa dalam lingkup Universitas. Konsep FORKOM inilah yang diusulkan UGM dalam Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor III tahun 1989 sebagai pertimbangan untuk mempersiapkan bentuk SMPT.

Menurut **Ir. Haryana, MArch**, SMPT akan terdiri dari para Ketua BPM dan Ketua Senat Mahasiswa tingkat Fakultas serta unit-unit lain yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas. SMPT nantinya tidak akan masuk struktur, dosen hanya sebagai pembina. Dengan demikian, otonomi yang diharapkan kemungkinan besar benar-benar terjadi. Menyinggung masalah dana, dia mengatakan, "Proporsinya seperti Senat Mahasiswa Fakultas, yaitu 50% untuk penalaran, 35% untuk kesejahteraan dan 15% untuk pembinaan." Menanggapi masalah kegiatan mahasiswa yang "berbau politik", Perek III-UGM itu menyatakan, "UGM tidak pernah khawatir, asal tidak keluar dari konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selama ini hampir 95% proposal

mahasiswa disetujui. Tentu saja apabila ada kegiatan yang menyimpang dari konsep yang berlaku Rektor tetap berhak menindaknya, karena Rektor adalah pemegang utama kendali Universitas."

Sementara itu pada mahasiswa yang dihubungi **BALAIRUNG** menginginkan kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri. **Reinhard Samah** mengatakan bahwa SMPT yang ideal harus memberi otonomi dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan keuangan. "Omong kosong kalau bicara otonomi tanpa bicara soal keuangan. Kita harus punya kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri", tegasnya. Sedangkan **John Soni** mengharapkan SMPT benar-benar otonomi; tanpa campur tangan pihak luar, baik dari penguasa kampus, aparat keamanan ataupun pemerintah. John juga mengemukakan bahwa bentuk ideal SMPT harus memungkinkan pemotongan birokrasi dan mengubahnya menjadi debirokratisasi.

Tentang arah SMPT, Perek III dan para mahasiswa sepakat untuk tidak meninggalkan orientasi UGM yang bersifat *rural dan regional development*. Fungsi dan peran SMPT juga harus dapat mengantisipasi kondisi mahasiswa yang 50% termasuk kelas menengah kebawah. Kegiatan yang nantinya dilaksanakan hendaknya dapat menunjang kesejahteraan rakyat kecil dan pembangunan pedesaan. "Kegiatan mahasiswa jangan yang bersifat borjuis, demikian pula dengan olahraganya", tandas Nur Hidayat Agam.

Meskipun kita belum tahu persis tentang bentuk SMPT nanti, namun jelas ada kendala yang mungkin dihadapi mahasiswa. Kendala pertama dari dalam diri mahasiswa sendiri, yakni apakah mereka sudah siap untuk menerima perubahan? Apabila konsep SMPT nanti sesuai dengan harapannya, apakah mereka siap melaksanakan? Apabila tidak sesuai dengan kehendaknya, apakah sudah siap dengan langkah alternatif? Sedangkan kendala kedua berasal dari luar, yaitu adanya pihak yang mungkin ingin membelokkan arah SMPT demi kepentingannya. Atau kemungkinan SMPT tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, SMPT perlu kita sambut dengan harapan. Paling tidak dalam satu hal: SMPT dapat menjadi wahana komunikasi antar mahasiswa dari berbagai Fakultas, SMPT merupakan jembatan penting untuk mewujudkan komunitas ilmu yang "transdisipliner". Mahasiswa tidak "terkotak-kotak".

(Maria Selastiningsih, Andri, Nizan, Ustarmen, Inu, Tanti, Hesti, Wahyudi)

M. Jasman Alkindi, alumnus Fak Geografi UGM, dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Selain sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dia juga ditunjuk sebagai anggota Badan Penasehat Pendidikan Nasional (BPPN). Berikut wawancara BALAIRUNG dengannya seputar masalah pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Apa yang melatarbelakangi kebijaksanaan Pemerintah membentuk SMPT?

Sulit mengemukakan. Pemberitahuan kami terima dari Mendikbud dan pelaksanaannya menunggu Peraturan Menteri yang akan dikeluarkan setelah Peraturan Pemerintah mengenai Pendidikan Tinggi keluar terlebih dahulu. Bagi saya, masalah kemahasiswaan tidak perlu tergantung pada faktor strukturalnya. Tetapi seberapa jauh lembaga pendidikan tinggi mampu mengembangkan fungsi dan tugas pokoknya dengan struktur yang ada, termasuk kehidupan kemahasiswaan.

Apakah SMPT merupakan langkah-Pemerintah untuk mengantisipasi aksi-aksi mahasiswa yang muncul akhir-akhir ini?

Kalau mahasiswa terlibat gerakan di luar kampus, saya pikir bukan semata-mata gerakan mahasiswa. Keterlibatan mereka dengan politik tidak berdiri sendiri. Ada yang melibatkan, paling tidak terdapat aliansi dengan pihak lain di luar kampus.

SMPT dihubungkan orang dengan suksesi nanti, agar mahasiswa mudah dikendalikan bila terjadi gejolak.

Suksesi itu mekanismenya sudah jelas. Tidak ada hubungannya.

Apa yang telah dilakukan BPPN?

BPPN tidak akan bicara detail dan saya tidak berhak bicara atas nama BPPN. Bagi saya, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus selalu melekat pada sivitas akademika.

Pandangan Pak Jasman tentang SMPT nanti?

Lembaga apapun tidak masalah, yang penting dapat memfungsikan dirinya sebagai sub-sistem lembaga pendidikan tinggi secara optimal.

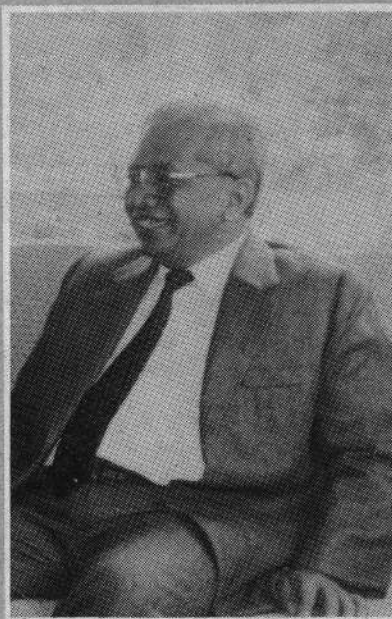
TIDAK TERSALUR ASPIRASINYA

Langkah optimalisasi itu sendiri?

Sesungguhnya kalau komunitas perguruan tinggi mampu mengembangkan fungsinya masing-masing, tidak ada masalah. Saya lihat dalam kelembagaan BKK sebagian besar kegiatan mahasiswa ditangani dosen. Kegiatan mahasiswa biar ditangani sendiri.

Berarti perlu otonomi?

Saya tidak suka istilah itu. Ada otonomi penuh, ada otonomi terbatas, itu perlu diatur. Yang penting: bagaimana supaya lembaga kemahasiswaan sebagai sub sistem perguruan tinggi itu fungsional.



M. JASMAN AL KINDI

Mengenai peran rektor

Justru di sini konsepnya. Bukan hanya rektor, tetapi juga hubungan dosen mahasiswa punya fungsi sama: saling menopang pengembangan akademik atau ilmu. Selama ini hubungan dosen-mahasiswa hanya bersifat administratif, secara akademis belum

optimal. Pelaksanaan konsep NKK sebenarnya belum juga optimal, tetapi karena faktor keadaan, kehidupan kemahasiswaan juga terpengaruh.

Keadaan mana yang Pak Jasman maksud?

Di beberapa perguruan tinggi, terdapat kecenderungan mahasiswa melakukan politik praktis. Ini salah satu sebab tidak efektifnya fungsi mahasiswa. Kemudian, juga tidak tersalurkannya mahasiswa dalam organisasi politik yang ada, baik aspirasi maupun secara fisik. Karena organisasi politik di luar tidak mau menyalurkan, ya gunakanlah kampus. Organisasi ekstra sendiri, mana yang mampu menyalurkan aspirasi politiknya.

Alternatif yang ditempuh untuk menyalurkan aspirasi tersebut?

Mengefektifkan peran mahasiswa dalam lembaga-lembaga politik di luar kampus, terutama organisasi politik, juga organisasi ekstra mahasiswa. Mahasiswa seolah-olah sedang mencari: tempat saya di mana dalam sistem politik nasional. Saya melihat, generasi muda merasa jenuh terhadap politik nasional kita. Mereka mencari! Nah, saya kira juga dalam rangka itu GOLKAR menyatakan dirinya akan banyak menghubungi orang kampus dalam menyusun program politiknya yang akan datang. Seharusnya PPP dan PDI harus juga seperti itu, guna menyalurkan aspirasi warga kampus.

Dalam lembaga kemahasiswaan sendiri?

Kembalikan pada fungsi pokoknya: menopang proses pengembangan akademik.

Kalau organisasi politik masuk kampus, bisa terjadi politisasi kampus.

Tidak. Mereka *kan* di luar kampus. Dan kampus punya benteng: peraturan serta mekanisme yang jelas.

Pengalaman DEMA dulu.

Karena dulu ekstra dalam kampus. Sekarang *kan* di luar kampus. Bagi mahasiswa yang ingin berpolitik praktis, itu hak mereka. Tetapi di luar kampus. Perannya bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai generasi muda. Mahasiswa mungkin saja diberi jabatan di luar, tetapi jangan berharap menjadi anggota DPR melalui Sema. Lewat organisasi politik dong.

Wahyudi



MOBIL-MOBIL ISTIMEWA PAKAI AKI ISTIMEWA



YUASA PAFECTA BUKAN AKI BIASA

- Dipakai oleh berbagai merk mobil istimewa dan terkemuka sebagai suku cadang asli.
- Isi langsung start.
- Kuat dan lebih tahan lama.
- Kualitas ekspor.
- Paling laku di dunia.



MAHASISWA DAN POLITIK

Gerakan mahasiswa identik dengan gerakan politik, karena gerakan mahasiswa adalah gerakan menentang, protes terhadap penguasa. Inilah yang setidaknya-tidaknya terjadi di Indonesia. Pihak yang dirugikan oleh gerakan —dalam hal ini penguasa— selalu menuduh: gerakan mahasiswa ditunggangi atau bahkan didalangi oleh kekuatan-kekuatan lain. Sementara bagi aktor-aktor utama gerakan, apa yang dilakukan karena berangkat dari hati nurani. Jadi gerakannya murni.

Dalam kamus politik memang masalah tanggung menunggangi, juga dalang mendalangi sangat lumrah terjadi. Dan logika politik memang tidak sejalan dengan logika moral. Yang terjadi kemudian mungkin politik yang dimoralkan atau moral yang dipolitikkan.

Sejarah nasional pasca kemerdekaan telah mencatat tiga puncak gerakan mahasiswa, yaitu yang terjadi pada tahun 1966, 1974 dan 1978. Untuk melihat sejauh mana hubungan antara gerakan mahasiswa dengan politik, kali ini BALAIRUNG melakukan serangkaian wawancara dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam gerakan mahasiswa masa lalu, yaitu Cosmas Batubara dan Sarwono Kusumantmaja (1966), HC Princen dan Fauzi Ridjal (1974) dan S Indro Cahyono (1978) ditambah pendapat dari tiga pemimpin organisasi ekstra mahasiswa kini, yaitu Herman Widyananda (HMI), Gaudens Wodar (PMKRI) dan Kristiya Kartika (GMNI).

Laporan Khusus kali ini juga dilengkapi hasil wawancara khusus dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Ketua Umum Golongan Karya dan seorang konglomerat. Silakan simak tulisan yang digarap oleh Didik Supriyanto, Nurhidayat dan Wahyudi.

Sesuai dengan strategi *partnership* yang diumumkan pada awal tahun 1966, kelompok militer memberikan kesempatan kepada kesatuan aksi-kesatuan aksi (KAMI, KAPPI, KASI dll) berperan sebagai ujung tombak Orde Baru. Dengan radikalisme mereka ini maka munculnya Orde Baru jadi lebih mudah.

Pengertian *partnership* ini agak kabur. Untuk militer, kata itu berarti mencapai tujuan mereka berkat persekutuan dengan mahasiswa, yang dapat mereka manfaatkan bila perlu. Sebaliknya buat para aktivis 66, *partnership* merupakan satu persenyawaan, meskipun hubungannya tidak perlu seimbang. Mereka memiliki keberanian untuk mengkritik bahkan melakukan tindakan radikal terhadap rezim lama seperti yang terjadi pada tahun 1966. *Partnership* dengan militer inilah yang menyebabkan keberhasilan gerakan mahasiswa 66.

Dari itu tidak heran apabila kemudian beredar pandangan bahwa aksi-aksi 1966 merupakan bagian dari *grand design* militer dalam rekayasa politik nasional. Dan tidak perlu heran juga kalau kemudian keberhasilan angkatan 66 itu sering mendapat cemoohan dari generasi berikutnya.

"Waktu itu tidak ada rasa, kita ini digunakan oleh tentara, atau tentara merasa digunakan oleh kita, sipil," kata Cosmas Batubara ketika ditanyakan perihal hubungan antara militer dan mahasiswa ketika pecah aksi-aksi 1966. Menurut Cosmas kondisi negara setelah peristiwa G 30 S/PKI sangat tidak menguntungkan. Semua pihak menuntut keadilan, sementara Bung Karno tidak mengambil tindakan apa-apa.

"Dalam rangka menuntut keadilan itulah kami semua bergabung. Ada seniman, mahasiswa, ulama dan angkatan bersenjata. Kita hampir tidak mempunyai batas. Yang membatasi hanya posisi kita masing-masing. Tetapi kita adalah satu

gerakan dalam ide, yakni perlu adanya orde baru," jelas Cosmas Batubara.

Sarwono Kusumaatmaja mengetengahkan hal yang senada. "Kebetulan kita sama berkesimpulan: kita bisa selamat kalau berpedoman pada UUD 45," katanya. Bagi Sarwono merupakan hukum alam bahwa yang lemah dikendalikan oleh yang kuat. Dengan demikian apakah ini berarti gerakan mahasiswa dikendalikan oleh pihak tertentu? "Saya tidak mengatakan mahasiswa dikendalikan oleh ABRI. Hukum alam memang demikian: yang lemah dikendalikan yang kuat. Nah, yang kuat itu siapa? Itu dinamis pengertiannya nggak hitam-putih," ujar Sarwono.

Menurut Cosmas, masalah tanggung menanggung yang selalu dilekatkan pada setiap gerakan massa tidaklah perlu diperdebatkan. Karena hal itu sudah merupakan hukum yang obyektif. Seperti kata Sarwono, "resiko bergerak yang ditanggung." Dan kalau mau ditanggung, "milih penunggang yang baik," tambahnya.

Peristiwa 1966 adalah contoh gerakan yang saling memanfaatkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Karena menurut Sarwono, gerakan massa yang bertujuan menggulingkan kekuasaan harus mempunyai mitra yang tangguh. Lain halnya dengan gerakan sosial. Tidak perlu mitra, tetapi cukup dengan hati nurani dan mesti sanggup memperlihatkan tidak mempunyai *interest* pribadi maupun kelompok.

Gerakan massa perlu mitra sebab, "kalau nggak nanti *dipolitikin*! Kalau yang mempolitikin kita kuat. Alhamdulillah. Bisa menang. Kalau lemah... korban kita," tandas Sarwono.

Cosmas lebih memperhatikan sistem yang tidak berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok yang ada sebagai penyebab munculnya istilah tanggung menunggui. Dan sejak sebelum proklamasi, mahasiswa selalu mem-

gang peranan sebagai penggerak untuk melawan sistem politik yang tidak berfungsi atau sistem politik yang stagnan itu. "Pokoknya kalau ada stagnan politik, gerakan mahasiswa pasti keluar," tandasnya.

Apakah ini berarti tengah terjadi stagnan politik sekitar tahun 1974 dan 1978, karena pada saat itu sempat muncul aksi-aksi mahasiswa? Lebih lanjut Cosmas mengemukakan, dalam sistem politik yang stagnan sa-

Siregar, Ketua Dema UI 1974, **red**) sewaktu diskusi di UI. Setelah 1966 sebaiknya kita tidak melakukan lagi kegiatan massal. Saya bilang, ini *nggak* benar," cerita Cosmas. "Saya tidak setuju dengan demonstrasi, meskipun dulu saya tokoh demonstran," tambahnya.

Sarwono melihat aksi-aksi 74 dan 78 sebagai gerakan yang tidak mempunyai konsep yang pasti dan utuh. Begitu juga dengan aksi-aksi 66 sendiri. "Ka-

COSMAS BATUBARA DAN SARWONO KUSUMAATMAJA

PENUNGGANGAN ITU ALAMI

ngat diperlukan perombakan-perombakan politik. Perombakan-perombakan itu dilakukan secara terarah dan berencana menuju adanya sistem politik yang berfungsi baik, di mana setiap orang mengerti hak dan kewajibannya. Inilah yang dinamakan pembangunan politik. Pembangunan politik ini telah dilakukan oleh gerakan 66 dan dilanjutkan secara konsekuen oleh Soeharto sebagai presiden.

Tetapi ternyata generasi muda pada waktu itu melihat jalannya pembangunan tidak sebagaimana mestinya, sehingga timbul aksi-aksi 74 dan 78. Cosmas menyatakan, generasi muda waktu itu kurang sabar dan melihat pembangunan berjalan lambat. "Padahal pembangunan itu memerlukan proses yang panjang," jelasnya.

Karena itu Cosmas tidak setuju dengan aksi-aksi 74 maupun 78. "Saya sendiri sudah bilang sama Hariman (*Hariman*

lau dibidang aksi-aksi 66 itu mempunyai konsep, yaitu Tritura, itu namanya pemitosan, abstraksi," ujarnya. "Tritura itu kan semboyan perjuangan untuk menyatukan semua potensi yang ada," tambah Sarwono.

Dengan aksi-aksi akan terlibat permasalahan yang diungkap menjadi lebih nyata dan spesifik. Aksi-aksi 1966, masih menurut Sarwono, umumnya membahas apakah Indonesia menjadi negara Islam, federal atau Pancasila. Sedangkan aksi-aksi 1988/1989 mempermasalahkan dampak-dampak pembangunan, misalnya Kedungombo dan Kacapuring.

Mengenai aksi-aksi mahasiswa belakangan ini, Cosmas melihatnya tidak perlu terjadi. Karena yang penting adalah bagaimana mendorong sistem politik agar lebih berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. "Nah, ini tidak bisa dengan demonstrasi bung!"

Nur Hidayat

"Kita harus berbuiat, jiwa angkat-an 66 harus menjadi inspirasi kita," demikian Hatta Albanik, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Pajajaran dan Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada 'malam tirakatan' menjelang tahun baru 1974. Pejabat tinggi dan orang-orang Cina dianggap sebagai penanggungjawab situasi. Seruan-seruan dilancarkan kepada

yang kemudian dikenal dengan Malari.

Yang menjadi pertanyaan kemudian setelah peristiwa Malari itu adalah kenapa Aspri dijadikan sasaran protes mahasiswa, dan kenapa Perdana Menteri Jepang, Tanaka menjadi penarik picu pecahnya aksi makar yang sempat menewaskan sembilan nyawa dan merusak bangunan Pasar Senin serta menghancurkan sejumlah kendaraan bermotor itu?

HC PRINCEN DAN FAUZI RIDJAL

PASTI ADA INFILTRASI

tukang becak dan para penganggur. Sedang para buruh di Tanjung Priok melalui seorang wakilnya menyampaikan dukungannya kepada mahasiswa.

Tanggal 9 Januari para mahasiswa melakukan demonstrasi menentang Aspri dan Negeri Jepang. Di Bandung dan Jakarta boneka-boneka yang menggambarkan diri Sudjono Humardhani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka dibakar. Mahasiswa melanjutkan gerakan bahkan melipatgandakannya. Tanggal 14 Januari mahasiswa demonstrasi di lapangan terbang Halim Perdanakusuma sebagai protes terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka.

'Kontak' antara demonstran dengan tamu dari Jepang itu tidaklah terjadi. Karenanya frustrasi dan suhu meningkat. Tanggal 15 Januari pecahlah Malapetaka Limabelas Januari atau Makar Limabelas Januari,

Banyak pengamat bilang, peristiwa huru hara 1974 itu tidak lepas dari persaingan politik tingkat elit yang tengah sengit terjadi saat itu. Interpretasi politik menyatakan, bahwa sejak 1972 mulai terlihat pertentangan pengaruh yang berlangsung di sekitar Presiden. Ada dua kelompok yang sedang bersaing untuk mendapat Presiden, dan memaksakan strategi ekonomi mereka, paling tidak dominasi politik mereka.

Di satu pihak ada Jendral Ali Murtopo dan Aspri yang memilih strategi pembangunan ekonomi dengan model Jepang. Di pihak lain terdapat kelompok yang antara lain didukung oleh Jendral Sumitro (Pangkajene) yang memilih strategi pembangunan ekonomi dengan model Amerika. Persaingan antara kedua jendral itulah yang acapkali ditunjuk pengamat sebagai arus yang membawa pe-

cahnya peristiwa Malari.

"Saya selalu ditanya oleh anak buah Jendral Sumitro mengenai hubungan saya dengan Jendral Ali Murtopo," kata **HC Princen** ketika ditanya perihal hubungan peristiwa Malari dengan kedua jendral tersebut. Tokoh pembela hak-hak azasi manusia yang sempat dituduh menjadi penggerak aksi huru-hara 15 Januari 1974 ini mengaku kenal baik dengan Ali Murtopo, tetapi, "itu bukan berarti ia satu konspirasi politik dengan saya," tambahnya.

Lalu bagaimana dengan unsur-unsur penunggang terhadap mahasiswa seperti yang dituduhkan Jendral Ali Murtopo beberapa saat setelah peristiwa itu? (Dalam buku *Fakta, Analisa Lengkap dan Latarbelakang Peristiwa 15 Januari 1974* yang ditulis oleh seorang yang dekat dengan Ali Murtopo menyatakan bahwa, demonstrasi murni dari mahasiswa itu telah diblokkan dari tujuan semula).

"Gerakan mahasiswa itu bisa berupa *iceberg*, bongkahan es raksasa," ujar Princen. "Biasanya yang di bawah permukaan air lebih besar dari yang di atas," tambahnya. Menurut Princen, bagian bawah yang tidak tampak inilah yang biasanya ada 'permainan'. "Bagian ini tidak bisa terkontrol, dan memungkinkan terjadinya tunggang menunggangi," jelas Princen lagi.

Bagi Princen, gerakan mahasiswa itu tidak pernah independen. Angkatan 66 sudah cukup jelas hubungannya dengan kelompok militer. "Gerakan 74 pasti ada infiltrasi, ada mahasiswa yang digunakan, tetapi tidak semuanya," ujarnya. Princen bahkan menganggap gerakan 78 merupakan ciptaan pihak militer. "Ya... pada waktu itu kan ada usaha dari sebagian militer untuk menggagalkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978," tuturnya tanpa mau menjelaskan lebih lanjut.

Sementara menurut **Fauzi Ridjal** gerakan mahasiswa ta-

hun 1970-an menunjukkan adanya independensi. Karena pada saat itu tengah terasa kerengangan antara kehidupan kampus dengan dinamika politik di luar kampus. Kampus menjadi lebih bebas dari campur tangan organisasi ekstra kampus atau partai politik.

Aktivis mahasiswa tahun 1970-an ini menunjuk terpilihnya Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai momentum bebasnya kampus dari kekuatan luar kampus. "Hariman Siregar adalah orang pertama semenjak Orde Baru yang tidak mewakili organisasi ekstra besar," jelas Ketua Yayasan Perpustakaan Hatta ini. "Dia bukan HMI, bukan pula GMNI," tambah Fauzi yang pernah aktif dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS) Yogyakarta.

Ditanyakan tentang keterkaitan aksi mahasiswa 74 dengan konflik politik tingkat elit, Fauzi malah meragukan interpretasi politik tersebut. "Apa benar ada konflik politik tingkat elit?" tanya Fauzi. "Bagaimana cara mengukurnya? Tidak ada pernyataan politik dari mereka. Dan secara yuridis formal, tidak ada konflik itu kan?"

Sedang mengenai masalah tunggang menunggangi, Fauzi mengaku lebih suka dengan istilah kerja sama. Bahwa orang mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan jangka pendek dapat terjadi setiap waktu, tergantung penilaian isu yang muncul. "Jadi tunggang menunggangi itu tidak aneh," ujarnya.

Senada dengan Princen, Fauzi menyatakan gerakan mahasiswa bisa ditunggangi. Memang secara umum orang selalu mengatakan mahasiswa sering ditunggangi, sebab potensinya lemah. Tidak punya aset politik dan tidak punya aset keuangan. Karena itu, "gerakan mahasiswa mudah sekali dioperasikan dengan bantuan ini, bantuan itu," kata Fauzi lagi.

Nur Hidayat

Pada pertengahan tahun 1976 tengah meluas berita-berita yang mengungkapkan adanya skandal-skandal tertutup di kalangan pejabat tinggi, korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Mahasiswa secara kritis menelaah kasus-kasus tersebut. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 yang dinilai tidak *fair* disusul kemudian munculnya isu kepemimpinan nasional menjelang Sidang Umum MPR 1978 merupakan faktor-faktor yang mendorong timbulnya aksi-aksi mahasiswa

nyelewengan serta minta perhatian pemerintah untuk memperbaikinya. Dan di Bandung, mahasiswa mengeluarkan pernyataan menolak pencalonan kembali Jendral Soeharto sebagai presiden masa berikutnya. Pernyataan terakhir ini dibuat berkenaan dengan akan dilangsungkannya Sidang Umum MPR 1978, yang salah satu agendanya adalah memilih presiden.

"Gerakan mahasiswa memang tidak bisa lepas dari momentum-momentum politik,"

S INDRO CAHYONO

JANGAN TERKECOH

di berbagai kota besar di Indonesia.

Dalam melakukan aksinya mahasiswa membentuk federasi di antara Dewan Mahasiswa, yang merupakan organisasi legal di tingkat perguruan tinggi. Federasi ini membuat beberapa ikrar, misalnya Ikrar 1 Oktober 1977 (Bogor) dan Ikrar 28 Oktober 1977 (Bandung). Pertemuan Dewan Mahasiswa se Indonesia di Surabaya 10 November 1977 akhirnya diteruskan dengan aksi turun jalan menuju Taman Makam Pahlawan.

Di berbagai kota besar juga berkecamuk demonstrasi mahasiswa. Di Jakarta, mahasiswa keluar dengan isu pemerataan, menolak kebijaksanaan ekonomi yang tidak adil misalnya mengenai BBM dan kenaikan ongkos bis kota. Di Yogyakarta, mahasiswa melancarkan isu kembali pada Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Di Ujung Pandang, Padang dan Medan mahasiswa protes terhadap berbagai pe-

kata **S Indro Cahyono**, aktivis mahasiswa akhir tahun 70-an. "Fungsi politik itu *inherent* dalam tubuh mahasiswa, maka setiap ada oportunitas politik—peluang keberhasilan atau kegagalan, misalnya pergantian presiden atau konflik elit—yang berarti momentum politik—akan melahirkan gerakan mahasiswa," tutur Indro Cahyono.

Karena itu setiap kali ada gerakan mahasiswa maka muncul isu pokok: gerakan mahasiswa ditunggangi. Di satu sisi ada konflik politik elit misalnya, di sisi lain mahasiswa yang berpolitik itu minus prasarana dan sarana politik. "Makanya mereka cenderung ditunggangi oleh elit-elit tersebut," kata Indro Cahyono "Walaupun mahasiswa tidak dalam posisi ditunggangi," tambahnya.

"Ini sebenarnya hanya satu kebetulan atau kefidensi politik saja," ujar Ketua Sekretariat Bersama Kelestarian dan Perlindungan Hutan Indonesia

(SKEPHI) ini. "Malah bagi mahasiswa konflik politik yang ada itu digunakan sebagai sarana demokratis yang positif," ujarnya lagi.

Menurut Indro Cahyono, isu penunggangian itu sebenarnya hanya gunjingan politik saja. Dan itu akan selalu terjadi, karena dalam setiap interaksi sosial tidak hanya merupakan garis linier. Interaksi siapa mempengaruhi siapa tidak pernah berjalan satu arah. "Dalam jaringan seperti itulah tumbuh istilah ditunggangi," tegasnya. Mahasiswa tidak perlu terkecoh dengan isu penunggangian, karena hal itu dapat mengecilkan arti mahasiswa untuk bergerak, bahkan bisa menghancurkan (gerakan) mahasiswa sendiri.

Setidaknya itu yang bisa dipetik dari pengalaman gerakan mahasiswa yang muncul pada tahun 1977–1978. Pada masa ini mahasiswa benar-benar termakan oleh isu-isu bahwa gerakan mahasiswa harus murni, tidak ada penunggangian, tidak juga kerja sama dengan pihak-pihak lain. Juga mahasiswa termakan oleh isu pemerintah yang katanya, apabila gerakan mahasiswa itu murni, pemerintah mau memperhatikan.

"Kita waktu bergerak tidak mempunyai afiliasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik di masyarakat, tetapi ironis sekali gerakan mahasiswa tetap saja diberangus," tutur Indro Cahyono. "Malah tentara menduduki kampus dan Dewan Mahasiswa kemudian dibubarkan," tambah Anggota Presidium Pejabat Ketua Dewan Mahasiswa ITB 1977–1978 ini.

Gerakan Mahasiswa 1978 memang ironis. Kalau dilihat dari sisi dukungan dan konsepsi politiknya, jauh melebihi dari apa yang dilakukan pada tahun 1966 atau 1974. Gerakan ini sudah meliputi beberapa kota besar, bahkan sampai di Irian. Sementara tahun 1966 dan 1974 hanya berlangsung di Jakarta. Pleodi yang panjang yang dikemukakan tokoh-tokoh gerakan ketika dimejahijaukan menun-

jukkan betapa mereka telah memiliki konsepsi politik yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Indro Cahyono sendiri gerakan mahasiswa harus memiliki konsep yang jelas dan peran apa yang mau dibawakan mahasiswa. "Sebab kalau tidak, mahasiswa bisa dituduh reaksioner. Dan ini berbahaya sekali walau organisasinya legal," jelas Indro Cahyono.

Banyak yang bilang, gerakan mahasiswa itu gerakan moral, mengapa mesti menyusun konsep segala? Menurut Indro Cahyono, kalau memang demikian halnya, mahasiswa akan larut dalam pergulatan politik yang sebenarnya dalam mana setiap kekuatan politik di dalamnya sudah siap dengan massa yang banyak, seperti partai dan organisasi kemasyarakatan. "Golkar, PPP, PDI, NU, Muhammadiyah itu kan *gajah-gajah politik*, apa mahasiswa mau melawan gajah-gajah itu?" tanya Indro Cahyono.

Secara minimal, mahasiswa kalau mau bergerak harus menyusun konsep politiknya. Indro Cahyono kemudian menunjuk contoh-contoh gerakan mahasiswa di Cina, Kuba, Inggris dan Belanda yang memiliki konsep matang sehingga gerakannya tidak reaksioner. "Bahkan dalam banyak hal gerakan mahasiswa bisa jadi embrio partai politik," tuturnya. Benazir Bhutto misalnya, ketika sekolah di AS menyusun konsepsi politik tertentu. Kemudian dia dapat dukungan dari kelompok politik tertentu, sehingga gerakannya akhirnya bisa menjadi partai besar.

"Kalau gerakan mahasiswa mau berhasil, jangan hanya berbasis di kampus saja. Cari kekuatan di luar, bergabung dengan masyarakat banyak," saran Indro Cahyono. Sebab bila sudah memiliki basis di masyarakat, mahasiswa akan dilindungi masyarakat seandainya dikejar-kejar tentara. "Tidak seperti selama ini, selalu main kucing-kucingan dengan tentara di kampus."

Dititk



ORGANISASI EKSTRA

DARI AKSI 66 SAMPAI SMPT

Mahasiswa membuat sentakan. Mengejutkan. Setelah satu dekade, sejak akhir tujuh puluhan mereka "diam, belakangan mulai bicara lagi. Ketidak puasan yang terpendam, kemauan yang terhambat dan suara yang tersumbat akhirnya mereka keluarkan juga.

Mahasiswa sekarang mungkin ingin bernostalgia seperti apa yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya di masa lalu. Ketika pada tahun 1966 para mahasiswa turun ke jalan, memprotes keadaan dan mengajukan tuntutan. Kemudian perubahan terjadi dan Orde Lama runtuh, diganti Orde Baru.

Terlepas dari penilaian kita tentang perebutan kekuasaan pada tahun 1960-an tersebut, yang jelas keterlibatan dan peran mahasiswa dalam beberapa momentum politik tidak bisa kita pungkiri. Kepeloporan seperti itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri Budi Utomo, yang dianggap sebagai organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, adalah para mahasiswa STOVIA (Sekolah Dokter jaman Belanda). Sukarno, Moh. Hatta dan kawan-kawan sudah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan sejak mereka masih mahasiswa. Antara lain melalui kelompok studi yang mereka dirikan atau dengan menyebarkan pamflet, bulletin maupun majalah.

Kepeloporan mahasiswa itu merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya mahasiswa adalah kelompok yang strategis, di manapun dan kapanpun. Demikian pendapat **Herman Widyananda**, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB - HMI) dalam wawancara dengan **BALAIRUNG** di kantornya. Posisi strategis itu karena ditinjau dari segi pendidikan formalnya, mahasiswa ada pada jenjang terakhir. Mereka memiliki seperangkat ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk "menilai kebenaran". Karena itu mahasiswa akan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebenaran itu, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak benar, dia akan memiliki *concern* untuk memperbaiki.

Pendapat yang senada dilontarkan oleh **Gaudens Wodar**, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PM-KRI). Gerakan mahasiswa muncul karena dalam kesehariannya dia bergumul dengan teori-teori yang ideal. Mahasiswa dibina insan yang ideal. Maka apabila dia melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan idealismenya, mahasiswa akan mengangkat masalah tersebut dan memperjuangkan sesuai dengan keinginannya. Karena itu pendekatan mahasiswa adalah pendekatan yang ideal. Gerakan mereka ditujukan untuk kebenaran, keadilan dan kesejahteraan

masyarakat dan negara. "Dan itu merupakan suatu keharusan", tegasnya.

Sementara itu **Kristiya Kartika**, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menitik beratkan gerakan mahasiswa sebagai gerakan dari sebuah kekuatan moral. Tidak berarti dia berfungsi sebagai *resi* semata-mata, mahasiswa tidak hanya mengingatkan kemudian tidak berbuat apa-apa. Dia juga harus mengorganisir massa. Sehingga gerakan mahasiswa tetap memiliki substansi politik, walaupun pada awalnya adalah gerakan moral. Karena sebenarnya gerakan yang melibatkan massa adalah gerakan politik. Lebih jauh dia mengingatkan, "Gerakan mahasiswa jangan dibuat main-main. Itu merupakan salah satu bentuk peran yang sangat strategis dari kaum muda terhadap masyarakatnya."

Berbicara tentang peran mahasiswa, Herman masih yakin terhadap fungsi mahasiswa sebagai *agen pembaharuan atau pembuat perubahan*. Dan fungsi ini telah dijalankan oleh para mahasiswa dalam momentum-momentum perjalanan negeri kita; terlepas dari keberhasilan yang dicapai. Pada masa penjajahan tonggak sejarah tahun 1908, 1928 dan 1945 tidak lepas dari peran mahasiswa dan kaum muda pada umumnya. Dan setelah merdeka kita mencatat tahun 1966, 1974 dan 1978 sebagai puncak-puncak gerakan

mahasiswa.

Mengomentari gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah muncul, Herman, Gaudens dan Kristiya sependapat bahwa pada setiap gerakan dapat ditarik benang merahnya. Misalnya masalah keadilan, adanya keinginan akan perubahan serta berbagai bentuk dinamika dan komitmen mahasiswa terhadap masyarakatnya. Namun Kristiya juga melihat adanya perbedaan, artinya ada hal-hal yang tenggelam dan ada yang muncul.

Peristiwa '66 terjadi karena adanya krisis politik dan ekonomi yang semakin akut, sementara kaum intelektual terpasung. Artinya proses pengaktualisasian pikiran dan ide-idenya teredusir oleh sistem yang ada. Sehingga ide yang cukup penting pada waktu itu adalah bagaimana mengaktualisasikan pemikiran kaum intelektual ke atas. Dalam perkembangannya kemudian ternyata mahasiswa bekerjasama dengan salah satu kekuatan politik yang ada. Dari analisis sejarah, pada waktu itu terdapat tiga kekuatan politik utama yaitu Sukarno, ABRI dan PKI. Di mana Sukarno dan PKI sudah terpojok, sehingga ABRI memiliki posisi yang kuat untuk membuat perubahan. Meskipun demikian Kristiya tidak terlalu setuju kalau dikatakan bahwa mahasiswa hanya menjadi *ujung tombak dari peristiwa '66*. "Bahwa kemudian mereka bekerja sama itu fakta yang tidak bisa ditolak. Namun tetap ada idealisme juga. Dan yang jelas angkatan '66 telah melahirkan suatu mitos. Mitos bahwa angkatan '66 adalah angkatan pendobrak, angkatan yang berhasil." Berbeda dengan Kristiya, Herman berpendapat bahwa dalam peristiwa '66 ada kelompok yang memanfaatkan. "Ada yang *me-leading*", katanya.

Kalau ingin mahasiswa tidak melakukan aksi, perbaiki apa yang ada di luar.

Gerakan mahasiswa itu pada dasarnya murni. Namun dalam proses interaksi dengan kekuatan politik yang lain, mereka dapat dimanfaatkan, atau dalam istilah yang sering kita dengar, *ditunggangi*. Hal semacam itu, menurut Ketua Umum PP-PMKRI merupakan *jalur merah politik*. Dalam arti setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam politik praktis akan selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada. Karena itu dia menyarankan, "Agar jangan ada penunggang maka kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memiliki tendensi politik harus dihindarkan lebih dulu".

Sementara Kristiya lebih suka istilah *kerjasama* seraya menuduhkan bahwa istilah *ditunggangi* itu ucapan penguasa. Mengapa demikian? "Karena gerakan mahasiswa harus bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial politik lain, sepanjang memiliki kesamaan ide dan cita-cita. Saya masih percaya ada dalil yang mengatakan bahwa gerakan apapun akan berhasil kalau dia merupakan gerakan rakyat, *people movement*. Nah,



HERMAN WIDYANANDA

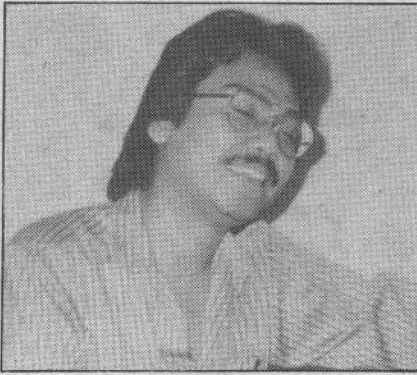
mahasiswa jangan berpretensi bahwa ia akan bisa sendiri."

Memasuki tahun 1970 mahasiswa atau kaum intelektual mulai ditinggalkan oleh ABRI — partner dalam peristiwa '66. Keberadaan Orde Baru juga mulai digugat dengan protes anti korupsi, munculnya *golongan putih* dalam Pemilu 1971 dan strategi pembangunan juga dipersoalkan. Berbagai ketidakpuasan terhadap keadaan tersebut bermuara pada munculnya gerakan '74, yang mana masalah modal asing menjadi picunya. Gerakan mahasiswa selanjutnya muncul pada tahun 1978, walaupun mahasiswa masih dihantui oleh trauma peristiwa '74 dan dipengaruhi oleh mitos '66. Dibanding gerakan '74 gerakan '78 tidak terlalu fundamental, bahkan akibatnya cukup fatal. Pemerintah menganggap mahasiswa masih kekanak-kanakan dan mengganggu jalannya pembangunan sehingga perlu *disadarkan*. Sebagai langkah penyadaran, atau menurut istilah Kristiya *penekanan* tersebut semua Dewan Mahasiswa dibekukan. Kemudian diberlakukan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Ide utama NKK/BKK adalah menjadikan mahasiswa sebagai bagian dari tekno-struktur yang ada, sehingga yang dituju adalah profesionalitas. "Namun profesionalitas yang dicita-citakan NKK/BKK tidak tepat dan malah meredusir kecendekiawanan mahasiswa", kata Kristiya. Akibat yang jelas terlihat: mahasiswa menjadi semakin apatis, gerak aktifitas mahasiswa menjadi terbatas, terutama yang bersifat politis. Reaksi yang diperlihatkan oleh GMNI cukup frontal, mereka keluar kampus dan lebih mengutamakan kegiatannya di luar kampus. Sementara itu PMKRI sudah keluar kampus jauh sebelum NKK/BKK dibentuk. Sedang HMI, sebagian melibatkan diri dalam kegiatan mas-



AKSI 66 : Ada yang *me-leading*.



KRISTIYA KARTIKA

jid dan dakwah. Dari sini Ketua Presidium GMNI melihat adanya hikmah dari NKK/BKK, "mahasiswa turun ke dalam masyarakat, mereka langsung terlibat pada akar persoalan."

Apatisme mahasiswa paska NKK juga dilihat oleh Ketua Umum PB-HMI. Dengan adanya NKK, ditambah SKS dan kendala yang ada di luar seperti lapangan kerja yang jenuh, banyak mahasiswa yang lebih suka belajar saja, komitmen terhadap rakyat berkurang. Bukan tidak ada, tetapi jumlahnya semakin sedikit. Apatisme mahasiswa itu implikasinya kepada organisasi ekstra juga, karena anggotanya adalah mahasiswa. Meskipun demikian, dinamika mahasiswa masa NKK/BKK tetap ada. Kelompok studi berkembang, dan pada akhir '80-an aksi mahasiswa muncul lagi. "Jadi, apapun peraturan untuk mahasiswa gerakan itu tetap ada. Dipasung bagaimanapun kalau ada yang harus dibenahi, mereka akan bergerak. Kalau ingin mahasiswa tidak melakukan aksi, perbaiki apa yang ada di luar!"

Sementara itu Gaudens punya pandangan lain. Meskipun tidak menolak pendapat kedua rekannya di atas, dia lebih melihat apatisme mahasiswa sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan ekonomi yang mendorong orang pada pilihan-pilihan yang aman. Asal aman secara sosial, ekonomi, politik, lalu puas dengan keadaan dan ikut saja dengan *status quo* yang ada. Masyarakat kita, termasuk mahasiswa, sudah menjadi pragmatis.

Kalau kemudian kita dikejutkan oleh gerakan mahasiswa yang muncul mengantisipasi kasus-kasus seperti Kedung Ombo, Badega, Kaca Piring dan sebagainya; hal ini sebenarnya wajar. Bahkan keharusan, karena idealisme mahasiswa akan selalu terusik apabila terdapat "penyimpangan" di dalam masyarakatnya. "Dan mahasiswa hendaknya lebih banyak bicara tentang hal-hal yang ideal dan strategis", saran Gaudens. Kelemahana

Karena mengorganisasi massa, gerakan mahasiswa memiliki substansi politik.

gerakan mahasiswa adalah tidak mempunyai strategi isu sendiri. Ketika ada orang melempar isu, ramai-ramai mahasiswa menanggapi. Mahasiswa sering terjebak dalam isu yang dibuat.

Tentang hal yang ideal, Gaudens memberi contoh tentang suksesi. Kalau ada teori yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Maka makin lama orang berkuasa makin besar kecenderungan untuk melakukan korupsi. Setelah menerima tesis itu kemudian kita berpikir sebaiknya jangan terlalu lama. Kalau begitu, berapa periode? "Jadi kita bicara hal yang ideal. Keputusannya nanti yang ngurus para pemimpin. Dengan demikian mahasiswa tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya politik praktis. Dan idealisme mahasiswa tetap terjaga."

Herman dan Kristiya juga sepakat bahwa gerakan mahasiswa hendaknya tidak terlalu bersifat politik praktis. Gerakan mahasiswa harus lebih bersifat kerakyatan dan gerakan moral. Namun Kristiya tetap setuju dengan tema-tema politik, asal dalam aspek moral-

nya. "Bagi saya kalau mahasiswa bicara tentang suksesi itu tidak merupakan kesalahan. Tapi harus menekankan aspek moralitas, kepemimpinan yang akan datang harus lebih baik dari sekarang."

Mengomentari gerakan mahasiswa yang muncul belakangan ini, wakil Pemimpin Umum mingguan SWADESI itu menilai gerakan yang sekarang ini lebih independen. Karena mereka tidak bicara semata-mata politik nasional, tapi bicara dari kasus-kasus riil. Mengenai isu-isu yang bersifat lokal dia menuturkan bahwa isu lokal atau isu nasional itu hanya pemilahan. Isu lokal bisa menjadi isu nasional, bahkan internasional. Kalau itu menyangkut taktik gerakan tidak perlu menjadi masalah. Gerakan seperti itu di Kedung Ombo itu paling tidak telah menyadarkan birokrat terhadap kekeliruan-kekeliruannya dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan. "Gerakan mahasiswa dari masa ke masa memang menuntut cara dan pemahaman yang berbeda. Kalau mahasiswa masih mengandalkan cara-cara yang dimitoskan angkatan '66, tidak masanya lagi. Dan kalau pemerintah mau mengerti persoalan ini, caranya jangan represif".

Adalah fenomena yang menarik apabila kemudian muncul rencana — dibentuk Senat Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi (SMPT). Karena kebijakan yang merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional itu muncul setelah terjadi beberapa aksi mahasiswa. Apalagi bila dihubungkan dengan isu suksesi tahun 1993 nanti. Sehingga wajar apabila Gaudens melihat fenomena tersebut sebagai haluan politik pemerintah. Bagaimanapun suksesi perlu suasana aman, perlu stabilitas.



AKSI 74 : Modal asing jadi picunya.

Berbeda dengan Gaudens, Herman dan Kristiya melihat kebijakan SMPT tidak semata-mata untuk mengantisipasi munculnya gerakan mahasiswa maupun persiapan menghadapi sukses '93 nanti. Kebijakan ini merupakan NKK/BKK dianggap membuat mahasiswa menjadi apatis, maka sekarang akan diubah. Herman menjelaskan bahwa NKK/BKK itu berdasarkan SK 028 yang dikeluarkan oleh KOPKAMTIB, bukan dari pendidik. Sehingga penanganannya dengan cara militer. Padahal mahasiswa seharusnya ditangani secara akademis sesuai dengan referensi intelektualitasnya. "Cara-cara militer untuk menangani mahasiswa itu tidak bisa", tandasnya.

Alumnus ITS itu juga menyatakan bahwa rencana perubahan lembaga kemahasiswaan itu sudah ada jauh sebelum munculnya aksi mahasiswa akhir '80-an ini. Ketika Fuad Hasan dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Herman dan Fuad sempat bicara tentang perlunya pimpinan mahasiswa tingkat perguruan tinggi, tidak hanya tingkat fakultas. Karena itulah HMI telah mengadakan persiapan sejak dini. Yaitu dengan mengadakan dialog-dialog dengan beberapa pembantu rektor III yang kebetulan dari HMI untuk mencari pemikiran-pemikiran. Sedangkan GMNI mengadakan koordinasi terus menerus dan mencari alternatif-alternatif untuk menghadapi berbagai kemungkinan bentuk SMPT yang akan ditetapkan.

Ada beberapa pemikiran tentang SMPT dari tiga pemimpin organisasi ekstra mahasiswa di atas. Selain struktur, Herman menyatakan perlu adanya mekanisme pertanggung-jawaban dan wewenang yang jelas. Arsitek ini berharap SMPT lebih in-

Kegiatan mahasiswa yang memiliki tendensi politik harus dihancurkan.

dependen dan lebih mandiri dibanding NKK/BKK. Dengan SMPT hendaknya ada demokratisasi kepemimpinan di kampus, kemandirian organisasi mahasiswa dijamin dan otoritas mahasiswa juga harus ada. Hal ini mengingat subyek utama di perguruan tinggi adalah mahasiswa. Mengenai fungsi rektor dia menyarankan agar fungsinya tidak koordinatif, tetapi aspiratif dan konsultatif. SMPT harus memungkinkan mahasiswa mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian SMPT dapat menjadi sarana bagi pendidikan politik dan pendewasaan politik mahasiswa.

Ketiga pemimpin organisasi ekstra tersebut sepakat bahwa lembaga kemahasiswaan seperti Dewan Mahasiswa, dimana ada "student government" adalah bentuk yang ideal. Terhadap kritik bahwa dalam Dewan Mahasiswa organisasi ekstra terlalu dominan, Herman menyanggahnya. "Tidak benar itu! Dewan Mahasiswa tidak dipengaruhi ekstra secara penuh. Mereka membuat kebijakannya sendiri. Paling-paling kalau ada Pemilu



GAUDENS WODAR

Dewan, ekstra berusaha memasukkan orang-orangnya, untuk mengartikulasikan kepentingan. Dan itu konsekuensi adanya ekstra. Jadi wajar saja."

Keinginan terhadap bentuk Dewan Mahasiswa bukan semata-mata ingin bebas. Tapi demi pendewasaan mahasiswa, pendidikan politik, atau seperti kata Kristiya, *proses memanusiakan manusia*. Namun dosen UNTAG Jakarta ini tidak yakin kalau SMPT akan seperti Dewan Mahasiswa. Karena pemerintah ingin kesetabilan kampus terjamin. Meskipun tidak ada jaminan tanpa DEMA kampus akan lebih stabil. Dan pengertian tentang kampus yang stabil itu sendiri masih perlu diperdebatkan.

Suara pesimis juga muncul dari Ketua Umum PP PMKRI. "Saya terlalu percaya tidak akan lahir iklim DEMA dalam SMPT. Hanya sekadarlah. Karena suksesi memberi persyaratan dasar stabilitas harus dijaga. SMPT hanya BKK ganti baju". Walaupun SMPT dibuat seperti DEMA, menurut Gaudens tidak akan jalan. Karena dampak makro pembangunan ini benar-benar telah mempengaruhi cara berpikir dari idealisme kepada pragmatisme.

Dengan suara pesimis tersebut tidak dimaksudkan untuk menyebabkan pesimisme kalangan mahasiswa. Kita masih bisa berharap SMPT akan lebih baik daripada NKK/BKK. Namun dengan mengetahui kenyataan yang ada kita hendaknya tetap berusaha mempersiapkan pemikiran dan langkah-langkah alternatif. Bagaimanapun bentuk SMPT nanti tidak harus menjadi masalah. Yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan perjuangan kita. Agar mahasiswa lebih dinamis.



AKSI 78 : Tidak fundamental, akibatnya fatal.

Wahyudi



DON BALAIRUNG

FUAD HASSAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MAU 'D.O.' JADILAH AKTIVIS

Ada satu *achievement*, satu hal yang sudah kita selesaikan. Yakni modal yang dapat kita gunakan untuk mengelola pendidikan nasional, yaitu *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989*. Berkaitan dengan kemahasiswaan, apa yang dicapai oleh UU itu adalah apa yang *semestinya* berlaku perguruan tinggi. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan termaktup dalam pasal 22 serta penjelasannya.

Sewaktu saya di Yogyakarta (ISI, *red*) mahasiswa ramai-ramai minta kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi kampus. Nah, yang terakhir ini keliru, karena kampus bukan wilayah tersendiri. Yang ada otonomi keilmuan. Memang banyak konsep yang salah yang melanda dunia kampus selama ini. Misalnya sivitas akademika. Dulu, yang namanya sivitas akademika itu dosen, mahasiswa dan karyawan. Bahkan juga ada yang menambahkan alumni, mungkin juga orang tua mahasiswa, kakek nenek mahasiswa dan seterusnya. Ini keliru. Dalam dunia akademis yang namanya sivitas akademika itu staf akademik (pengajar) dan mahasiswa. Konsep-konsep yang keliru inilah yang akan kita bersihkan dari dunia kampus.

Kamu pasti bertanya: apakah mahasiswa tidak boleh berpolitik? Yang bilang tidak boleh berpolitik itu siapa? Dari dulu mahasiswa selalu peka terhadap masalah-masalah politik. Saya bilang: dari dulu mahasiswa seharusnya peka terhadap semua masalah di sekitarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan politik praktis? Politik apapun, praktis *kek*, teoritis *kek*, boleh semuanya.

Seorang menjadi mahasiswa tidak berarti kehilangan haknya sebagai warga negara. Oleh karenanya semua undang-undang yang berlaku juga mengenai mahasiswa. Lapangannya yang tidak betul. Jangan mimbar akademis dijadikan mimbar politik. Saya tidak setuju. Di manapun berlaku seperti itu. Di Eropa atau Amerika pun berlaku seperti itu tidak sedikit guru besar di Amerika yang aktif dalam partai Republik atau pun Demokrat, tetapi mereka menggunakan arena dengan benar. Di mimbar akademis berbicara akademis, baru setelah di mimbar politik bicara soal politik. John F Kennedy seorang demokrat, dia juga seorang guru besar. Tetapi dia tidak pernah melakukan kampanye di mimbar akademis. Mau contoh lagi. Henry Kissinger. Dia ini seorang guru besar di Harvard. Dia aktif melakukan kampanye untuk partainya, tetapi sekali lagi tidak di atas mimbar akademis. Jangan dicampur-campur.

Yang saya inginkan tahulah tempat. Jangan main sepak bola di lapangan kasti, main basket di lapangan badminton. Kacau nanti. Seorang pengajar fakultas kedokteran membeberkan anatomi seks di mimbar akademis itu *nggak* apa-apa. Tapi kalau hal ini dilakukan di mimbar umum, bisa kacau kan? Kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademis dan otonomi keilmuan adalah tradisi akademis. Karenanya telah memiliki norma-norma tersendiri. Orang yang mau naik mimbar agama lain tata caranya dengan orang yang mau naik mimbar akademis, lain pula tata caranya dengan naik mimbar politik. Karena ketiganya berangkatnya sendiri-sendiri dan mempunyai

tujuan sendiri-sendiri. Jangan mimbar agama disamakan dengan mimbar akademis, jangan pula disamakan dengan mimbar politik. Norma-norma akademis itulah yang harus ditegakkan di kampus.

Kamu mesti bilang: ah, ini kan ucapan seorang menteri. Kamu bisa tanya pada teman-teman saya, sikap saya sejak mahasiswa seperti itu. Jadi, tentang Dewan Mahasiswa (DM)? Sering kita bicara tentang DM, lalu kita lepaskan dengan MMI (dewan pengajar). Jadinya DM tidak representatis bagi sivitas akademika, juga tidak representatif bagi mahasiswa, karena hanya fakultas-fakultas yang besarlah yang bisa memiliki wakil di DM. Saya dulu dari fakultas kecil, saya tidak punya wakil di DM itu representatif bagi *interest group*, representatif bagi kekuatan-kekuatan di luar jadi wajar saja kalau banyak kepentingan luar kampus yang masuk kampus lewat DM.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk lembaga perwakilan yang benar benar representatif bagi sivitas akademika. *Senat Perguruan Tinggi* itu terdiri atas wakil-wakil mahasiswa dan staf pengajar. *Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi* adalah wakil-wakil dari mahasiswa, dan *Senat Pengajar Perguruan Tinggi* adalah wakil-wakil dari staf pengajar. Semua fakultas besar atau kecil harus terwakili. Jadi benar-benar representatif.

Hubungannya dengan rektor? Senat, baik SMPT atau pun SPPT adalah mitra rektor. Kalau rektornya *nggak* *bener* bisa saja Senat mengkritik. Tapi jangan minta kewenangan yang berlebihan, misalnya memaksa kehendak untuk menentukan yudisium. Dalam hal non akademis, Senat bisa mengajukan keberatan soal SPP ke rektor. Non akademis dan persoalannya di luar kampus, membuat *pernyataan politik*? misalnya. Bisa saja membuat pernyataan politik, asal keseluruhan anggota Senat, SMPT dan SPPT mempunyai satu pendapat. Tetapi kalau mau mewakili PT harus bersama PT. Bersama rektor karena rektor adalah mitra rektor.

Kalau Senat dimasuki oleh kepentingan luar kampus? Bisa saja, *apa sih* yang *nggak* bisa disalahgunakan oleh manusia. Manusia itu makhluk yang paling mahir menyalahgunakan, tapi tanyalah apa yang didiskripsikan sebagai mana mestinya. Saya tanya: sepatu itu dibuat untuk apa? Untuk kaki kan. Kemarin itu ada berita sepatu digunakan melempar hakim pada sebuah sidang.

Jangan kamu samakan kondisi tahun 66 dengan sekarang. Sudah banyak yang berubah. Kamu kuliah bayar berapa sih setahun? Nah, cuma Rp. 190.000,- setahun. Kamu tahu, berapa uang yang dikeluarkan pemerintah untuk menyekolahkan kamu per tahunnya. Jauh di atas itu. Investasi pemerintah itu jangan sampai mubazir, manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Telah terjadi salah kaprah, yang namanya aktivis itu hanya mereka yang di bidang politik. Istilah ini sebenarnya juga berlaku bagi mereka yang aktif di bidang kesenian, olah raga, diskusi dan lain-lain. Terus terang saja, saya bisa menunjuk kasus-kasus di mana calon drop out justru para aktivis. Makanya kalau mau DO, cepet-cepet saja jadi aktivis.

Didik

LETJEN SOEKARTO

Gubernur Lemhannas

HARUS
LEBIH
BIJAK

BURHAN

Setiap periode perkembangan bangsa dan negara, pemuda khususnya mahasiswa telah memberikan andil yang penting. Karena mahasiswa adalah golongan yang mempunyai daya pikir tinggi, penalaran tinggi. Lagi, mahasiswa belum banyak terlibat oleh hal-hal yang bersifat pragmatis, sehingga idealismenya pun juga tinggi. Karena pemikiran-pemikiran yang kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara perlu ditumbuhkan.

Sebagai elit pemuda, mahasiswa jika tidak memiliki cita-cita tinggi lagi, tidak idealisme lagi, dan tidak kreatif lagi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bergairah lagi. Karena masa depan adalah milik kaum muda, termasuk mahasiswa.

Tapi bukankah mahasiswa kerap dituduh berlaku destruktif, misalnya dengan adanya peristiwa tahun 1974 dan 1978? Memang tidak bisa dipungkiri mahasiswa mempunyai potensi yang besar. Namun karena jiwa mudanya, mahasiswa ingin serba cepat, ingin perubahan segera terjadi. Dia lupa bahwasanya pembangunan yang dilakukan pemerintah memerlukan waktu. Lain dari itu masalah yang dihadapi pemerintah sangat banyak, sementara pikiran, tenaga dan dana sangat terbatas.

Mahasiswa memang "belum" banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat. Sehingga kadang-kadang dia kurang memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam masyarakat maupun manajemen pemerintahan. Keadaan demikian ditambah dengan idealismenya membuat dia jadi manusia yang serba tidak puas dan ingin cepat melakukan perubahan.

Tidak bisa dipungkiri sifat orang muda ya seperti itu. Tetapi kami berharap, demi keberlangsungan sejarah, mahasiswa harus memiliki rasa bijak dan kemandirian yang lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Mahasiswa harus menyadari akan posisinya yang strategis. Jangan sampai hanyut pada usaha-usaha yang kelihatannya memberi posisi yang menonjolkannya. Karena sebenarnya di balik usaha seperti itu, tanpa disadari akan merugikan mahasiswa sendiri, karena tujuan dan sasarannya berbeda.

Mahasiswa hendaknya tidak mudah hanyut oleh orientasi-orientasi jangka pendek, misalnya kehendak untuk mengubah tatanan. Pandai-pandailah melihat yang lebih jauh ke depan. Sehingga tidak terbuai oleh sesuatu yang kelihatannya baik untuk saat ini, tetapi sebenarnya berdampak sangat negatif pada masa yang akan datang.

Mahasiswa mudah hanyut, apakah ini tidak disebabkan oleh kurangnya dia mendapat informasi yang benar? Saya pikir persoalannya bukan itu. Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah ada. Arahan strategi politik nasional pun juga sudah jelas, yakni Pancasila dan UUD 45. Kita semua harus menggunakan referensi ini dalam berperilaku politik. Kenapa harus bingung tatanan dan strategi politik nasional sudah jelas?

Dikaitkan dengan soal alih kepemimpinan nasional misalnya. Mekanismenya kan sudah diatur dalam UUD 45. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana mekanisme itu harus berjalan, meskipun banyak hal-hal yang membingungkan melalui berbagai informasi, kita akan tetap mantap.

Masalahnya kita seringkali dihanyutkan oleh hal-hal yang tidak proposional. Misalnya harus menyangkut *siapa, siapa dan siapa*. Kalau kita sudah terpengaruh oleh informasi-informasi macam itu, berarti kita telah dihanyutkan oleh hal-hal yang tidak proposional. Ini jelas akan merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kelak.

Agar hal-hal macam itu tidak menjangkiti mahasiswa, maka mahasiswa perlu memperluas wawasannya. Dalam arti mahasiswa makin dewasa berfikir dan lebih bijak dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan demikian tidak mudah termakan oleh hal-hal yang mengaburkan suasana. Jadi sebenarnya apa pun yang ada bisa dianalisis dan dikembalikan dengan referensi baku.

Yang kita harapkan sikap kedewasaan mahasiswa yang bisa mengatur diri. Dengan mengatur diri, berarti bisa melihat dengan lebih peka mana yang bisa dikemukakan secara terbuka, mana yang harus melalui "manuver-manuver" tertentu dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kader-kader bangsa ini dalam menyampaikan sesuatu mestinya harus melalui konsepsi-konsepsi yang matang. Tidak hanya sekadar spontan. Sebuah konsep yang tentu saja dilandasi oleh sikap akademis dan ilmiah, *wong* namanya masyarakat kampus. Sudah semestinyalah hal itu bisa dicapai.

Melalui forum-forum dialog konsepsi-konsepsi mahasiswa atau aspirasi-aspirasi yang hendak disampaikan tentunya akan bisa diterima. Tentunya dialog yang saya maksudkan adalah dialog yang bersuasana akrab. Kenapa mesti akrab? Karena dengan suasana seperti itu akan mempermudah proses komunikasi antara mahasiswa dengan pihak-pihak resmi. Suasana akrab tidak akan tercipta kalau masing-masing pihak tidak bisa mengendalikan diri secara proposional. Apalagi kalau masing-masing pihak sudah pasang kuda-kuda terlebih dahulu, misalnya ya... susah.

Ibarat anak mau bicara sama ayahnya, kalau tanpa *unggah-ungguh* ya tidak berkenan di hati sang ayah. Anak belum ngomong apa-apa, sang ayah malah sudah marah lebih dahulu. Jadinya ya *nggak* ada hasilnya. Mestinya kalau mau bicara sama ayah kan pakai prakata yang enak dan jujur.

Apakah hal itu berarti feodalisme? Saya pikir lain. Tata cara atau adat istiadat jangan langsung diidentikkan dengan feodalisme. Jadi mahasiswa sekarang harus lebih bijak, lebih arif. Sebab kalau tidak ada yang demikian berarti tidak ada kemajuan.

Didik

WAHONO
Ketua Umum Golkar

MAHASISWA DAN CENDIKIAWAN DUKUNG GOLKAR

DOK BALAIRUNG



Tahun 60 sampai 65 merupakan saat klimak ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Kekuatan negara terkonsentrasi di tangan presiden, sementara partai politik sibuk berkonflik untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kenyataan ini mendorong ABRI (terutama AD) dan segenap organisasi kemasyarakatan mencari saluran politik baru, yakni dengan membentuk Sekretaris Bersama Golongan Karya. Di Sekber GOLKAR inilah dapat dilihat keterlibatan tokoh-tokoh mahasiswa angkatan 66 dalam proses pembentukan GOLKAR. Karena itu tidak heran apabila banyak tokoh mahasiswa 66 yang ikut aktif mendukung GOLKAR sampai sekarang.

Tapi tidak benar kalau dikatakan GOLKAR tidak mendapatkan dukungan dari mahasiswa selain angkatan 66. Justru GOLKAR mendapat dukungan dari mahasiswa dan cendekiawan. Karna dukungan itulah GOLKAR memperoleh masa terbanyak pada setiap pemilu.

GOLKAR harus memperhatikan generasi muda termasuk mahasiswa oleh karena, pertama: generasi muda termasuk mahasiswa adalah lapisan masyarakat yang masih dalam proses mengembangkan diri dan mencari eksistensi. Kedua: dalam proses itu dibutuhkan transformasi nilai, wawasan dan pengetahuan untuk memantapkan pemikiran, sikap dan pandangan. Sedang yang ketiga: generasi muda termasuk mahasiswa adalah perjuangan cita-cita bangsa. Mau tidak mau mereka harus melanjutkan kepemimpinan bangsa ini kelak.

Dalam konteks dan harapan itu, GOLKAR merumuskan dua kepentingan pokok pada mereka. Pertama: *pendidikan politik*, yakni GOLKAR berperan mensosialisasikan nilai-nilai, wawasan, pandangan dan perilaku politik yang bersumber dari Pancasila dan UUD 45. Kedua: *komunikasi politik*, yakni GOLKAR akan senantiasa mengikuti, mendengar dan menyalurkan aspirasi politik mahasiswa kepada supra struktur politik, demikian pula sebaliknya.

Keduanya saya anggap sebagai kepentingan GOLKAR kepada generasi muda termasuk mahasiswa dengan tujuan agar mereka dapat memantapkan kesadaran politiknya sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban politiknya secara baik dan benar. Tetapi persoalannya terletak juga pada mahasiswa sendiri. Seberapa jauh kesadaran mahasiswa dalam memandang momentum dan peluang yang diberikan GOLKAR itu sebagai kesempatan strategis untuk membina dirinya.

Apakah karena posisinya yang strategis itu mahasiswa bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang sedang berebut untuk mendapatkan posisi tertentu seperti yang dituduhkan pada gerakan mahasiswa tahun 1974 dan 1978? Saya tidak melihat hubungan gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 dengan konflik politik tingkat elit. Kenyataannya gerakan mahasiswa pada tahun-tahun itu belum dewasa dalam bertindak saja.

Bedanya dengan gerakan mahasiswa 1966? Kalau kita melihat munculnya angkatan 66 itu tidak semata-mata tuntutan subyektif masyarakat termasuk mahasiswa. Tuntutan itu obyektif, karena Pemerintah Orde Lama dan partai politik saat itu telah banyak bahkan sedemikian jauh menyelewengkan Pancasila dan UUD 45. Hati nurani rakyat Indonesia telah menyatu dengan Pancasila dan UUD 45, maka serta merta semua pihak termasuk mahasiswa bangkit melawan.

Akan tetapi apabila pemerintah beserta segenap perangkat politik senantiasa berdiri di atas Pancasila dan UUD 45, maka bentuk-bentuk perlawanan apapun tidak akan bisa menang karena berhadapan dengan kehendak rakyat. Perjuangan Orde Baru dalam pembangunan dan pembaharuan terutama di tahun 1970-an berlangsung demikian cepat, maka terkadang sebagian kecil masyarakat belum sepenuhnya beradaptasi. Saya anggap hal itu wajar-wajar saja. Jadi menurut saya gerakan mahasiswa di tahun 1970-an itu karena refleksi ketidakdewasaan sikap mahasiswa.

Lalu distruktifkah gerakan mahasiswa pasca 1966 itu? Begini, dalam memperjuangkan kehendak atau misi masyarakat, termasuk mahasiswa, terdapat dua hal yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Pertama: aspirasi atau misi harus jelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini akan menunjukkan kebenaran dari kehendak atau misi yang hendak diperjuangkan itu. Kedua: aspirasi atau misi itu harus diperjuangkan sesuai hukum, prosedur, aturan yang berlaku serta tata krama kita sebagai orang yang tinggi nilai-nilai budaya.

Apabila kedua hal di atas dapat dilakukan secara sempurna, maka sesungguhnya masyarakat atau mahasiswa telah melaksanakan dan menyalurkan aspirasi atau misinya secara konstruktif. Akan tetapi sebaliknya, di mana kedua hal di atas salah satu di antaranya (aspirasi maupun caranya) kurang sesuai dengan Pancasila dan undang-undang serta aturan-aturan lainnya, maka sesungguhnya masyarakat atau mahasiswa telah melakukan hal-hal yang distruktif. Karena baik esensi aspirasi dan cara memperjuangkan aspirasi ini harus sesuai dengan jiwa serta isi dari Pancasila dan UUD 45 serta peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita ini.

Sedang bila ditanya tentang gerakan mahasiswa tahun 1988-1989 yang lalu, saya kan menjawab: tidak ada gerakan mahasiswa pada tahun-tahun itu yang ada hanyalah kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke lembaga legeslatif untuk menyampaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang mungkin dihadapi. Hal ini adalah baik, karena dengan demikian aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik ke lembaga-lembaga pengambil keputusan. Perkembangan demokrasi Pancasila akan makin mantap. Memang pembangunan membawa perubahan, dan perubahan banyak membawa masalah. Adalah baik kalau masalah-masalah itu dapat diajukan kepada lembaga-lembaga legeslatif untuk menampungnya.

Didik

SOFYAN WANANDI

Pengusaha



CINA BISA LARI

Situasi sekarang jauh berbeda dengan tahun 60-an. Mahasiswa sekarang lebih banyak diarahkan pemerintah untuk berkonsentrasi pada belajar, agar cepat lulus, lalu ikut aktif dalam pembangunan. Ya itu baik karena situasi normal. Cuma, yang terpenting mahasiswa harus tetap peka terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Bagaimana pembangunan ini dilaksanakan? Banyak persoalan yang harus ditelaah secara kritis, misalnya melalui diskusi dan seminar. Masalah tanah dan pengurusan memang perlu disuarakan, misalnya kasus Kedungombo itu.

Dalam hal seperti ini, saya rasa mahasiswa Universitas Gadjah Mada lebih baik dari pada mahasiswa Universitas Indonesia. Saya meninggalkan UI 20 tahun yang lalu, tapi saya nggak kaget membaca laporan *Kompas* tentang mahasiswa UI yang materialistik dan suka glamour. Namun terus terang hal ini di luar perkiraan saya sewaktu menjadi mahasiswa. Dulu saya dan teman-teman asal kumpul saja, di warung kopi atau di mana saja, kita ngobrol tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Kita selalu concern terhadap masalah-masalah sosial. Di tempat-tempat macam itu pula kita biasa mendiskusikan, bagaimana menghadapi CGMI misalnya. Atau isu-isu apa yang sedang berkembang dan bagaimana kita mengantisipasinya.

Tetapi sekarang kok nggak. Mahasiswa kumpul membicarakan soal disco, soal ngeceng. Ok saja, zaman sudah berubah dan mahasiswa memang harus belajar, tetapi jangan lupa dong situasi masyarakatnya. Karena situasi normal itu mahasiswa UI seperti sekarang ini? Situasi memang normal, tetapi toh banyak hal yang tidak benar terjadi di sekeliling kita. Soal proses peradilan. Bagaimana bisa mendapatkan keadilan kalau hakim bisa dibeli.

Lalu kalau melihat situasi politik, masalah keterbukaan penciptaan suksesi sangatlah penting. Apakah masih tetap Pak Harto atau harus pemimpin lain yang harus dipikirkan? Secara alamiah pun Pak Harto akan turun dari kursi kepresidenan. Apakah bisa secara konstitusional proses suksesi nanti? Adakah pemikiran dari mahasiswa, konsep apa yang terbaik. Dulu keadaannya tidak seperti sekarang ini. Seperti Bung Karno sebelum diangkat jadi presiden, sudah jadi pemimpin nasional. Pak Harto juga, sebelumnya dia Panglima Kostrad dan Pejabat Sementara Presiden. Jadi mereka ini sudah jadi pemimpin nasional dulu sebelum menjadi presiden. Tidak seperti sekarang ini, yang akan jadi presiden orang biasa saja dan boleh siapa saja. Persoalan suksesi harus dipikirkan dan dibicarakan secara terbuka, asal jangan dilatarbelakangi oleh *vested interest* tertentu.

Masalah terpenting di bidang ekonomi adalah *employment*. Harus ada keseimbangan antara usaha besar dengan yang kecil. Yang kecil harus benar-benar dibina biar menjadi besar. Hal ini penting untuk mengatasi *employment*. Perusahaan-perusahaan yang besar, baik secara organisasi maupun struktur ternyata tidak sebesar yang kita kira. Mereka besar karena dapat kredit dari bank serta didukung

situasi baik. Jika dibandingkan dengan perusahaan luar negeri mereka itu belum apa-apa, paling satu atau dua yang dapat berkompetisi.

Kalau bicara soal ekonomi persoalan ras harus segera dihilangkan. Kalau dibilang orang-orang tua Cina menguasai perekonomian Indonesia toh tidak benar. Peran terbesar masih dipegang BUMN, 70% uang Indonesia itu dikuasai oleh bank-bank milik pemerintah. Tidak peduli Cina, Batak Jawa atau yang lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Dalam dunia usaha Cina memang lebih berpengalaman. Kenyataan ini tidak lepas dari kebijaksanaan penjajah Belanda dulu. Saat itu Cina mendapat kesempatan yang lebih dari pada penduduk asli. Jadi wajar saja kalau mereka sekarang lebih berpengalaman. Kalau mereka bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah *employment* dan mau membayar pajak sesuai aturan, *why not. Make the best of it.*

Ada memang yang besar karena fasilitas dari pemerintah, misalnya Indocement. Tetapi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Salahkan dong yang memberi fasilitas. Toh yang mendapat fasilitas bukan hanya orang-orang Cina. Berapa anak pejabat atau orang yang dekat dengan pejabat tiba-tiba jadi pengusaha besar. Bukan hanya anda atau yang lain, tetapi banyak pengusaha yang pusing karena otoritas dari kelompok tertentu di dunia usaha. Saya setuju kalau soal konglomerasi atau monopoli itu dibuat aturan main yang jelas. Tidak seperti sekarang ini.

Seandainya kekuatan ekonomi Cina dijadikan tema gerakan mahasiswa? Kalau mahasiswa menakut-nakuti, mereka bisa lari. Dan seandainya itu yang terjadi, kita akan rugi secara nasional. Coba kita hitung: Gudang Garam punya buruh sekitar 34.000, Astra dan Salim Group masing-masing punya buruh 100.000. Kalau perusahaan mereka ini saja tutup, berapa orang yang kehilangan tenaga kerja. Ini dari sisi *employment*. Dari sisi investasi, mereka tidak akan lakukan investasi di sini, bila mereka dimusuhi. Di sini tidak aman, mereka bisa pindah duitnya ke Singapura atau negara lain. Uang itu tidak mengenal nasionalisme, mudah saja bagi mereka untuk melarikan uangnya dari sini.

Yang paling penting jangan berkesempatan, siapa pun mereka untuk melakukan praktek-praktek monopoli. Karena itu aturannya harus jelas. Pemerintah juga harus konsisten dengan aturan yang dibuat. Kritik dan salahkan pemerintah, kalau memang membuat kesalahan, seperti soal fasilitas tadi. Kalau pemerintah mau Lim Sioe Liong mati, mudah saja kok, tutup saja pabrik-pabriknya, atau lakukan nasionalisasi. Mahasiswa tidak perlu bergerak menakuti-nakuti dia.

Kalau ada yang menggerakkan mahasiswa untuk menakuti-nakuti mereka? Ah, mahasiswa itu kan orang pinter, masa mau digerakkan begitu saja. Sebelum bergerak mestinya kan berpikir, mana yang baik mana yang buruk bagaimana dampaknya dan lain-lain. Jangan mau digerakkan oleh kelompok lain, apa itu konglomerat, parpol atau militer. Kamu bisa digebukin tentara, sementara mereka yang untung. Gerakan mahasiswa harus spontan.

Didik

KONGLOMERASI BUDAYA DI UGM

Tak pernah saya melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan satu tangan kalau saya bisa melakukannya dengan dua tangan
(Charles Dickens)

Konglomerasi tampaknya mulai melanda kota "kecil" Yogyakarta. Kota yang pernah mendapat predikat pusat pendidikan dan budaya ini mulai menjadi ajang pertempuran ekonomi pemodal kuat. Supermarket yang sepuluh tahun lalu sulit ditemukan di kota ini, kini bermunculan bak cendawan di musim cendawan. Bahkan daerah sekitar jalan tembus *Rahayu-Syantikara* yang terhambat (tepatnya dihambat) pun menjadi incaran konglomerat. Belum lagi gejala menjamurnya bank, hotel, penambahan jam terbang dan taksi.... Selera penduduk pusat tradisi Jawa ini mulai juga dikerlingkan oleh makanan-makanan "internasional", mulai dari *ice cream*, *pop corn*, *hamburger*, *hot dog* dan lain-lain. Mungkin cuma jenis musiman seperti *pisang molen* Priangan yang bisa sementara ini eksis, khususnya bagi yang suka *kongko-kongko* tapi melarat.

Konglomerasi dunia pendidikan tampaknya malah dimulai di kawasan ini. Tengok saja pendirian *SMA Taruna Nusantara*, yang merupakan gabungan dari "kehendak"

Mabes ABRI dengan rekannya Perguruan Tinggi "perintis" Taman Siswa. Maunya SMA ini menciptakan *bibit unggul* untuk "di-jadikan" pemimpin bangsa. Semoga nanti tidak *amburadul* atau malah menciptakan *bibit mandul*.

Di kalangan mahasiswa dulu sempat diributkan tentang "permintaan" membaurnya semua ormas kepemudaan dalam KNPI, sebuah konglomerat resmi. Kini pasca NKK-BKK kita melihat usaha pemunculan kembali wadah kegiatan tingkat universitas yang bernama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Lain dengan KNPI, SMPT tampaknya memang banyak diharapkan kehadirannya. Tidak berbahaya? Rupanya di negeri ini masih banyak orang arif yang tidak bergesa-gesa melontarkan kata "berbahaya".

Lalu bagaimana dengan budaya? Bukankah terjadi juga penyatuan-penyatuan alias konglomerasi? Ya, dan bukankah semua di atas secara luas bisa juga disebut budaya? Meskipun demikian, dalam arti yang sempit setahun yang lalu kita melihat banyak aksi-aksi demonstrasi anomik, yang merupakan

gabungan dari setidaknya mahasiswa pelbagai fakultas, perguruan tinggi, kelompok diskusi, kelompok seni serta unsur-unsur ormas.

Tetapi apakah ini termasuk konglomerasi dalam konsep liberal? Atau asosiasi? Atau korporasi? Atau malah kolaborasi? Mungkin rancau, sebagaimana beberapa gejala lain juga rancau, seperti konsep itu sendiri juga rancau. Namun setidaknya kita tidak merasakan lagi *band-band* dalam negeri fakultas atau jurusan. Kita jarang menikmati "seniman-seniman" dari berbagai fakultas atau jurusan atau kelompok kreatif kecil lainnya. Kita lebih sering melihat kelompok kesenian "elit" dari metropolis yang cenderung muncul atau diundang. Tarulah misalnya panggung *Economic Jazz Live* yang "sukses" hingga digelar beberapa kali, walaupun pementasan ini hasil *jiplakan* dari tempat lain.

Yang jelas memang ada gejala kecil pada budaya di kampus biru yang bertentangan dengan gejala dan harapan dunia ilmu. Kalau dalam dunia ilmu kita mulai bangga dengan kapasitas para mahasiswa dan pakar yang hanya bertindak sebagai nara sumber, dalam dunia budaya, khususnya seni budaya, para mahasiswa Gajah Mada justru mulai mengundang para "budayawan" sebagai peran utama, dan —tentu saja— mahasiswa bertindak sebagai penyelenggara. Tidak hanya *Economic Jazz Live*, tetapi juga *Cemara Tujuh* yang sudah barang tentu mempunyai tujuan tertentu. Di samping itu dapat dibandingkan pula bentuk konglomerasi lain, yakni *Wayang Kontemporer*, serta bentuk lain lagi: *Kelompok Bulak Sumur (KBS)*. Tiga wadah ini hendak kita intip sekilas, sekedar untuk membaca gejala. Siapa tahu ada "konglomerasi" dalam bentuk lain.

Cemara Tujuh

Rasanya tidak ada mahasiswa UGM yang tidak pernah mendengar tentang Forum Budaya *Cemara Tujuh*. Forum ini telah



CEMARA TUJUH : Dari kumpulan-kumpulan, lalu mengumpulkan Rendra dan Djodi.

melakukan gebrakan-gebrakan yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh kelompok seni mana pun di kota ini dalam dasawarsa terakhir ini.

Bermula dari sekedar kumpul-kumpul, timbul dialog antara para mahasiswa apresiator 'budaya'. Lebih-lebih setelah sering menyaksikan pentas-pentas di Fakultas Sastra. Kemudian muncullah *nyanyi-nyanyi* di depan Gedung Pusat, Malam Chairil Anwar, Hari Hak Asasi Manusia, dan lalu digebrak dengan Diskusi Kebudayaan, yang menghadirkan **Rendra** dan sejumlah pakar kebudayaan lainnya. Acara terakhir ini dikoordinasi oleh **Marjana**, dengan dibantu oleh **Herlambang** serta kawan-kawan yang lain.

Kemudian, yang menjadi klimaks, kalau bukan antiklimaks, ialah pementasan "*Selamatan Anak Cucu Sualiman*". Naskah baru yang disutradarai dan diperanutamakan oleh **Rendra** ini menjadi begitu menggelekar, karena untuk pertama kalinya di Yogya ada sebuah karcis teater dihargai sebesar lima-sepuluh ribu rupiah, dengan memakai gedung yang "wah" pula untuk teater, yakni di lokasi Candi Prambanan. Acara ini dikoordinasi oleh **Yudi Hermawan** dengan dibantu **Natalia Susiyanti** dan kawan-kawan. Sayangnya enonton teater "simbolik" yang nampaknya bertemakan "konglomerat" ini dibandingkan kapasitasnya dapat digolongkan sepi penonton, bahkan satu hari acaranya sempat dibatalkan karena hujan. Nama **Rendra** dan penggunaan kembang api yang "wah" ini cukup mengejutkan. Tapi **Yudi** menyayangkan batalnya tindak lanjut yang tak kalah pentingnya, yakni **workshop** bersama **Rendra** di pantai.

Adapun **Yayan Sofyan** mengemukakan bahwa konsep **Cemara Tujuh** ialah kekecewaan atas bekunya kebudayaan. Padahal untuk adanya kreativitas diperlukan sikap yang cair. Dan cairnya **Cemara Tujuh** dapat kita lihat dengan tak jelasnya pengurus bahkan tak jelasnya keanggotaan. Demikian pula dengan sumber dana, dan jangan tanya lagi tentang pengawasan yang jelas. Setelah **Cemara Tujuh** hendak diformalkan, sekber kesenian, entah karena apa, merasa keberatan. Pak **Koesnadi** (Rektor UGM waktu itu) juga akhirnya tak setuju, karena menganggapnya terlalu eksklusif dan ngambang. Yang merepotkan lagi, tujuan para pendukung **Cemara Tujuh** ini juga macam-macam, ada yang ingin memprioritaskan pentas, ada yang ingin menekuni teori kebudayaan. Menurut **Herlambang Cemara Tujuh** mempunyai maksud baik menyediakan wadah bagi segala bentuk kreativitas. Tapi kita memang dapat melihat, bahwa kecairan yang terlalu cair

juga sulit menelorkan umpan balik yang jelas. Apakah ini berarti mereka mencoba "melawan konglomerasi dengan konglomerasi"? Selama konglomerasi masih dapat diterjemahkan dengan arti yang positif, ada baiknya kita tidak tergesa-gesa menyangkalnya.

Wayang Kontemporer

Masih ingat **Gitalaksita**? Segudang unit dalam Sekber kesenian UGM berpadu membawakan episode-episode bersejarah, dari momen ke momen, dari kota ke kota. Lepas dari isi, kualitas, dan keterpaduannya, ide mempertemukan pelbagai kelompok kesenian ini patut dipuji.

Adalah **Bambang Paningron** yang punya andil untuk menggabungkan beberapa unit kesenian UGM untuk memasyarakatkan wayang. Idenya muncul dari pertemuannya dengan **Sukasman** yang menggarap wayang (purwa) dengan banyak teknik baru khususnya dalam penampilan. Kebetulan wayangnya **Sukasman** masih dalam satu bentuk. Nah, **Bambang** secara kompak melibatkan tiga cabang kesenian, tari, teater, dan marching band. Mengapa begitu?

Menurutnya, orang yang cinta wayang masih bisa dihitung. Itu pun mereka memilih-milih adegan yang enak ditonton. Mula-mula ia diminta untuk mengisi acara 17-an di Balaiung UGM. Maka disusunlah satu paket manis dua jam-an, dua dalang, dan dua sisi lampu disko, dengan nama Wayang Kontemporer. Mereka pun sempat pentas ke luar.

Mahasiswa FISIPOL UGM ini ternyata mampu menyiasati wayang yang bernilai luhur ini sehingga lebih digemari generasi muda. Ternyata penggabungan beberapa bentuk kesenian yang sering dilecehkan ini mampu menarik perhatian, asal digarap dengan tepat. Artinya, pengatur laku paling tidak harus tahu benar perihal wayang, tahu perihal tata panggung, tahu perihal tata lampu, serta tahu menyelaraskan pelbagai cabang seni supaya tidak *overcommunicate* sehingga melelahkan penonton.

Ini barangkali tidak tergolong dalam "konglomerat", karena tidak terdiri dari elit-elit. Tapi bila gabungan ini sudah menjadi elit, belum tentu dapat dibedakan apakah ini konglomerat atau —misalnya— kooperat.

Kelompok Bulak Sumur

Kalau anda mahasiswa UGM dan belum pernah dengar Kelompok Bulak Sumur (KBS), namanya *kebuangeten*. Kelompok ini formalnya merupakan kelompok gabungan dari pelbagai aliran senilukis, ya kartun, sketsa, naturalis, realis, surealis, dan "alis-alis"

lainnya. Bila **John Naisbitt** dan **Patricia Aburdene** mendasarkan prediksinya tentang ledakan kesenian dalam *MEGATREND 2000-nya* berdasarkan *Art Boom* di Amerika Serikat dan **KOMPAS** menunjukkan data di kota metropolitan Jakarta, maka "demam" lukis-melukis sebenarnya tidak terjadi di UGM lebih dari tiga tahun yang lalu. **Gendon Soebandon** (Pak Sastra), yang merupakan pendiri dan ketua KBS pertama kalinya, menjelaskan bahwa awal mulanya ialah sebuah pameran lukisan di Fakultas Sastra tahun 1986, yang diikuti oleh 20 orang. Ternyata banyak mahasiswa Fakultas Sastra yang berhobi melukis. Mungkin bukan hanya karena dekatnya humaniora dengan seni, tapi ternyata seni gambar itu dibutuhkan oleh jurusan tertentu seperti Arkeologi. Pada bulan Maret itu terkumpul 111 lukisan, dipamerkan di gedung UC UGM. Banyak juga mahasiswa dari lain fakultas yang menyaksikannya. **Indro Suseno**, waktu itu Ketua Sekber Kesenian UGM, terdorong untuk mengajak rekan-rekan pameran bersama (semua fakultas). Lalu pada bulan Desember diselenggarakan Pameran Lukisan Bulaksumur oleh 25 mahasiswa dengan 100 lukisan. Menanggapi sambutan publik, pada bulan Januari 1987 dibentuklah suatu kelompok yang berhobi serupa itu dengan sebuah nama, terutama atas pertimbangan keakraban, Kelompok Bulak Sumur (KBS). Kelompok ini merupakan bagian —mungkin paling aktif— dari Unit Seni Rupa.

Selanjutnya KBS mengadakan pelbagai kegiatan : nyeket bersama di pelbagai tempat, kursus cangkil kayu, pameran lukisan rutin tiap tahun, bursa kartu "resmi" lebaran, pameran kartun (yang kualitas belum merata), serta tentu saja saling asah bersama, karena tidak ada pengajar khusus. Kini KBS, yang terbuka untuk mahasiswa UGM, dipimpin oleh presidium dengan ketuanya **Eggy Yunaidi**.

Kalau kita perhatikan kelompok inipun berasal dari kelompok yang belum dikatakan besar, lalu bergabung — atau katakanlah meluas. Seperti Wayang Kontemporer, mungkin terlalu tergesa menyebut KBS sebagai konglomerat budaya, karena sekalipun kebesaran Gajah Mada pun digunakan, kelompok ini membutuhkan juga keahlian individu para anggotanya.

Tiga (corak) kelompok tersibak sudah. Lalu apa? Dapatkah kita menyimpulkan ada gejala konglomerasi budaya? Apa pun namanya, konglomerasi, kooperasi, kolaborasi, atau bahkan konsentrasi, pola hidup globalnya **John Naisbitt** kini menunjukkan bahwa bukan saja pola komunis menjadi usang, tapi juga sebaliknya : pola individualis. Hassanto

MENCARI PENGGANTI UDANG

Di pasaran Eropa harganya mencapai 21,06 dolar. Kakap putih, ditemukan pertama kali oleh BBL Lampung

Masa jaya udang usai sudah. Hal ini ditandai dengan makin merosotnya harga. Pengusaha kita benar-benar terjebak oleh hukum ekonomi: bila permintaan lebih besar dari penawaran, harga naik. Sementara penawaran yang lebih besar, maka harga akan turun. Anti klimak ini ditunjukkan dengan satu dua pengusaha udang yang gulung tikar atau pindah ke jenis komoditi lain.

Harapan pengganti udang yang kian jenuh itu ternyata sudah ada. Ikan kakap, kakap putih khususnya. Jenis ikan ini termasuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kakap putih yang bahasa Latinnya *Lates Calvarifer* ini biasa disebut *akame* atau *seabass*. (Orang Papua New Guinea memainkannya *barramundi*). Menurut **Infofish Trade News** edisi Nopember 1989 lalu, harga kakap putih di pasar internasional berkisar antara 2,88 sampai 4,00 US \$ per kilogram. Bahkan di pasaran Eropa harganya bisa mencapai 21,06 US \$.

Adalah Balai Budidaya Laut (BBL) Hanura terletak di desa Hurun, Kec. Pangcermin, Lampung yang telah menyiapkan kakap putih untuk dibudidayakan dalam rangka diversifikasi komodite ekspor. Instansi pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Ditjen Perikanan Departemen Pertanian ini juga sedang melakukan uji coba terhadap ikan kerapu dan kakap merah. "Kalau yang terakhir ini berhasil, ini akan merupakan satu-satunya atau yang pertama," kata Ir Kisto Mintardjo, Direktur BIL. Maksudnya mendahului Thailand, Philipina atau Singapura.

Sedang ikan kakap putih sendiri baru dikatakan berhasil setelah melakukan uji coba selama satu tahun. Jenis ikan ini memang memiliki keistimewaan. Dia bersifat *kata dromous* atau *euryhaline* dalam siklus hidupnya. "Lingkungan hidupnya tidak dibatasi oleh perbedaan kadar garam," tegas Kisto. Pada masa muda (*burayak*) banyak di jumpai diperairan tawar. Warnanya coklat keemasan. Sedang yang dewasa, warnanya berubah hijau keabu-abuan

di sekitar garis punggung, lebih suka 'melaut'.

Dimulai dari pembenihan. Pekerjaan ini terbagi dalam tiga prosedur. Pertama: pemilihan induk (*brodstock maintenance*). Induk kakap putih dipelihara dalam bak permanen atau tambak maupun kurungan apung. Pakannya berupa ikan segar dengan takaran 2-5% berat total induk setiap hari selama 30 hari.

Kedua: pemijahan (*spawning technique*). Pemijahan kakap putih secara alamiah terjadi antara pukul 19.00 – 23.00 selama 1 – 8 hari setelah bulan terang atau gelap. Sedangkan telur yang memijah dan pembuahannya bertepatan dengan saat pertama tiba – berdasar pengalaman BBL – merupakan cikal bibit berkualitas sangat baik. Menjelang proses pemijahan, agar kondisi tubuh tetap prima induk ikan diberi menu vitamin E.

Untuk memproduksi benih kakap putih secara masal, menurut Ir. Kisto ada tiga cara, yaitu manipulasi lingkungan, rangsangan

dilakukan secara *intramuscular*.

Ketiga: pemeliharaan larva (*larva rearing*). Pada pekerjaan ini yang perlu diperhatikan mulai dari pemberian pakan, penggolongan larva dari umur 1-30 hari sampai dengan pengaturan *salinitas* dan temperatur air. Setelah mencapai umur 30 hari. Larva dipindah ke bak lain untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan yang lebih keras. Baru setelah berada pada kondisi prima, biasanya sekitar hari ke-40, benih-benih itu siap panen. Tetapi tetap harus ditangani secara khusus untuk menghindari stress akibat kontak dengan udara luar. Benih baru dapat bernilai ekonomis sesudah berumur antara 6-8 bulan.

Ada beberapa jenis pakan yang harus diberikan. Ketika larva berumur sampai dengan 15 hari pakannya berupa alga bersel satu

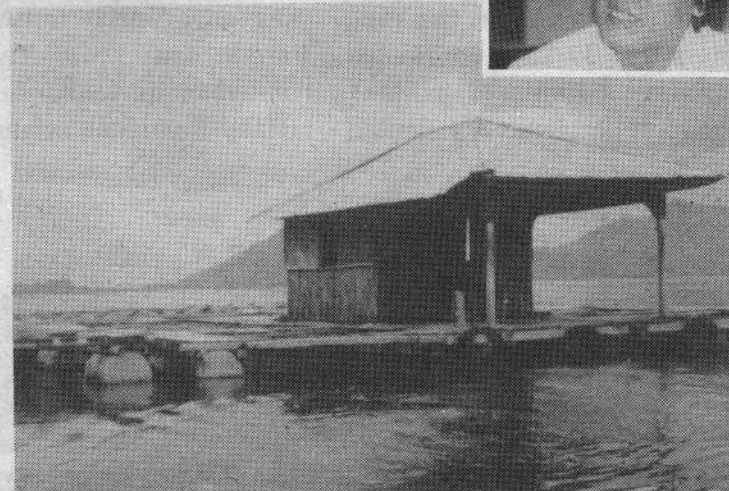
(*tetraselmis sp*) seterusnya jenis *rotifera* (*Brachionus sp*). Lima belas hari berikutnya disuapi dengan *Nauplii*

Artemia dan dilanjutkan *Artemia* setengah dewasa. Selanjutnya pada 15 hari ketiga, benih sudah boleh diberi menu cacahan ikan rucah segar maupun pellet basah.

Masalah pakan iakan merupakan persoalan yang rumit bagi BBL. Karena soal ini, "Kakap putih baru sukses sesudah setahun dimulai uji coba tahun 1987 lalu," kata Ir. Kisto, alumnus UGM ini. Begitu BBL berhasil melakukan uji coba terhadap ikan kakap

putih, ternyata hasrat swasta untuk mengembangkan kakap putih cukup menggembarakan. Menanggapi keinginan tersebut Kisto mengatakan: "Kami siap go public", Artinya, BBL Hanura siap alih teknologi budidaya laut, baik lewat promosi penjualan maupun memberikan kesempatan pelatihan/ training.

Bani & Lutfi



BBL HANURA : Pertama dan satu-satunya. Ir Kisto Mintardjo (inset).

hormonal dan pembenahan pakan. Tetapi "yang lebih nyata hasilnya jelas lewat penyuntikan hormon," turun Ir. Kisto lagi. Metode ini dianggap paling baik dan efisien karena untuk merangsang pemijahan, faktor resiko bagi si induk cukup kecil. Hormon yang diberikan adalah HCG (*human chorionic gonadotropin*) dan *puberogen*. Gunanya untuk mempercepat masa pemijahan. Sedang penyuntikan hormon

KALBAR

FISKAL DAN KEGELISAHAN RAKYAT PERBATASAN

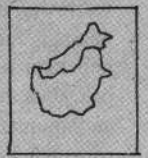
Setelah melakukan uji coba selama 6 bulan, awal April lalu Indonesia meresmikan penggunaan pintu masuk internasional ke Serawak. Tempatnya di Entekong, Kalbar, satu dari jalan setapak lain yang menghubungkan 55 desa dan 30 kampung kedua wilayah perbatasan Sarawak-Kalbar sepanjang 805 km. Inilah gerbang darat pertama yang dimiliki

Indonesia. Untuk mengetahui berbagai aspek yang melatar-belakangi diresmikannya jalur jalan yang menghubungkan kedua negara serta persoalan yang ada, wartawan BALAIRUNG *M. Burhan Bariton* dan *Abdul Rahman* mengumpulkan bahan-bahan di Kalbar dan menyusuri perbatasan melalui Pontianak selama dua minggu lebih.





SERAWAK



P. KALIMANTAN



Dari Jawa ya mas ?, dari Jakarta ? seru orang-orang yang duduk-duduk disudut ruangan ketika wartawan BALAIRUNG mendatangi mereka. Sementara beberapa teman mereka tampak sibuk mengangkut minuman-minuman kaleng dari negeri seberang keatas ojek (sepeda motor). Dibagian lain terlihat petugas bea cukai dan keamanan mondar-mandir berbaur dengan para pelintas batas sambil sesekali menyapa pengemudi mobil dari Malaysia yang telah selesai menjalani pemeriksaan imigrasi. Itulah pemandangan yang tampak di bangunan induk komplek pos perbatasan Entekong, desa kecil 320 km sebelah utara Pontianak.

Bangunan yang dirancang dengan sentuhan khas Dayak berupa *bentang* (rumah panjang) dan menelan biaya Rp. 750 juta itu, sesungguhnya kelihatan seperti barang asing, karena terletak di hutan perbatasan Kalimantan Barat - Serawak.

Beberapa tahun yang lalu orang harus menyusun jalan

setapak naik turun bukit dan mengarungi sungai untuk mencapai tempat itu. Tak cuma butuh waktu yang panjang namun juga jiwa petualang, kisah yang klasik dari perjalanan di pedalaman Kalimantan.

Namun sejak Oktober lalu Bangunan di Entekong itu telah diuji coba sebagai gerbang darat pertama pintu masuk kedua negara. Istilah hukumnya *Legal entry point*. Ini berarti orang dapat menggunakan Entekong sebagai pintu lalu lintas bepergian atau pulang dari luar negeri.

Bahkan lebih jauh kedua negara merencanakan pembangunan jalan raya, dan prasarana telekomunikasi dari Pontianak sampai ke Kuching. Kendaraan dari kedua negara dapat langsung melewati pintu tersebut menuju negara seberang. Pada masa mendatang adanya *highway* yang menghubungkan Indonesia, Serawak dan Brunai Darussalam bukan merupakan hal yang mustahil.

Pada masa uji coba inilah beberapa persoalan yang muncul akan di evaluasi kedua

negara, kalau keduanya tidak keberatan tentu saja pembukaan pintu ini akan dilanjutkan.

Paling tidak inilah realisasi dari perundingan panjang antara Indonesia - Malaysia melalui forum General Border Committee (Komisi Umum Perbatasan) yang ditandatangani 26 Mei 1984. Malah kalau mau ditelusuri lebih lanjut, kerja sama kedua negara sebenarnya telah dimulai sejak 1967, melalui permufakatan dasar lintas batas 26 Mei 1967.

Bagi Malaysia, pembukaan gerbang darat bukanlah pengalaman baru. Negara jiran itu selama ini telah biasa mengelola satu gerbang perbatasan dengan Singapura, 6 Gerbang perbatasan dengan Thailand dan satu lagi dengan Brunai Darussalam.

Namun bagi Indonesia inilah gerbang darat pertama. Walaupun Indonesia mempunyai tiga propinsi yang berhimpitan langsung dengan negara lain yaitu Kalbar, Kaltim, dan Irija, tapi belum satu pun yang dijadikan pintu masuk internasional macam di

Pelabuhan laut Tanjung Priok atau Bandara Cengkareng misalnya.

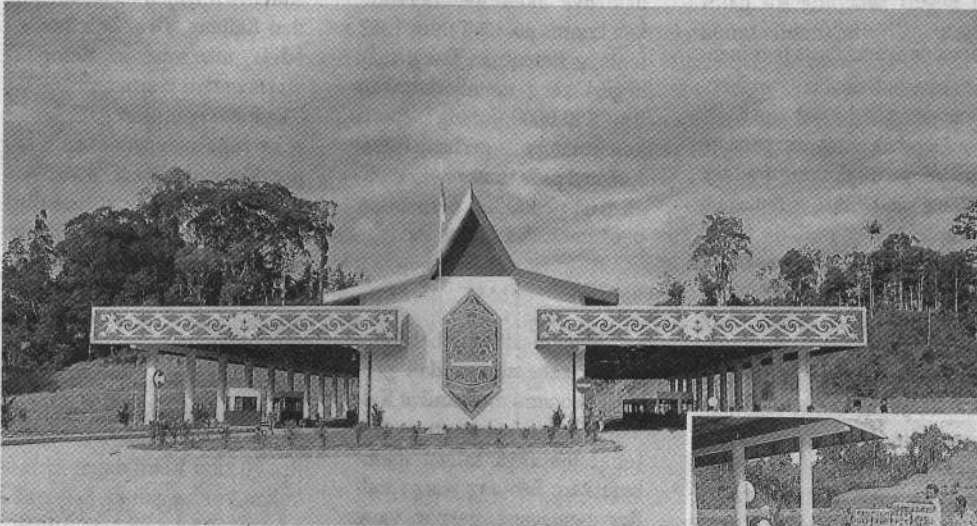
Indonesia sama sekali tak mempunyai pengalaman lintas perbatasan. Berbagai pendekatan mengenai soal-soal perbatasan selama ini cuma menghasilkan kesepakatan mengenai lintas batas tradisional saja. Lingkupnya terbatas pada pos lintas batas penduduk perbatasan atau *Border Crossing point*.

Berimpitnya batas kedua negara dapat menimbulkan persoalan rumit apabila tidak ditangani bersama. Masalah-masalah sosial politik, ekonomi, yang timbul dapat menimbulkan konflik regional apalagi kalau negara yang bertetangga tersebut memiliki latar belakang sejarah, ideologi dan orientasi kepentingan politik yang berbeda.

Indonesia - Malaysia memang tak memiliki perbedaan latar belakang sejarah dan ideologi sekontras Korea Utara dan Korea Selatan. Indonesia -



CITRA INTERNASIONAL: Penulis di wilayah Serawak Malaysia



POS ENTEKONG: *Rawan penyelundupan*

Malaysia justru merupakan satu bagian dari rumpun bangsa melayu yang mempunyai banyak persamaan.

Beberapa ganjalan yang ada sekarang barangkali hanya berkaitan dengan kondisi geografis, sosial dan ekonomi masyarakat disekitar perbatasan kedua negara. Bagi Indonesia keterbelakangan sosial ekonomi, lokasi yang sangat terpencil, jauh dari sentuhan program pembangunan nampaknya merupakan masalah utama. Disamping kondisi politik dijamin konfrontasi dengan Malaysia serta operasi penumpasan PGRS (Pasukan Gerilya Revolusioner Sarawak) dan PARAKU (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara).

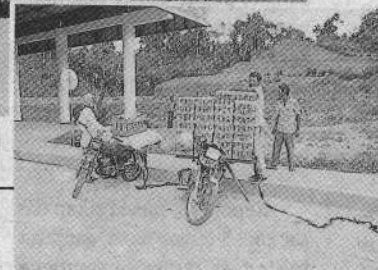
Didalam pihak penduduk perbatasan dalam kawasan Sarawak jauh lebih maju keadaannya. Baik pada waktu penjajahan Inggris, lebih-lebih lagi pada waktu Sarawak merdeka di dalam Malaysia, pembangunan gencar dilaksanakan. Prasarana jalan raya telah menghubungkan daerah-daerah pedalaman dengan kota-kota di Sarawak. Fasilitas Angkutan umum yang teraturpun sudah dapat dinikmati masyarakat pedalaman dengan baik. Program-program peningkatan kesejahteraan rakyat di pedalaman seperti pendidikan,

kesehatan dan lain-lain dipacu pemerintah Sarawak seiring dengan lancarnya sarana dan prasarana perhubungan.

Dengan demikian terdapatlah perbedaan tingkat sosial ekonomi yang menyolok antara kedua daerah perbatasan tersebut. Keadaan ini memaksa rakyat kita diperbatasan berorientasi keseberang, terutama untuk memenuhi keperluan hidupnya, karena tempat-tempat di Sarawak lebih mudah mereka capai.

Penduduk Kampung Aruk misalnya; Kalau mereka ingin menjual hasil pertanian ke daerah RI terpaksa harus menjual ke Sambas dengan menggunakan sampan dan memakan waktu sekitar 12 jam. Tetapi kalau mereka menjualnya ke daerah Sarawak yaitu di kampung Biawak hanya diperlukan waktu sekitar 20 menit saja. Dengan pertimbangan apapun juga pasti penduduk Aruk akan memilih Biawak (Sarawak) sebagai tempat jual dan membeli kebutuhan hidupnya dari pada Sambas yang terletak di wilayah RI.

Sebagai akibat orientasi ekonomi yang demikian, maka mata uang yang beredar di sana adalah mata uang ringgit Malaysia. Uang rupiah praktis tidak ada. "Jangan kaget kalau anda mendapatkan petani mu-



da yang ngomong Inggris dan hanya kenal pejabat Malaysia disana", Ungkap **Prof.DR. Hendro Suroyo Sudagung**, Guru besar Universitas Tanjungpura yang pernah mengadakan penelitian mengenai masyarakat perbatasan.

Lebih lanjut alumnus Fisiologi UGM ini menjelaskan komposisi penduduk perbatasan kedua negara yang mayoritas suku Daya Iban mempunyai pola kekerabatan yang khas. Orang-orang Daya Iban sebagai suku terbesar mempunyai rasa kesukuan maupun kebangsaan yang kuat. Kesadaran identitas Iban tersebut menyebabkan mereka tetap merupakan satu bangsa dan wilayah yang mereka diami adalah hak milik mereka tanpa melihat batas-batas negara. Perkawinan antar suku diantara mereka sendiri didalam wilayah negara yang berlainan bukanlah hal yang aneh. "Malah banyak orang-orang Iban Sarawak yang mempunyai kebun di daerah RI dan sebaliknya," katanya. Dengan adanya latar belakang tersebut kunjungan atau gerak lintas batas yang bersifat kekeluargaan sampai kegiatan

ke Sarawak dan sebaliknya sudah merupakan kenyataan sosial yang berjalan sejak lama.

Berbagai perundingan tentang perbatasan tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Seperti yang ditunjukkan lewat Komisi Umum Pembatasan (GBC). Dari sejarahnya, rembulan GBC memang terasa sebagai forum pengambilan kebijaksanaan dibidang polkam. Ini terlihat awal kerja sama kedua

negara tahun 1967, menjaga keamanan dan menumpas gerombolan komunis PGRS dan PARAKU.

Tidak adanya kerjasama kolektif di bidang hankam di Asia Tenggara, tampaknya memperkuat keinginan kedua

negara untuk tetap menggunakan basis bilateral seperti GBC sebagai forum kerja sama hankam kalau ada perluasan konteksnya masih sebagai keamanan yang komprehensif.

Tahun 1972 misalnya, tidak cuma operasi militer yang dirembuk tapi juga ancaman penyelundupan, narkoba dan pembangunan ekonomi diperbatasan. Berbagai ketentuan mengenai perdagangan penduduk perbatasan seperti batas nilai barang dagangan sebesar 600 ringgit setiap orang/bulan. Belakangan Malaysia menaikkan menjadi 3000 ringgit, hasil sidang GBC 1984 di Medan).

Dalam perkembangannya dalam sidang GBC-1985 disepakati pembentukan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) tingkat daerah Kalimantan Barat - Sarawak. Hal ini merupakan upaya mengatur masalah yang lebih spesifik setelah adanya Staff Planning Committee (SPC) dan KK Malindo tingkat pusat.

Hasil kongkret berbagai forum itu, terwujud misalnya pada usaha membangun pospos imigrasi dan sambungan jalan yang saling bertemu di

garis batas negara. Dalam kaitan inilah lantas pembukaan gerbang Entekong masuk prioritas kerja kedua negara. Dari *Border crossing point* di tingkatan menjadi *Legal entry point*.

Akhirnya terpampanglah pemandangan seperti di Entekong. Wakil Gubernur Kalbar **Drs. H. Jimmi Mohammad Ibrahim** mengungkapkan pembangunan kompleks Pelabuhan Darat Entikong dirancang dengan anggaran Rp 2,2 milyar. Secara bertahap kata juga akan membangun pelataran parkir dan kargo, katanya.

Selain itu untuk memperlancar dan mempercepat arus lalu lintas dari Pontianak ke Entekong yang masih terputus di Tanjung, sepanjang 74 km. Pemda merencanakan secara bertahap pembangunan sambungan jalan tersebut dengan anggaran 6,1 milyar dari APBN, jalan selebar 6 meter itu akan mampu menahan beban 8 ton tiap poros roda. Sehingga diharapkan tahun 1992 orang dapat menikmati jalan mulus dari Pontianak langsung ke Kuching, Sarawak.

Secara teknis memang tak ada masalah menyambung jalan kedua negara, ini terbukti telah digunakannya jalan tersebut untuk reli mobil Pontianak-Kuching-Brunai Darussalam. Belum lagi kunjungan resmi pejabat, rombongan kesenian dan olah raga yang menggunakan jalur Entekong. Beberapa waktu yang lalu rombongan pecinta motor besar Malaysia pun pernah menjajal jalur tersebut. "yang masih menjadi persoalan adalah peraturan lalu lintasnya dan asuransi kendaraan," katanya lagi. Di Sarawak selain semua kendaraan diasuransikan peraturan kelengkapan kendaraan juga diberlakukan secara ketat. Wagub yang juga pembina KAGAMA Kalbar ini mengakui bahwa kesadaran berlalu lintas

di negeri seberang itu patut dipuji. "Naik mobil tanpa sabuk pengaman saja bisa menjadi masalah disana," ungkapnya.

Di pihak Sarawak, persiapan yang dilakukan pun tak kalah gesit. Dilihat sepintas pun kompleks pos perbatasan di Tebedu, nama desa pasangan (counterpart) Entekong tampak lebih tertata rapi. Bangunan yang berdisain post modern itu kelihatan lebih beridentitas dengan papan-papan petunjuk yang jelas. Nampaknya pihak Sarawak telah menyiapkan segala sesuatunya.

Repotnya, meski sikap dasar sudah terasa sama, ganjalan toh masih terasa — terutama kalau sudah sampai ketentuan operasional dan teknis. Peraturan sebagai perangkat lunak penanganannya terasa tersendak-sendak dan tak jelas.

Lalu muncul persoalan-persoalan seperti visa yang membingungkan. Pos perbatasan Entekong sebagai Pos Pendaratan baru memiliki fasilitas bebas visa Asean dan belum ditetapkan sebagai Pelabuhan Pendaratan Bebas visa wisata. Akibatnya warga Malaysia pemegang fasilitas bebas visa wisata yang datang ke Kalbar lewat bandara Supadio Pontianak tidak dapat meneruskan perjalanan kembali ke Sarawak lewat darat/Entikong. Seorang pejabat yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa surat permohonan dispensasi telah dilayangkan Ka Kanwil Kehakiman kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan persetujuan pertelpon diberikan khusus bagi warga negara Malaysia penduduk Sarawak namun tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas secara tertulis.

Persoalan lain yang sangat menggelisahkan masyarakat ialah masalah Fiskal. Mulai bulan April pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi pada

dasarnya akan memberlakukan kepres no. 84 Tahun 1982 tentang ketentuan fiskal luar negeri yang memberlakukan Rp. 250.0000,-/orang seperti ketentuan pada gerbang internasional pada umumnya, kecuali bagi penduduk perbatasan pemegang Pas Lintas Batas.

Mengingat latar belakang ikatan kekerabatan dan prospek ekonomi masyarakat Kalbar - Sarawak ketentuan tersebut tentunya sangat memberatkan. Seorang warga Kalbar pemegang paspor yang juga tidak mau disebutkan namanya mengatakan ketentuan itu tidak mempertimbangkan kenyataan historis dan sangat tidak manusiawi. "Dari pada harus bayar Rp. 250 ribu lebih baik lewat jalan lain," katanya.

Pemerintah daerah Kalbar tentu saja memahami kekawatiran warganya. Selama masa uji coba ini masyarakat telah merasakan angin segar adanya pintu masuk internasional di Entekong. Paling tidak warga kalbar mempunyai alternatif lain selain orientasi ke pulau Jawa yang relatif jauh dan mahal. Berbagai upaya untuk memperoleh dispensasi nampaknya terus dilakukan. "Dalam rapat evaluasi KK Sosek Malindo tingkat daerah kalbar masalah itu terus kami usahakan pemecahannya," ujar Ir. Padi wakil ketua Bappeda daerah tingkat I Kalbar. "Bapak Gubernur juga telah melayangkan surat permohonan dispensasi tersebut kepada Bapak Menteri Keuangan," katanya lebih lanjut. Beberapa warga Pontianak bahkan ada yang menawarkan alternatif ketentuan pembayaran fiskal lewat surat pembaca pada sebuah harian ibikota. Mereka memohon pembayaran fiskal yang serendah-rendahnya atau kalau pun jumlahnya tidak bisa diubah tapi untuk beberapa kali perjalanan. Sementara itu

KaKanwil Ditjen Pajak Kalbar dan Kalteng, **Drs. Zairuddin Idris** mengatakan didepan wartawan di Pontianak (17/3). "Tanpa keputusan lain, mereka yang menggunakan paspor dikenakan fiskal," katanya.

Berbagai kalangan bahkan mencemaskan hal itu akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang telah berjalan dengan baik selama ini. Terutama dalam hubungannya dengan jumlah pengunjung muhibah dari Kalimantan Barat ke Sarawak. "Dulu dengan biaya Rp. 70 ribu Kami dapat melakukan kunjungan ke Serawak selama 4 hari 4 malam, sudah termasuk paspor kolektif dan akomodasi," ujar Soeripto, Ketua senat FKIP UNTAN yang pernah memimpin rombongan mahasiswa fakultasnya ke Intitute Teknologi Mara di Sarawak. Pengalaman yang sama juga dialami rekan-rekannya yang berkunjung kesana. "Rombongan kami sudah ditunggu di perbatasan dan selanjutnya mereka yang menanggung segala sesuatunya," kenang Kusmardiyanto ketika berkunjung bersama rombongan pramuka beberapa waktu yang lalu.

Lebih jauh berbagai pihak malah telah menjajagi kemungkinan kerjasama lebih jauh, seperti program pertukaran tenaga pengajar dan mahasiswa bahkan tidak menutup kemungkinan memanfaatkan kurangnya tenaga kerja di negeri tetangga itu. Dalam konteks ini pemberlakuan ketentuan fiskal yang tidak pandang bulu itu memang bikin lesu. Mengenai hal ini pejabat memang punya jawaban yang sah dan argumentatif. Cuma soalnya bagi masyarakat awam, ditengah alternatif ratusan jalan tikus yang terhampar di sepanjang 800 km perbatasan Kalbar-Sarawak itu barangkali pertanyaannya sederhana saja, "Bangunan megah pintu masuk di Entekong itu lantas untuk siapa?".

Barhan



Masih ingat Pasar Raya Gadjah Mada 1989? Dua hari sebelum "pesta untuk rakyat" itu berlangsung hujan membasahi bumi Bulaksumur. Celakanya pada hari pertama hujan juga tidak reda, malah deras disertai angin kencang. Atap-atap

stand pameran berhamburan, aliran listrik sempat terputus, hingga upacara pembukaan yang sedianya berlangsung di halaman utara Gedung Pusat terpaksa dipindah ke dalam ruang Balairung.

Pada saat-saat seperti itulah biasanya

Mbah Mitro PAWANG UGM

orang baru ingat peran seorang pawang hujan. "Sebenarnya masalah kesulitan koordinasi saja, hingga pawang terlupakan," ujar seorang panitia Pasar Raya di sela-sela hujan kala itu. "Pawang UGM sudah dipesan orang lain," tambahnya. Pawang UGM? Ya, maksudnya pawang hujan yang biasa dipakai oleh UGM. Siapa? Tanyalah pada salah seorang pejabat UGM, atau pada beberapa orang gelanggang, mereka pasti menjawab **Mbah Mitro**. Rupanya UGM sudah tepat pada pilihannya, nyatanya Mbah Mitro lah yang selalu diminta bantuan untuk menghilangkan hujan dari bumi Bulaksumur ketika UGM sedang ada momen-momen penting.

Tidak percaya? Hadirlah pada setiap Upacara Wisuda. Tengoklah di sela-sela kaki pilar Gedung Pusat di bagian barat tempat

berlangsungnya Wisuda. Di sana akan tampak seorang laki-laki tua sedang menunggui seperangkat sesajen. Mengenakan blangkon biru, sarung biru dan surjan hijau membuat dia kelihatan lain dari yang lain. Selalu dengan pakaian itu ketika dia bertugas.

"Saya memang harus seperti ini," katanya ketika ditanya soal "seragamnya". "Ini permintaan dari sana," tambahnya sambil menunjuk ke arah selatan dan Mbah Mitro tidak mau menjelaskan lebih lanjut. "Kalau mau dengar ceritanya, datang saja ke rumah, di Wonogiri," jawabnya ketika didek sak BALAIRUNG. Ditanya soal kemampuannya menadah hujan Mbah Mitro mengelak. "Saya cuma minta pada Yang Kuasa agar hujan dialihkan dari sini," kata Mbah Mitro.

Mbah Mitro bertempat tinggal di Wonogiri, tetapi untuk urusan kerja dia tidak mengenal tempat. Menurut penuturannya, sudah banyak kota di Jawa yang dia datangi. "*Amargi dijaluki tulung tiyang*," katanya dalam bahasa Jawa. Dengan kata lain Mbah Mitro memiliki banyak rekanan. Karena itu kalau mau minta bantuan Mbah Mitro harap segera menghubungi, sebab jika tidak bisa kalah cepat dengan orang lain. Meskipun Mbah Mitro sudah jadi pawangnya UGM.



HUDA



Jabatan resmi sebagai *supir rektor* telah diserahterimakan kepada karyawan lain bebarengan dengan pergantian rektor bulan Februari lalu. Namun sesuai dengan tradisi UGM **Sardjiman** tetap menjadi supir pribadi Pak Koesnadi. Pak Jiman, demikian dia biasa dipanggil, adalah pemegang kemudi mobil merah plat merah nomor AB 43 selama Pak Koesnadi menjadi rektor. Laki-laki berperawakan gempal ini ternyata polos segala tuturnya.

Pak Jiman KENTAL DENGAN BOS



"Belum pernah," demikian jawaban Pak Jiman ketika ditanya BALAIRUNG perihal kapan belajar *nyopir*. Bermula pada tahun 1970, ketika itu dia sebagai karyawan DAMRI di bagian keuangan. Merasa tidak betah Jiman muda minta ditempatkan di lapangan. Jadilah ia kondektur. Awalnya belajar mengaju-mundurkan bus, lama-lama jadi supir *beneran*. Jika dalam perjalanan Yogyakarta-Jakarta sopirnya mengantuk, kondektur Jiman memberanikan diri menggantikannya.

Lama tidak ada formasi pengangkatan, terpaksa Jiman banting stir, melamar sebagai sopir di UGM pada tahun 1976. Setelah sepuluh tahun menjadi karyawan UGM, Jiman mendapat penghormatan menjadi sopir rektor ketika Pak Koesnadi diangkat jadi rektor baru UGM.

Bagi Jiman Pak Koesnadi adalah pribadi yang terbuka. "Beliau itu tanpa *tedeng aling-aling*," tandasnya. Wajar kalau keluarganya mempunyai sambung rasa yang kental dengan keluarga *bosnya*. "Ketika keluarga kami membangun rumah dan setelah selesai, Bu Koesnadi menyempatkan diri bertandang ke sana," ceritanya. Bersama istri dan satu dari dua anaknya kini Jiman tinggal di rumah barunya di jalan Kakap III/16 Minomartani.

Selama menjadi sopir Pak Koesnadi, Jiman memiliki satu pengalaman yang sangat membekas. "Ketika itu kami dalam perjalanan Yogya-Semarang. Ketika malam buta ternyata mobil mogok di jalan. Bapak memegang senter menerangi saya untuk memperbaiki mobil," tutur sopir berlesensi SIM C-1 ini. Rupanya Jiman punya kesukaan makanan yang mirip dengan *majikannya*, yaitu mie. Untuk urusan kesukaan ini, ia rela menempuh perjalanan Minomartani-Kasih, Bantul yang berjarak 20 km.

Laki-laki yang tidak suka pelihara kumis ini mengaku sempat kuliah di Fak. Ekonomi PTPN (sekarang UPN). "Cita-cita saya dulu menjadi konsultan ekonomi," kenang Jiman. Walau impiannya kandas, pegawai golongan I-d ini selalu bersyukur dan menyenangi pekerjaannya.

Jiman bertekad membuat dua anaknya jadi orang. Karenanya bersama istrinya ia *nyambi bisnis*; mengumpulkan barang untuk dikirim ke Denpasar. Ia mengaku, gajinya yang Rp. 88.000,- belum pernah diterimanya penuh. Malah terkadang *nombok* karena sebelum *tanggal main* sudah menjemput kebutuhan sehari-hari. Untunglah gaji yang tidak utuh itu masih cukup untuk sekadar hidup pas-pasan.

HUDA

HUDA



Kalau Anda termasuk *cowok* mandiri, cerdas dan tidak minder berhadapan dengan mahasiswi ayu, mungkin Anda *cowok* yang tepat untuk Ambarwati Esti Pertiwi. Mahasiswa ayu ini kuliah di jurusan Sosiologi, Fisipol UGM (angk. 88), juga merangkap di Fakultas Hukum UII (angk. 87). *Toh* ia masih sempat aktif berbisnis dan bekerja sebagai pembela dari sebuah tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum yang berkantor di Kotagede. Rupanya belum cukup kesibukan itu, Ambar juga

Ambarwati TIDAK PEGAWAI NEGERI

menjadi anggota tim basket putri di fakultasnya.

Apa tidak pusing? "Justru kalau tidak begitu, saya malah pusing," katanya. Kan *ngoyo*? "Apa yang saya lakukan sesuai dengan jiwa dan kemampuan saya," katanya lagi. Karenanya tak ada beban mental, perasaan diburu-buru waktu atau target yang harus dikejar baginya. "Menyenangi dan menikmati apa yang dikerjakan, itu prinsip saya," tandasnya.

Pernah gadis ini dalam satu semester mengambil 48 SKS. Tentu saja wajar bila terdapat ujian tiga kali dalam sehari di dua fakultasnya itu. "Hasilnya dua nilai B dan satu C," katanya disertai tawa khas. Dia memang tidak bisa lepas dari tawanya yang *renyah* bila omong-omong. Tapi, jangan harap mendengar tawanya ketika sedang bertugas sebagai pengacara ketika di pengadilan. "Jaga wibawa *dong*," ujar ambar yang sampai saat ini telah menangani lima kasus.

Mula-mula teman-teman satu timnya tidak percaya kalau Ambar yang suka *ceplas-ceplos* mampu jadi pembela.

Namun setelah melihat penampilannya di berbagai forum diskusi, mereka tak ragu lagi. Nyatanya, mulai petugas pengadilan hingga kliennya selalu beranggapan bahwa pecinta warna merah dan hitam ini sudah *esha*. Ketika ditanya berapa besar gajinya, ia bereaksi keras. "Saya sudah ikut tim saja sudah syukur lho," katanya merendah.

Bagi Ambar LBH bukan tempat yang cocok untuk mencari uang, tetapi untuk pengabdian. Karena kliennya rata-rata berasal dari golongan bawah. Untuk menutup biaya kuliah di dua tempat, ia melakukan bisnis. Hasilnya "bisa beli kacamata untuk *mejeng*, he, he." Ia tidak mau menyebut jumlah tetap kayaknya *batinnya* bisa membuat mahasiswa lain iri. Rupanya bakat bisnisnya itu berasal dari kedua orang tuanya yang juga pengusaha. Tentu saja bapak ibunya tidak melarang Ambar untuk bisnis jaket, insektisida hingga rupa-rupa pupuk.

Gerakannya yang gesit di lapangan basket dan kakinya yang kuat mondar-mandir UGM - UII sama gesit dan kuatnya ketika ia men datangi kope. rasi-koperasi di pelosok desa untuk menjual barang daga ngannya. Studi, mem bela orang kecil dan bisnis adalah ke si bukannya. Lalu besok si gede pengin jadi apa? "Yang pas berambisi wai ne ya di tawa. ti tidak jadi pega geri," ujar sela-sela



KELIK

Widjijono DOKTER TANPA PRAKTEK

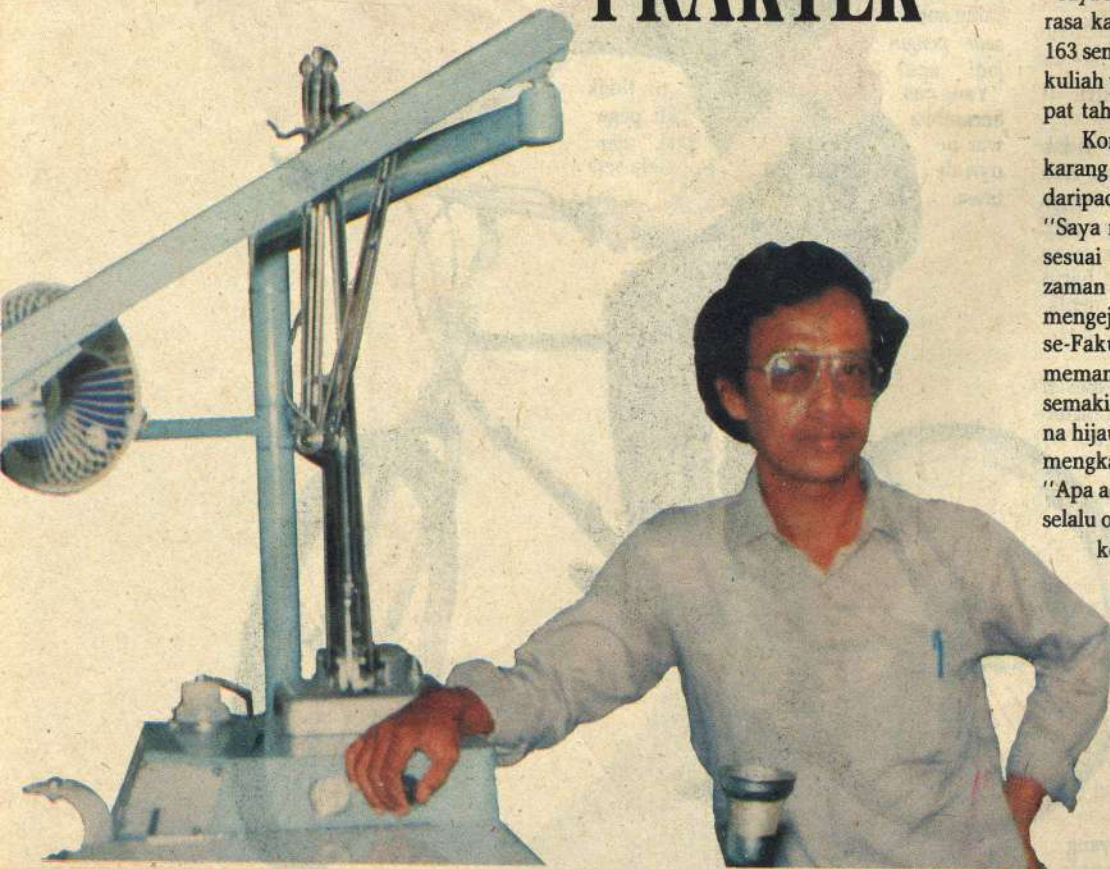


Ada yang unik dalam diri drg. Widjijono, S.U. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM sekitar sepuluh tahun yang lalu, ia tidak pernah mau membuka praktek. Ketika oleh Riestanti dari *Balairung* ditanyakan alasannya, ba-

pak tiga orang putra ini menjawab. "Itu berkaitan dengan pertentangan batin dalam diri saya." Ia menambahkan pula, "Saya tidak sanggup menerima uang dari pasien. Tidak tega." Namun putra sulung dari enam bersaudara ini tidak menutup kemungkinan untuk berpraktek. "Saya hanya mau berpraktek di rumah sakit atau dengan sistem kontrak dari perusahaan," lanjutnya. Sebab di sanalah ia digaji. Yang lebih menarik, *idealisme* drg. Widjijono didukung penuh oleh sang istri.

Dahulu ia memang ingin meneruskan kuliah di ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia, sekarang ISI) atau di Teknik Arsitektur. Demi kebahagiaan orang tuanyalah akhirnya ia masuk Fakultas Kedokteran Gigi. Ternyata ia tidak saja idealis tetapi juga gigih. Buktinya semenjak tahun 1975 ia mengajar di STM Muhammadiyah Sleman untuk meringankan beban orang tuanya yang bertani. "Saya kasihan pada bapak," ujarnya. Karena rasa kasihan itu pula, bapak yang tertinggi 163 sentimeter ini cepat-cepat menyelesaikan kuliah yang sempat terbengkalai selama empat tahun.

Komentarnya tentang mahasiswa sekarang yang dianggap lebih rendah mutunya daripada mahasiswa dulu cukup menarik. "Saya rasa itu wajar. Sistem nilai sekarang sesuai dengan rata-rata kelas. Sedang di zaman saya dulu, mahasiswa diharuskan mengejar target," ujarnya. Dosen Teladan I se-Fakultas Kedokteran Gigi UGM ini memang berharap mutu mahasiswa akan semakin meningkat. Namun pengagum warna hijau muda ini pun menganjurkan untuk mengkaji falsafah Jawa, *narimo ing pandum*. "Apa adanyalah. Saya ini tidak *ngoyo*, tetapi selalu optimis. Dengan begitu kita tidak akan kena *stress*," tutur dokter sederhana yang lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1950, yang tidak pernah lepas dari kaca mata minus satu seperempatnya.



KELIK

**SELAMAT
TAHUN BARU HIJRIYAH
1411 H**

**Semoga
Kita Selalu Mendapat Karunia
Allah SWT.**

**TOTAL
BONAFIDE!**

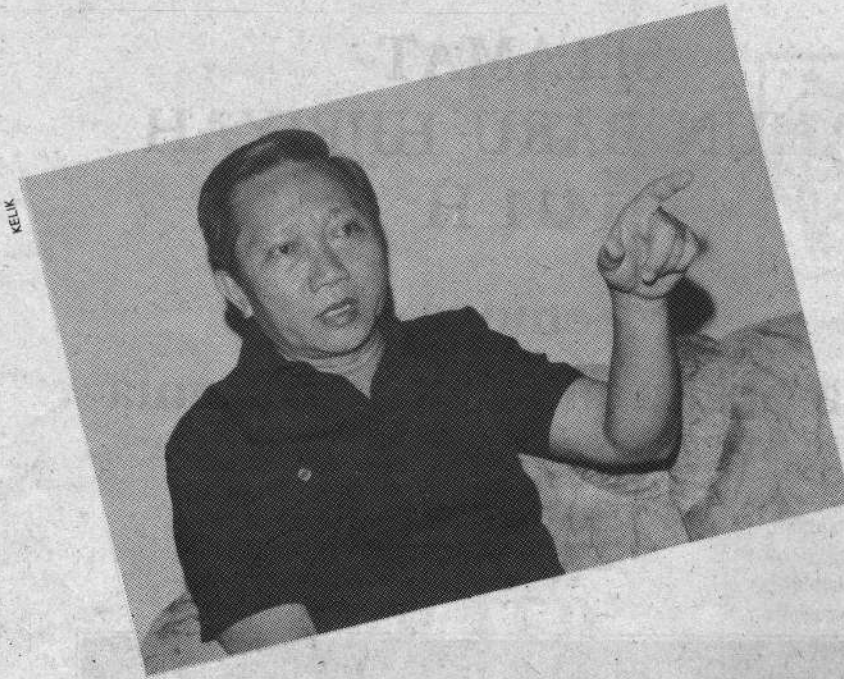
**PUSAT PELAYANAN OPTIK
PALING MODERN DI YOGYAKARTA**



**MODERN & QUALIFIED OPTIC
AKUR OPTIC**

**STUDIO I : JL. SALA No. 71 TELP. (0274) 5101 YOGYA
STUDIO II : JL. PERWAKILAN 8 TELP. 3960 YOGYA**

- hearing aid, softlens, frame & lensa mutakhir,
lengkap ready stock
- ahli-ahli kami akan membantu anda untuk
melihat, mendengar lebih sempurna



Prof. Dr. Ir. Mochamad Adnan, M.Sc.

INSTITUSI INI TIDAK BOLEH HANCUR

Lahir di Blora, 14 Agustus 1933 di tengah keluarga wiraswasta. Kini ia memimpin perguruan tinggi terbesar di negeri ini untuk empat tahun mendatang (1990-1994). **Prof. Dr. MOCHAMAD ADNAN** telah dididik untuk selalu bekerja keras dan disiplin oleh ayahnya.

Ibunya meninggal pada saat putra bungsu dari sembilan saudara ini berusia sembilan tahun. Sang ibu ini melengkapi ajaran sang ayah dengan menanamkan sikap kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Selepas mendapatkan gelar sarjana muda di Fakultas Pertanian UGM pada tahun 1958, hidupnya diabdikan untuk ilmu pengetahuan dan institusinya, UGM. "UGM ini telah dibangun dengan darah dan daging. Jangan sampai institusi ini kandas dan hancur hanya karena

ulah kita sendiri," kata Pak Adnan, yang kehidupannya boleh jadi 'lurus-lurus saja'.

BALAIRUNG menemuinya dua kali. Pertemuan pertama dilakukan ketika beliau belum dilantik menjadi rektor. "Saya belum mau bicara soal program. Nanti *ndisiki kersane* Yang di Atas," katanya. Baru pada pertemuan kedua, Pak Adnan berbicara panjang lebar mengenai program dan kedu-dukannya selaku Rektor UGM. Berikut ini hasil wawancara **Ika Dewi Ana**.

Bagaimana Pak Adnan melihat mahasiswa UGM di tengah mahasiswa Indonesia?

Mestinya ada dua hal yang harus ditinjau. Pertama bidang akademik dan yang kedua adalah bidang kepekaan terhadap masyarakat. Di bidang akademik, menurut saya, usaha untuk menangkap informasi asli

masih kurang. Mahasiswa lebih banyak mengambil bahan-bahan dari hasil tatap muka dengan dosen. Itu karena kemampuan berbahasa asingnya masih kurang.

Kalau dalam kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, saya kira bagus. Hanya yang perlu diperhatikan, seperti yang dianjurkan Pak Koesnadi, mahasiswa adalah intelektual muda. Jadi mahasiswa harus melakukan dialog dan tidak memaksakan kehendaknya. Kalau monolog saja, nanti jika menjadi pemimpin, ya pemimpin yang otoriter

Soal kepekaan mahasiswa UGM yang selalu diidentikkan dengan aksi mahasiswa, bagaimana?

Saya melihat secara sepintas, dari tingkat sarjana sampai pasca, kepekaan itu jus-

tru sangat lemah di bi-
dangnya sendiri. Misal-
nya saya mengajar tek-
nologi pengolahan susu
sapi. Mahasiswa yang
saya ajar tidak tahu
rencana pemerintah
tentang peningkatan sa-
pi perah. Kebijaksana-
an tentang koperasi su-
su juga *nggak* tahu. Ke-
pekaan itu justru dalam
hal lain. Ini kan agak
berbeda dengan ang-
gapan sebagai intelek-
tual muda.

Dengan adanya
masalah semacam itu,
sejauh mana universitas
akan berperan sebagai
tempat penyadaran?

Sebagai Pembantu Rektor I saya sudah
mempunyai konsep. Saya berharap dosen-
dosen muda telah mengikuti penataran
Aplied Approach. Dulu namanya Akta Li-
ma. Yang dipentingkan bukan teori belajar
mengajarnya melainkan persiapan yang di-
lakukan dosen sebelum mengajar. Setelah
itu mahasiswa diwajibkan membaca infor-
masi asli, sehingga setelah lulus nanti ia siap
berkembang mandiri. Sekarang ini kita te-
lah memiliki 80 dosen senior yang mengua-
sai *applied approach*. Diharapkan tahun de-
pan akan terus meningkat.

Di bidang kepekaan sosial, ini harus di-
mulai dari dosen. Setiap dosen harus tahu
persis kebijaksanaan-kebijaksanaan di bi-
dangnya. Bisa diselami kan? Jangan sampai
setiap orang bicara tidak di bidangnya, de-
ngan data yang tidak tep-
pat lagi. Suasana dalam
masyarakat justru akan
kisruh nanti.

Apakah itu arah-
nya ke spesialisasi?

Ya, tidak mutlak
begitu. yang diperda-
lam memang itu. Tetapi
jangan lupa bahwa se-
seorang harus memiliki
wawasan luas. Tapi ja-
ngan terbalik.

Kondisi macam apa yang membuat hal
itu terjadi?

Saya tidak pasti benar. Saya kira kare-
na aktivitas politik ya? Jadi kepekaan ma-
syarakat sangat dipengaruhi aktivitas poli-
tik. Tapi saya belum tentu benar, lho, kare-
na bukan orang politik.

Tentang program sebagai Rektor
UGM?



PAK ADNAN DAN KELUARGA : Jarang sekali terjadi pertenggaran.

Anda tahu *nggak* misi perguruan tinggi?

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Benar. Itu tugas yang luhur sekali, tu-
gas utama. Itulah yang ingin saya laksana-
kan sebaik mungkin. Pelaksanaannya harus
dikaitkan dengan empat isu pokok, yaitu
kualitas, kuantitas, relevansi dan pemerata-
an. Anda mestinya tahu profil ketenagaker-
jaan kita bagaimana. Yang kedua adalah
meningkatkan efisiensi infrastruktur untuk
mendukung yang pertama. Yang ketiga ada-
lah meningkatkan kegairahan lembaga dan
unit-unitnya.

Lalu tentang sarjana yang tidak siap
pakai?

Kalau lulusan perguruan tinggi tidak
mungkin siap pakai, tetapi siap berkembang
dan menangkap ilmu pengetahuan. Kalau

sanuddin mulai maju. Kalau kita sampai
tertinggal oleh universitas lain, *wah* repot
kita. Ini yang harus disadari dan didukung
mahasiswa. Nanti kalau *situ* sudah jadi
alumnus, lalu lihat UGM *nglokro* di bidang
akademik, *situ* kan malu.

Namun dengan otonomi kampus, ada
kekhawatiran: yang besar jadi besar yang
kecil semakin tenggelam.

Ya, saya kira pemerintah sudah mem-
pertimbangkan keseimbangan pengembang-
an. Kalau otonomi 100% yang besar men-
jadi konglomerat, ha...ha.... Memang keper-
cayaan masyarakat pada kita akan bertam-
bah. Industri misalnya, mereka tidak mung-
kin menyerahkan penelitiannya pada sem-
barang lembaga. Namun, saya kira peme-
rintah akan menyeimbangkan.

Sebenarnya apa
prinsip Bapak?

Saya selalu melak-
sanakan musyawarah.
Semua pendapat saya
himpun. *Memange*
perguruan tinggi itu
lain, karena isinya
orang-orang *pinter*. Ya,
demokrasi dan keterbu-
kaan yang saya pegang.
Kalau kita ingin mem-
buat keputusan jangan

sampai Senat tidak dimintai pendapat. Itu
yang selalu saya pegang sejak menjadi De-
kan Fak Teknologi Pertanian, Dekan Fak
Pasca Sarjana hingga Pembantu Rektor I.

Kalau prinsip hidup?

Sederhana saja *kok*. Ibu melatih saya
sabar, Bapak melatih kerja keras dan disi-
plin. Itu saja.

PROF. DR. MOCHAMAD ADNAN

Blora, 14 Agustus 1933

Pendidikan:

1958 : Sarjana Muda, Fak Pertanian UGM

1961 : Sarjana, Fak Teknologi Pertanian UGM

1971 : Master, Food Science and Technology
University of California, Davis

1980 : Ph.D, Food Science, University of Illinois, Urbana - Champaign

politeknik memang harus siap pakai.

Sosok UGM di tengah perguruan tinggi
yang lain bagaimana?

Saya kira tetap pada peringkat atas.
Yang telah kita capai sekarang ini akan
membuat universitas siap berkembang. Apa
lagi pada masa datang perguruan tinggi
akan diberi otonomi. Dengan sumber daya
yang kita miliki, kita akan mampu berkem-

Diterapkan dalam keluarga?

Ya, ya. Jarang sekali terjadi pertengkaran.

Putra Bapak?

Dua orang. Yang laki-laki di Ekonomi, baru skripsi. Yang perempuan di Teknologi Pertanian. Seusia situ.

Ketemu Ibu di mana, Pak?

Ha... ha.... ceritanya agak lucu. Ketemu di Davis, California. Pada waktu itu saya disekolahkan di sana. Ketika saya mau pulang, dia datang. Dia mau sekolah di Iowa. Setiap yang datang harus orientasi ke Davis. Sebagai orang yang sudah setahun di sana, saya harus mengantar kemana-mana. Biasanya jodoh itu sudah takdir Tuhan ya? Situ percaya nggak?

Ya, percaya

Menurut Islam kan ada tiga hal yang sudah digariskan. Lahir, jodoh dan mati. Kita tidak tahu dilahirkan oleh orang tua siapa dan matinya kapan, ya kan?

Apakah Bapak aktif ketika mahasiswa?

Nggak, nggak. Saya banyak belajar sih ya. Saya tinggal di rumah pondokan. Di situ sering *macem-macem*: bridge, catur, voli dan tenis. Hampir setiap hari saya main. Aktivitas saya hanya itu dan juga berorganisasi.

Sejak kecil Pak Adnan pasti sering juara kelas?

Ya, memang pada waktu di sekolah dasar dan menengah nomor satu. Di SMA tidak nomor satu, tetapi nilai saya termasuk baik.

Semua di kota yang sama?

Tidak. Kelas tiga saya pindah ke Surabaya. Tahun 1945 rumah di Surabaya hancur lebur. Kembali ke Blora hingga tamat SMP. Waktu SMA di Malang.

Kenapa memilih bidang teknologi pertanian?

Saya bermaksud setelah SMA bisa mandiri. Sewaktu mendaftar di UGM saya langsung dapat ikatan dinas. Jumlahnya 275 perak. Padahal untuk *mondok* hanya butuh 75 perak. Karena saya *nyambi* mengajar di SMA swasta, maka uang saya lumayan.

Pengalaman yang berkesan apa saja?

Ketika di pondokan saya banyak be-

jar tentang kebersamaan. Antri mandi kalau tidak ada kebersamaan akan repot.

Buku-buku yang Bapak sukai?

Saya senang membaca majalah-majalah asing. Yang masih langganan sekarang ini, *Time*. Sesekali beli eceran *Far Eastern Economic Review*.

Bahasa asing yang Pak Adnan kuasai?

Jerman pasif, Belanda pasif dan Inggris aktif. Saya pernah menjadi dosen terbang di University of Los Banos. Di sanalah hubungan internasional saya bertambah luas. Dalam *Advisory Committee* dari *Food Technologists* saya diminta untuk mengkoordinasikan penelitian bidang kacang-kacangan. Saya jadi akrab dengan pakar-pakar bidang pangan. Itu keuntungan bila kita menguasai bahasa asing.

sekarang terjadi sekadar membuat korelasi antara hal yang tidak korelatif, misalnya pengaruh ini terhadap itu. Hubungan jumlah kendaraan di jalan raya dengan jumlah pengemis. Lalu dibuat statistiknya. Kan lucu itu. Tidak menggunakan kaidah-kaidah dasar yang benar.

Kalau penelitian untuk karya-karya produktif inovatif?

Oh, itu. Ya, ya... Bagaimana itu?

Seringkali dana yang tersedia tidak mencukupi.

Wah, sulit juga ya. Saya belum menguasai. Coba nanti saya tanyakan ke Pak Haryana (Pembantu Rektor III, *red*) Tetapi di Indonesia hubungan antara industri dengan perguruan tinggi belum sekuat di negara maju. Kebanyakan industri besar di si-



PRINSIP : Ibu melatih sabar, ayah melatih kerja keras dan disiplin.

Apakah arti kesuksesan bagi Bapak?

Ini pertanyaan yang sangat dalam. Dalam pidato pengukuhan saya sebagai guru besar, saya cantumkan bagaimana saya dapat membalas budi kedua orang tua, yaitu dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain disertai kebahagiaan dan ketegangan jiwa. Menurut saya, itulah hidup yang sukses.

Kembali ke masalah perguruan tinggi, bagaimana pendapat Pak Adnan tentang penelitian mahasiswa?

Sebenarnya di strata-1 tidak perlu penelitian. Cukup skripsi saja. Penelitian memerlukan dasar yang kuat. Jika sifatnya hanya *trial and error* seperti sekarang ini, itu mendidik yang tidak tepat. Alam pikiran *trial and error* itu akan terus dibawa. Yang

ini milik asing. Penelitiannya dilakukan oleh lembaga asal. Jadi mereka masih *relay* negara asal. Sedang industri dalam negeri jarang memerlukan penelitian.

Bapak setuju dengan pendapat bahwa penelitian di negara berkembang ini terhambat oleh struktur?

Wah, masalah yang agak peka juga ya. Memang sering temuan-temuan ilmiah tidak cocok dengan rencana-rencana yang telah dibuat di suatu daerah. Saya kira ini dua hal yang harus dipisahkan. Penelitian itu obyektif. Oleh karena itu, apa pun hasilnya harus diakui sebagai *scientific truth*. Kalau akhir-

PENELITIAN MAHA

nya itu tidak terpakai, itu ya... tergantung pada kemauan birokrasi pemerintah.

Kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia hanya merupakan integrasi kuantitatif fakultas daripada integrasi kualitatif. Bagaimana menurut Pak Adnan?

Bahkan tidak hanya kumpulan fakultas. Antara yang satu dengan yang lain masih terisolasi. Saya kira memang perlu digiring ke arah yang lebih baik. Tidak bisa, misalnya ilmu-ilmu baru itu hanya diakomodasikan ke korps kurikulum saja.

Nanti mahasiswa akan dibebani mata kuliah yang terlalu berat. Nah, itu harus ditampung sebagai sesuatu yang efektif dan mahasiswa bebas mengembangkan visinya. Di Asia Tenggara



KEPEKAAN MAHASISWA : Kalau monolog saja nanti menjadi pemimpin yang otoriter.

Menurut beberapa mahasiswa, Pak Adnan mementingkan bidang akademik. Bagaimana jika terjadi kesenjangan antara kegiatan kemahasiswaan dengan bidang akademik?

Bagaimana sih saya ini? Kereng begitu? Ha... ha.... Orang hidup itu harus seimbang. Menimba ilmu harus diimbangi dengan kegiatan. Tetapi jangan terbalik.

Ada yang menyamakan Pak Adnan dengan Pak Jacob (Prof Dr T Jacob, red)

Oh, ya. Wah, senang saya dengar itu. Tapi tidak ah. Pak Jacob itu pintar. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding beliau.

Kaitan antara kepemimpinan nasional dengan kepemimpinan

Pak Adnan di UGM bagaimana?

(Pak Adnan berbicara banyak, sambil sesekali minta informasi balik dari BALAIRUNG. Tawa lepas sering menyelangi pembicaraannya).

Yang itu tidak off the record ya Pak?

Oh, off the record. Ha... ha... (semua yang hadir tertawa). Membangun universitas kan tidak perlu menjadi rektor. Namun kewajiban. Pokoknya saya bekerja sebaik mungkin. Institusi ini tidak boleh hancur. Itu yang penting.

Ika Dewi

Jabatan Administratif:

1959

Diterima sebagai Pengajar di Fak Teknologi Pertanian UGM

1966-1969 :

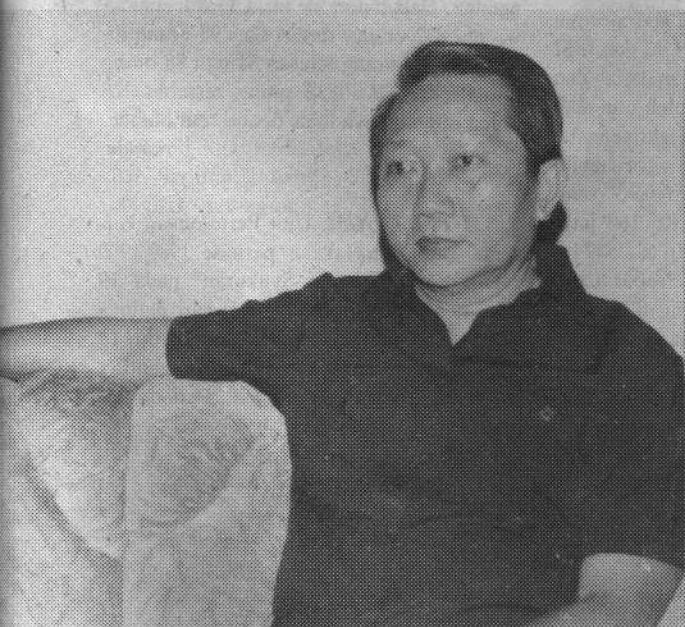
Pembantu Dekan bidang Akademik, Fak Teknologi Pertanian UGM.

1971-1975 : Dekan, Fak Teknologi Pertanian UGM

1982 : Dikukuhkan sebagai Guru Besar Fak Teknologi Pertanian UGM

1982-1990 : Dekan, Fak Pasca Sarjana UGM

1990 : Diangkat sebagai Rektor UGM



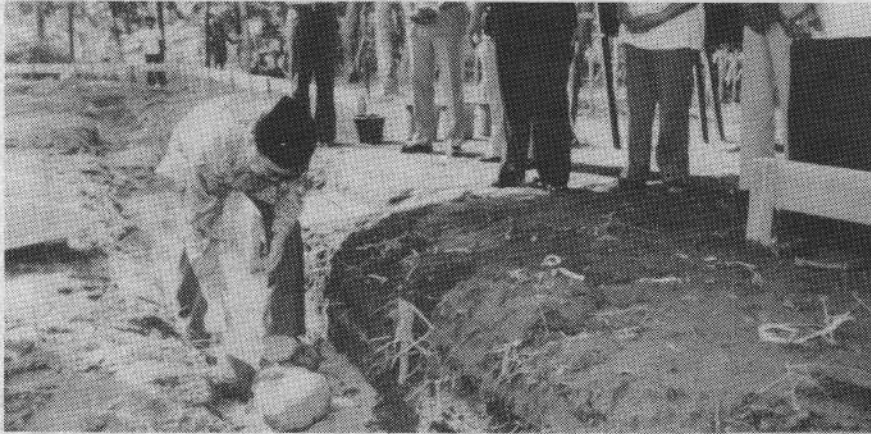
MAHASISWA : Hanya membuat korelasi antara hal-hal yang tidak korelatif.

gara sudah banyak yang mengembangkan itu. Jadi tidak university tetapi multiversity.

Kini tentang kegairahan mahasiswa, seperti yang ada dalam program Pak Adnan. Konkritnya bagaimana?

Dengan meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Saya belum tahu konsekuensi finansialnya bagaimana.

HUDA



LAB PENCAK SILAT : Perlu beaya 160 juta rupiah.

GEMA - SEMA FNT. Untuk yang pertama kalinya, majalah **GEMA** bersama **SEMA** Fakultas Non Gelar Teknologi, bulan Februari 1990 berhasil mengadakan Kursus Jurnalistik Mahasiswa Profesi Teknologi bagi mahasiswa se Indonesia, diikuti oleh 137 peserta dari berbagai perguruan tinggi. Kurikulum kursus meliputi perkuliahan di kelas, kuliah di lapangan, praktek kerja penerbitan, studi banding, dan seminar. Sesuai dengan temanya, materi yang ditampilkan jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan materi kursus jenis umum. Selain beberapa materi dasar kejournalistikan, materi lainnya lebih banyak berbau keteknikan, seperti teknologi media, teknologi dokumentasi, identifikasi dampak teknologi, strategi teknologi telekomunikasi, etika profesi teknik untuk jurnalistik. Untuk merealisasi maksud tersebut, telah diadakan pembicaraan serius dengan pihak **PWI** cabang Yogyakarta maupun **PATI** (Persatuan Ahli Teknik Indonesia). Bani

IKAMMA, FE. Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen, tanggal 5-6 Mei 1990, menyelenggarakan "Enterpreneurship Training" di ruang **PAU**. "Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan lebih dalam tentang dunia kewiraswastaan dan pengembangannya bagi mahasiswa," demikian **Drs. Dibyo Prabowo M.Sc.** selaku dekan **FE**. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut **Ketua Gapensi BPD Prop. DIY, Ir. M. Mudhakkir, MM**, yang mengatakan masih adanya anggapan jadi petani, pegawai negeri, atau pekerjaan lain yang lebih 'terhormat' adalah penghalang bagi timbulnya sikap mental wiraswasta di Indonesia. Sementara itu **Drs. Soehardi Sigit**, staf pengajar **FE**, membahas enterpreneur dari segi filosofinya. Pembicara lainnya adalah staf **Kanwil Departemen Perdagangan DIY**

dan **Dirut PT Mitra Gama Widya, Mahyudin Al Mudra, SH.** Utarmen

LABORATORIUM PENCAK SILAT.

Akhirnya terlaksana juga pembangunan laboratorium pencak silat di daerah Karang Asem, 2 Februari 1990, Peletakan batu pertama dilakukan oleh **Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH**, diikuti pendekar utama, **Ketua Umum PB IPSI H. Eddie Nalapraya**, pengurus **KONI DIY**, serta tokoh-tokoh pendekar silat lainnya. Laboratorium pencak silat hasil kerjasama **UGM** dan **IPSI** ini merupakan gedung penelitian ilmiah dan pusat informasi yang dirintis oleh unit silat **UGM** sejak tahun 1980 dan telah mengalami pergantian rektor dua kali hingga saat ini baru terealisasi. Biaya pembangunan seluruhnya diperkirakan sebesar Rp 160 juta, dana diperoleh dari **Banpres** Rp 63.7509 juta dan dari pendekar utama **Probosutedjo** Rp 50 juta. "Pembangunan ini dikerjakan dengan swakelola sehingga bisa menghemat 20% lebih dari jumlah harga bangunan," kata **Suwardi** sebagai pemimpin proyek.

HUDA



WISUDA UGM : Alumnus punya dedikasi dan loyalitas tinggi.

Pencak silat sebagai seni dan olah raga merupakan lahan penelitian dan sumber informasi yang belum banyak diteliti para akademisi. Dengan adanya Lab. pencak silat diharapkan banyak kaum intelektual untuk menjadikan pencak silat sebagai kajian penelitian dan penulisan disertasi, sehingga pencak silat sebagai salah satu unsur budaya bangsa mendapat simpati yang semestinya, ujar **Eddie**. (Huda)

WISUDA UGM. "Saya bangga mendengar ungkapan para pejabat terhadap lulusan **UGM** bahwa lulusan **UGM** biasanya mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi pada pekerjaannya, dapat bekerja sama dengan baik, tidak banyak mengajukan tuntutan, bersedia ditempatkan di seluruh penjuru tanah air, dan dalam mengambil kebijaksanaan selalu memikirkan kepentingan rakyat banyak," tutur **Prof. Dr. Ir. Mochamad Adnan**, dalam Upacara Wisuda **UGM** periode IV tahun akademik 1989/1990, pada tanggal 19 Mei. Dalam kesempatan tersebut hadir mantan Menteri Sosial **Nani Sudarsono, S.H.** yang memberi wejangan khusus kepada para wisudawati yang diharapkan mewujudkan keselarasan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai sumber daya pembangunan. Dalam periode ini, **UGM** telah mewisuda 832 orang, terdiri dari 93 orang lulusan **S0**, 65 orang lulusan **S1** dan 88 orang lulusan **S2**. Dari 832 orang tersebut, 26 orang di antaranya lulus dengan cum laude.

Nurhidayat

UNIT PPPK UGM. Unit Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan periode 1989/1990 mengadakan "Malam Syukuran" pada 19 Mei 1990 untuk memperingati hari jadinya yang genap lima tahun. Unit yang berdiri 13 Mei 1985 ini telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali. Periode ke-

pemimpinan pertama oleh **Soeripto Hasan**, kedua oleh **Sidi Aritjahja**, ketiga, **Irawan Satriotomo**, keempat oleh **Muhammad Munawar**. Dari keempat periode kepemimpinan tersebut telah berhasil menelorkan lebih kurang 550 orang anggota terdidik. Acara tersebut berlangsung meriah dan hangat dengan tamu undangan unit-unit kegiatan UGM, PMI Cabang Yogyakarta, Kelompok Suka Rela Kodya.

Nurhidayat

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI SEMARANG. Diferensiasi fungsi antara aparat kepolisian dan pers, secara profesional tidak senantiasa dapat berjalan seiring. Pihak kepolisian sering meminta pers untuk tidak memberitakan sesuatu yang oleh pers dianggap layak diberitakan. Pembatasan, *penundaan* atau larangan ini sangat beralasan, baik untuk strategi pendadakan operasional, kepentingan pelacakan berikutnya, maupun demi menjaga stabilitas. Untuk itu diperlukan *lembaga dialog*, bahkan lebih dari itu, *budaya dialog*. Demikian di antaranya dikemukakan **Novel Ali**, staf pengajar Komunikasi FISIP UNDIP dalam "Diskusi Sehari Pers dan Kriminalitas", 26 Mei 1990. Diskusi sehari ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK) Semarang bekerja sama dengan POLDA IX Jawa Tengah, dan harian Suara Merdeka. Pembicara lainnya KAPOLDA Jateng, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, serta Pemred Suara Merdeka; sedangkan **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo**, SH dan **Dr. Eduard Depari** masing-masing bertindak sebagai pembahas.

Iskani

SEMA FNE. "Pada era pembangunan ini kita tidak lagi berbicara mengenai emansipasi, tetapi harus sudah melangkah pada peranan wanita, mengingat kedudukan pria dan wanita sudah sejajar," demikian menu-



ASRAMA DHARMA PUTRA : Menguak tinggal landas Pembangunan Nasional.

rut **GKR Hemas** pada seminar Keputrian di Gedung Mandala Bhakti Wanita Tama tanggal 12 April 1990 dalam rangka memperingati hari Kartini. Seminar yang diselenggarakan **Senat Mahasiswa Fakultas Non Gelar Ekonomi** ini bertemakan "Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional", menampilkan pembicara **GKR Hemas, Ray. Sitoresmi Fadholi, Ir. Sri Amindiyah Hastuti** dan **Drs. Moh. As'ad**. Tampil sebagai pembahas **Dr. Aliyan Dose** dan **Ny. Suharsini Arikunto**.

Isma,

UNIT PENALARAN - MAPAGAMA.

"Antara pecinta lingkungan dan yang tidak, tidak ada perbedaan sama sekali dalam tindakan dan perilaku," demikian **Yudhi Hermanu**, aktifis pecinta alam, dalam sebuah diskusi memperingati Hari Bumi Internasional, 21 April 1990, tentang kelompok pecinta alam (KAPA). Diskusi yang merupakan kerja sama **Unit Penalaran Mahasiswa** dengan **MAPAGAMA**, bertemakan "Posisi

Kelompok Pecinta Alam dalam Lingkungan Hidup". Dalam diskusi tersebut dibicarakan eksistensi KAPA yang kerap diidentikkan dengan kelompok pendaki gunung saja. Kadang-kadang kegiatan KAPA tersebut lebih cenderung berbungkus rekreatif. Sebagai kelompok yang getol dengan alam, dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, diharapkan KAPA dapat mengambil peran di dalamnya. Berbicara juga dalam kesempatan tersebut, **Sunardi Joyosuharto**, dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM; **Nazir Foead**, anggota MAPAGAMA, **Nirwan Ahmad Arsuka**, anggota Unit Penalaran Mahasiswa UGM.

Nurhidayat

ASRAMA DHARMA PUTERA. Memperingati hari jadinya yang ke 35, Asrama **DHARMA PUTERA** menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Menguak Tinggal Landas Pembangunan Nasional", pada Januari 1990 bertempat di Balai Pertemuan (UC) Universitas Gadjah Mada. Tampil sebagai pembicara **Drs. Agus Sumadi**, ketua Bappeda tingkat I Jawa Tengah, **Drs Bambang Soebandon**, asisten III bidang Kesra Sekwilda tingkat I Jawa Timur, **Dr. Ir. Joedoro Soedarsono**, staf pengajar Fakultas Psikologi UGM, dan **Prof. Dr. Ahmad Muhammad**, staf pengajar Fakultas Kedokteran UGM. Keempat pembicara tersebut adalah anggota KAGAMA.

Huda



ISTIMEWA

UNIT P3K : Ulang tahun ke-5.

ARUNG JERAM KAPALASASTRA.

Lomba arung jeram Kali Progo yang diselenggarakan oleh **KAPALASASTRA**, rencananya akan diadakan kembali untuk kedua kalinya tahun 1991. Bahkan oleh **PODSI** (Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia), acara tersebut telah dilaporkan ke Ditjen Pariwisata. Itulah sebabnya acara lomba yang menurut **Dudy Arif**, ketua panitia lomba yang pertama, dimasukkan ke dalam paket *Visit to Indonesia 1991*, akan dikembangkan menjadi lomba tingkat internasional. Lomba arung jeram Kali Progo ini menempuh jarak 40 kilometer dari Taman Kiai Langgeng sampai Ngluwar, Magelang.

Bani



KAPALA SASTRA : Masuk paket *Visit to Indonesia*

JURUSAN ILMU SOSIATRI, FISIPOL,

pada tanggal 26 Mei 1990 menyelenggarakan seminar dengan tema "Dampak Sosial Budaya Pembangunan Perkotaan". Seminar ini dihadiri dosen, mahasiswa pasca sarjana, aparat DPRD dan beberapa mahasiswa dari fakultas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Suasana seminar menghangat ketika dilontarkan pertanyaan tentang masalah pembebasan tanah rakyat yang muncul akhir-akhir ini dari beberapa peserta seminar. Tampil sebagai pembicara pada seminar tersebut **Dr. Laksono**, staff pengajar fakultas Sastra jurusan Arkheologi; **Sri Sultan Hamengku Buwono X** yang diwakili **Hari Dandi**, dari Kadin DIY; **Drs. Djoko S. SU**, **Drs. Rahardjo Msc.**, keduanya staf pengajar Fisipol; **Ir. Bondan H.**, Ketua Bappeda DIY; **Sri Amindiyah H.** yang diwakili **Ir. Sugito Hadi**, dari REI DIY.

Ismu

FORKOM. Beberapa minggu setelah serah terima jabatan Rektor, tepatnya tanggal 9 Maret 1990, di tempat kediaman mantan rektor yang baru diadakan acara ramah tamah dengan anggota Forkom. **Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.** yang malam itu didampingi nyonya, berulang kali memberikan pesannya akan pentingnya konsep kemitraan bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dialog yang penuh dengan suasana keakraban itu ditutup dengan pembacaan surat keputusan Forkom yang menetapkan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. sebagai Bapak Kemitraan. Keputusan itu didukung oleh semua lembaga kemahasiswaan, Sema, BPM dan Unit-unit kegiatan di Universitas Gadjah Mada.

Huda

FAKULTAS EKONOMI. Seksi jurnalistik

Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM menyelenggarakan Pekan Orientasi Jurnalistik, 9-13 April 1990 dengan tema "Menyongsong Era Informasi, Menuju Kemandirian Pers Mahasiswa". Kegiatan ini bertujuan memberikan pendidikan dasar jurnalistik pada para peserta, di samping untuk merekrut pengurus baru majalah **Equilibrium**, demikian penjelasan **Pieter**, koordinator Sie jurnalistik. Pekan Orientasi Jurnalistik ini menghadirkan para pembicara yang berkompeten dalam bidangnya, seperti **Drs. Ana Nadya Abrar**, **Aris Margono**, (Tempo), **Drs. Imam Anshori Saleh** (Yogya Post), **Ponang Praptadi** dan **Burhan Bariton** (Balairung).

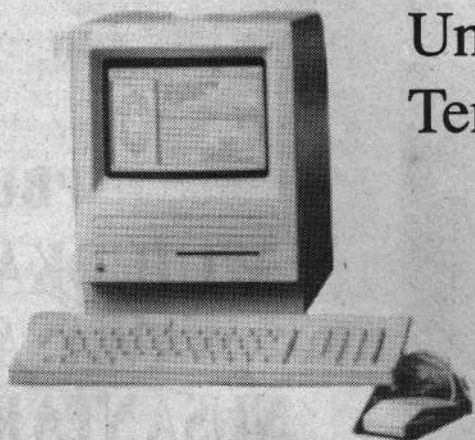
Tanti



PAK KOES : Bapak Kemitraan

PUSAT STUDI JEPANG UGM. Paling tidak ada tiga perbedaan antara birokrasi Indonesia dan birokrasi Jepang. Pertama, secara institusional birokrasi Jepang bersifat apolitik, sedangkan di Indonesia batasan struktural antara birokrasi dan partai politik yang sedang memerintah tidak jelas. Kedua, watak birokrasi Jepang menunjukkan legal-rasional sedangkan birokrasi Indonesia lebih banyak bersifat patrimonial. Ketiga, gaya dan cara kerja aparatur birokrasi Jepang menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi yang mana hal ini tidak terdapat dalam birokrasi Indonesia. Demikian antara lain dikemukakan **Dr. Yahya Muhaimin** dalam diskusi bulanan Pusat Studi Jepang, 6 Juni 1990, dengan tema Birokrasi Jepang dan Indonesia: Suatu Perbandingan. Diskusi untuk ketiga kalinya yang diselenggarakan oleh PSJ ini juga dihadiri **Dr. Miftah Toha** yang bertindak sebagai moderator.

Nurhidayat



Untuk Segala Kebutuhan Anda Tentang Komputer!

- ✓ *Hardware*
- ✓ *Software*
- ✓ *Training*
- ✓ *Maintenance*

computa

Jl. Cik Di Tiro 10 Yogyakarta 55223
☎ (0274) 61 516, 3338
Fax (0274) 62406
Telex 25186 COMPUT IA

The New Fm with The New Form
in Yogyakarta. Here we are..

Easy Listening
music more
Information..

News with high value..

Special music for special
people.. Prove it...on.

1 0 4 . 7 5 by M H Z

UNISI

OFFICE STUDIO
JL. PASAR KEMBANG 41
YOGYAKARTA 55271 ☎ (0274) 3104
224 Route 109, E. Farmingdale, NY 11735 USA

The New Fm with The New Form
in Yogyakarta. Here we are..

Easy Listening
music more
Information..

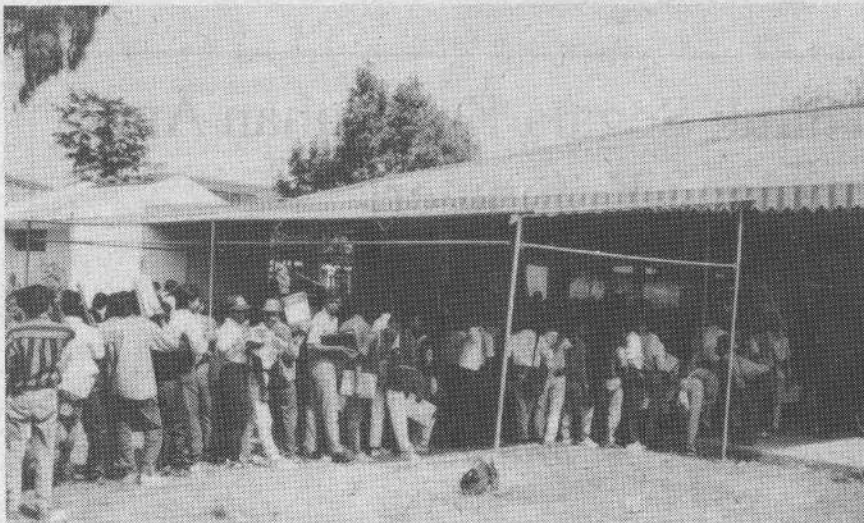
News with high value..

Special music for special
people.. Prove it...on.

1 0 4 . 7 5 by M H Z

UNISI

OFFICE STUDIO
JL. PASAR KEMBANG 41
YOGYAKARTA 55271 ☎ (0274) 3104
224 Route 109, E. Farmingdale, NY 11735 USA



ANTRI FORMULIR UMPTN : Siswa luar Jawa kalah.

AM AN

PBUD WUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA

Bermula dari keprihatinan beberapa kalangan perihal ketimpangan yang muncul dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yaitu "kekalahan" lulusan SMA luar Jawa dalam bersaing bebas memperebutkan kursi PTN. Buntut dari ketimpangan ini, daerah luar Jawa tetap saja mengenyam "kue" pendidikan pada potongan paling akhir. Untuk itu Universitas Gadjah Mada berhasrat untuk menyiasati keadaan ini.

Diluncurkannya kebijaksanaan pemerintah tentang desentralisasi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tanpa tes, memungkinkan UGM untuk memperkenalkan PBUD (Penjaringan Bibit Unggul Daerah) dalam menerima mahasiswa baru.

Tujuan PBUD selain untuk memilih calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik, kematangan kepribadian serta ketrampilan untuk menyelesaikan pendidikan di UGM sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yang tak kalah penting adalah mengupayakan penerimaan mahasiswa baru yang mencerminkan pemerataan kesempatan belajar dari segi geografis. Dengan alasan inilah mengapa kemudian perlu melibatkan Pengurus KAGAMA Daerah selain Kanwil Depdikbud setempat. Mengenai masalah ini, bagaimana tanggapan KAGAMA Daerah?

Ketua Umum KAGAMA Sulawesi Utara, **Drs.S.Paputungan** ketika ditemui BALAIRUNG di Manado mengatakan "Kalau kita tinjau dari satu kesatuan harus diakui ada daerah yang maju, ada yang kurang maju. Saya kira justru itulah perlu aspek pemerataan, dalam arti yang tertinggal itu jangan sampai tertinggal terus, tapi ikutsertakanlah". Pada dasarnya tidak ada

rasa keberatan bagi Pengurus KAGAMA Daerah untuk membantu pelaksanaan PBUD. Paling tidak seperti yang diungkapkan pula oleh **Drs.Hanafi**, Ketua Umum KAGAMA Kalimantan Barat "Kami siap membantu apa yang menjadi program KAGAMA Pusat, apalagi yang langsung berkaitan dengan almamater. Hanya saja harus jelas petunjuk pelaksanaannya, agar semuanya juga dapat berjalan lancar". Karena di Kalimantan Barat, seperti yang dilaporkan oleh reporter BALAIRUNG dari Pontianak, sempat terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan PBUD ini. Sehingga sedikit membuat bingung Pengurus KAGAMA Kalbar, meskipun akhirnya dapat diselesaikan.

Sebenarnya ide ini telah dilontarkan sejak akhir Juni 1989 di tengah ramainya MUNAS KAGAMA VI yang berlangsung di Bali. Mekanismenya, panitia memberikan ranking setelah meneliti formulir yang dikirim langsung dari masing-masing SMA, tanpa melibatkan Pengurus KAGAMA Daerah. Kemudian dilempar ke daerah dan dikaji oleh panitia daerah yang berasal dari Kanwil Depdikbud (2 orang) dan KAGAMA Daerah (3 orang). **Prof.Dr.Abdulholiq, M.Sc. Ph.D**, Ketua Panitia Pelaksana PBUD menjelaskan, "Di situ nanti panitia daerah tinggal mengisi *ya* atau *tidak*."

Lebih lanjut Prof.Abdulholiq menjelaskan, bahwa setiap daerah akan diambil bibit unggulnya. Meskipun bila dibandingkan dengan daerah lain kalah dalam hal prestasi. Dicontohkannya, Fakultas Kedokteran Umum menerima 37 mahasiswa baru. Berarti ke-27 propinsi akan ada wakilnya. Seluruh SMA negeri maupun swasta mengirim duta maksimal 20 orang, yaitu mereka

yang menduduki ranking 1 sampai 5 untuk masing-masing jurusan A1, A2, A3 dan A4. Dikatakannya pula, bahwa bila ada pihak yang cemburu ataupun berprasangka terhadap niat baik KAGAMA, itu adalah hal yang wajar. Yang dimaksud dengan prasangka, adalah kekhawatiran dalam mengisi *ya* atau *tidak* itu, panitia daerah dilanda ikatan emosional untuk cenderung *nepotan*. Bila hal itu terjadi, maka "seperti" lampu kuning" yang disyaratkan Dirjen Dikti-UGM akan menjadi kampus yang eksklusif dan *equal opportunity* tiada lagi. **Prof.Koesnadi**, Ketua KAGAMA Pusat meredusir kekhawatiran tersebut. Panitia daerah orangnya sangat heterogen, dan keputusan terakhir tetap pada panitia pusat. "Kalian jangan apriori dulu," katanya. Maksud pelibatan Kanwil Depdikbud setempat dan Pengurus KAGAMA Daerah berpijak pada asumsi bahwa mereka yang paling tahu akan kondisi daerahnya, kondisi mengenai kualitas sekolah, situasi perekonomian serta kebutuhan daerah akan tenaga ahli. Daerah kata lain, pelibatan mereka juga demi validitas bibit unggul yang akan dijaring.

Berkaitan pula dengan persoalan di atas, ternyata PBUD juga dimaksudkan untuk mewujudkan Wawasan Nusantara. "Ketika saya masih mahasiswa, kalau kumpulan dan nyanyi-nyanyi, *koq* enak ya. Karena hampir seluruh daerah ada di situ," seloroh Abdulholiq tentang masa lalu. Terlepas dari semuanya itu, sistem ini sesungguhnya memang hasil dalam taraf percobaan. Evaluasi serta pemantauan terhadap PBUD akan terus dilaksanakan. Dan tentunya, masih bersedia menerima kritik yang berniat baik *toh Pak* !

Nurhidayat Aman Jokowi

Tidak seperti biasanya, pagi itu di sebuah gedung sekolah di kecamatan Mandor, yang terletak 88 kilometer dari kota Pontianak, telah berkerumun banyak orang. Padahal hari itu hari Minggu. Memang mereka bukan anak-anak sekolah melainkan penduduk desa pada umumnya. Ada ibu-ibu, yang datang sambil membawa bayi *digendongannya*, bapak-bapak serta beberapa pemuda desa dan anak-anak.

Hari itu warga desa di kecamatan Mandor, yang tergolong daerah minus itu, dikunjungi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Daerah Kalimantan Barat. Mereka yang berkunjung itu terdiri dari beragam profesi. Ada dokter, dokter hewan, apoteker dan lain-lain. Sehingga di samping memeriksakan kesehatannya sendiri warga desa juga dapat memeriksakan ternak mereka.

Itulah sedikit gambaran dari sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh KAGAMA Kalbar sampai akhir tahun lalu. Kegiatan lain, tentu saja, masih banyak. Seperti pertemuan anggota yang paling tidak dua kali dalam satu tahun. Ada juga pertandingan olah raga dengan organisasi alumni yang lain, seperti melawan alumni IPB atau alumni Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan yang terakhir bertujuan untuk membina hubungan yang baik di antara para alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini. Seperti dikatakan oleh *Drs. H. Jimmi M Ibrahim*, salah seorang Pembina KAGAMA Kalbar yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bahwa KAGAMA tidak dimaksudkan untuk menjadi kelompok yang eksklusif di antara para alumni perguruan tinggi yang lain. Meskipun UGM adalah universitas tertua di negeri ini. Karena dalam masyarakat, mereka seluruhnya, harus bekerjasama dalam mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara.

Di sisi lain Ketua Umum KAGAMA Kalbar, *Drs. Hanafi HA Kadir* mengakui program kegiatan-kegiatan di atas belumlah maksimal. Artinya, KAGAMA Kalbar beserta segenap anggotanya mestinya dapat berbuat lebih dari itu. Namun ada beberapa kendala yang belum bisa diatasi. Di antaranya sulitnya bertemu antar anggota. Maklum, hampir seluruh anggota KAGAMA Kalbar ini adalah orang sibuk. Dan barangkali demikian pula anggota KAGAMA di daerah lain. Bahkan di antara pengurusnya pun pertemuan sangat sulit diadakan. Sehingga tidak jarang bila ada kegiatan biasanya atas inisiatif pengurus, dan kemudian

KAGAMA KALBAR RAMAI RAMAI MENGABDI



KAGAMA KALBAR : *Kerjasama dalam mengabdikan nusa dan bangsa.*

kepanitiaannya ditunjuk begitu saja tanpa banyak rapat. Hal ini dibenarkan oleh *Drs. Ruslan Aspan, Apt*, Ketua Panitia Bhakti Sosial di kecamatan Mandor, yang ketika menjadi ketua panitia juga hanya ditunjuk oleh Pengurus.

Kegiatan lain yang tidak pernah ketinggalan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Setiap menjelang tanggal 19 Desember, rangkaian kegiatan yang berupa bhakti sosial, penyuluhan lingkungan hidup di pedalaman, penyuluhan hukum dan lain-lain selalu mendapat sambutan yang baik dari anggota. Demikian menurut Ketua I KAGAMA Kalbar *Eddy Toegiyono, SH, SU*, yang saat ini sebagai Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak di samping kesibukannya sebagai Kepala Balai Pengabdian Pada Masyarakat di Universitas yang sama. Selanjutnya Alumni Fakultas Pasca Sarjana UGM ini menambahkan, "Rangkaian kegiatan Dies itu biasanya diakhiri dengan pertemuan keakraban antar anggota KAGAMA".

Program yang demikian padat bukan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya dana kegiatan diusahakan dari iuran anggota. Namun sampai saat ini pengumpulan dana masih bersifat insidental. Mengingat jumlah anggota KAGAMA Kalbar yang hingga saat ini tercatat sekitar 225 orang. Sehingga sangat susah untuk mendatangkan mereka satu persatu sekadar untuk menarik iuran. Untuk itu *Drs. Hanafi* merencanakan menggaji karyawan yang diperlukan untuk tugas-tugas semacam itu, di

samping untuk mengurus sekretariat KAGAMA Kalbar di jalan Jendral Urip Pontianak, yang sebentar lagi akan ditempati. Sekretariat tersebut didapatkan secara sukarela dari seorang anggota yang bekerja sebagai Notaris, yaitu *Damiri, SH*.

Dengan sekretariat yang baru KAGAMA Kalbar diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya. Selain itu diharapkan pula komunikasi dengan KAGAMA Pusat di Yogyakarta akan semakin lancar. Meskipun selama ini KAGAMA Kalbar juga tak pernah ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KAGAMA Pusat. Seperti pada MUNAS KAGAMA VI di Bali beberapa waktu lalu, KAGAMA Kalbar mengutus empat orang wakil untuk menghadiri acara tersebut. Termasuk dalam utusan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, *Drs. Jimmi M Ibrahim*. Ketika BALAIRUNG menanyakan apakah media yang diterbitkan oleh KAGAMA Pusat "Berita Kagama" sudah pernah didapatkan, *Eddy Toegiyono, SH* menjawab, "Kami memang pernah melihat majalah itu ketika di Yogya, tetapi sampai saat ini kami belum pernah menerima". Seorang yang termasuk paling aktif di KAGAMA Kalbar ini mengharapkan di saat-saat yang akan datang dapat menerima kiriman media yang sekarang berbentuk tabloid tersebut.

Kelancaran komunikasi antara KAGAMA Pusat dan daerah memang amat diperlukan guna meningkatkan kualitas darmabakti mereka, para alumni UGM, bagi masyarakat banyak.

Aman

SEJARAH DARI SISI KEKUASAAN



KUSUMA SP

Perspektif kekuasaan membuat sejarah dipandang sinis, tidak heran apabila muncul sebutan = Sejarah Pornografi; yakni sejarah yang dibuka-buka dan ditutup-tutupi

Sejarawan **Abdurrahman Surjomihardjo** membedakan tiga jenis penulisan sejarah Indonesia. Pertama : *Sejarah Ideologis*, yaitu sejarah yang mencari arti sebyektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau akan tetapi demi lam-

bang yang bisa diciptakan untuk masa kini. Kedua: *Sejarah Pewarisan*, yang ciri utamanya berupa kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Sedang yang ketiga: *Sejarah Akademis*. Penulisan sejarah jenis ini mencoba untuk memberi gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademis.

Pada sejarah akademis kita akan melihat pendekatan intelektual yang menekankan kejujuran terhadap sumber sejarah dan kekuatan analitis teoritis dalam penulisan. Sedang pada penulisan sejarah jenis pertama atau kedua berbagai kepentingan bisa saja terlibat dalam penulisan. Keterlibatan ini yang menyebabkan adanya penulisan sejarah yang pragmatis.

Tulisan ini tidak akan membicarakan sejarah akademis yang telah kita ketahui sebagai sejarah melalui "sekolahan", akan tetapi kita akan membicarakan sejarah ideologis dan sejarah pewarisan yang tampak dalam penulisan sejarah Indonesia.

Sejarah Klasik

Karya biografi **Mohammad Yamin** yang menggunakan para pahlawan masa lampau sebagai personifikasi manusia ideal, tampak jelas sebagai sejarah ideologis. Dalam tulisan-tulisan mengenai sejarah kuno Indonesia, ia menulis kisah-kisah yang — menurut dia — bisa jadi cermin

bagi bangsa Indonesia yang baru dan bersatu. Yamin sangat mengagungkan eksistensi Majapahit dan Sriwijaya sebagai kerajaan pemersatu. Sudah menjadi obsesi Yamin — juga Soekarno — untuk menjadikan wilayah yang pernah dikuasai Majapahit dan Sriwijaya sebagai wilayah yang ideal bagi Indonesia merdeka.

Adalah menarik menyoroti sejarah kuno Indonesia. Selama ini kita kenal Majapahit sebagai kerajaan agung yang mampu menyatukan nusantara. Benarkah demikian? Terdapat petunjuk, sebenarnya Majapahit bukanlah pemersatu nusantara, Majapahit tidak lain adalah penakluk kerajaan-kerajaan lain di wilayah nusantara. Dalam *Peristiwa Bubat* misalnya. Peristiwa yang terjadi tahun 1357 M ini bermula dari keinginan Raja Majapahit, **Hayam Wuruk** untuk meminang putri Sunda, **Dyah Pitaloka**. Bagi **Gajah mada** yang berambisi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar, kehendak meminang putri Sunda itu tidak pada tempatnya. Mestinya kerajaan Sunda yang menyerahkan putrinya kepada Raja Majapahit. Bukan Raja Majapahit yang meminta-minta. Karena harga diri itu **Gajah Mada** membuat *tipu muslihat* yang pada akhirnya berhasil membinasakan Putri Sunda dan ayahnya **Sri Baginda Maharaja** beserta seluruh pembesar Sunda yang datang ke Majapahit.

Sementara kalau kita baca tulisan-tulisan Yamin, tampak **Gajah Mada** dipersonifikasikan sebagai manusia Indonesia ideal yang bisa menyatukan nusantara pada masa **Hayam Wuruk**.

Ada kisah **Minangkabau**, yang berarti *menang kerbau* dalam *Hikayat Raja-raja Pasai*. Di hikayat itu diceritakan: negeri di seluruh nusantara

sudah ditaklukan Majapahit, kecuali alam **minangkabau** yang ditulis sebagai "Pulau Perca". Untuk menaklukkan satu negeri ini tidak melalui pertempuran sebagaimana biasa, tetapi melalui *adu kerbau*, antara kerbau Majapahit dengan kerbau Pulau Perca.

Terkutip di hikayat itu: *Semua negeri habis takluk, melainkan Pulau Perca yang belum takluk. Baiklah aku menyuruh Pulau Perca dengan suatu nikmat, kusuruh mengadu kerbau. Maka ada seekor kerbau sang nata itu besarnya seperti Gajah Tunggal dan tanduknya panjangnya empat jengkal lilit dan matanya merah seperti raga.* Kisah selanjutnya dikatakan: Raja memerintahkan kepada Patih **Gajah Mada** untuk menaklukkan Perca melalui adu kerbau dengan ketentuan dari raja, "bila ia kalah, maka taklukkan olehmu sekali. Bila kita kalah, maka kembali engkau segera."

Adu kerbau tidak seimbang, Majapahit menampilkan kerbau besar, sedang Perca menampilkan anak kerbau yang telah disekap selama tujuh hari dan tidak disusui. Apa yang terjadi ketika bertanding? Anak kerbau memburu kerbau Majapahit untuk menyusui. Kerbau Majapahit yang besar sukar untuk menanduk, malah berputar-putar. Akhirnya kepusingan dan kalah. Kekalahan ini tidak membuat utusan Majapahit marah, karena mereka segera dijamu oleh pembesar Perca.

Minangkabau menjadi kerajaan yang menarik. Karena di saat kerajaan lain bisa ditaklukkan oleh Majapahit, kerajaan di pedalaman Sumatra ini berdiri tegar, bahkan akhirnya bisa mengalahkan Majapahit dengan adu kerbau. Begitulah kisah kihayat. Tetapi benarkah demikian yang terjadi?

Adalah mustahil bagi

seorang panglima tentara Majapahit mau meninggalkan kerajaan di Sumatra itu karena kalah adu kerbau. Hukuman apa yang akan mereka terima ketika sesampai di Majapahit nanti seandainya kejadiannya seperti itu? Kedua, ternyata nama Minangkabau tidak ada hubungannya dengan "menang kerbau". Minangkabau tidak ada hubungannya dengan "menang kerbau". Minangkabau jauh lebih dahulu ada dari pada kerajaan Majapahit. Kini terdapat spekulasi, kalau Minangkabau berasal dari kata "phinang khabu", artinya *country of origin*, yang paralel dengan *Dajuh Kolot, Purwa Negara*.

Dalam sejarah ideologis ini bisa pula ditarik garis masuknya agama-agama di wilayah Nusantara. Apakah masuknya agama-agama di Nusantara melalui cara damai — seperti yang sering kita dengar atau baca — atau melalui pertempuran.

Agama Islam misalnya, bukan tidak mungkin dinasti seberang yang membawa agama ini, di samping membawa saudagar juga membawa tentara. Sebab pada masa itu penaklukan merupakan hal yang biasa terjadi. Dus pertanyaan bisa: apakah ketika Islam masuk ke nusantara secara damai atau melalui penjajahan oleh para dinasti Islam di seberang lautan?

Pertanyaan itu kita ajukan karena, pertama: Kesultanan Aru atau Baru Mandi Sumatera Barat dengan rajanya Sultan Firman ul Karim pada tahun 1339 sempat bertahan terhadap agresi Majapahit di bawah Gajah Mada. Kedua; kerajaan Kuntu Kampar — juga di Sumatera — ikut pula kena agresi. Bahkan pasukan Majapahit sempat membumihanguskan Dus, boleh jadi negeri dalam Islam seberang lautan melukmasjid di Kuntu Kampar dengan demikian telah terjadi pertempuran antara kerajaan Hindu dengan kerajaan Islam.

kan aksi "balas dendam".

Sampai di sini tampak adanya mitos tentang suatu zaman. Mitos yang menyuburkan jenis penulisan sejarah ideologis. Makanya tidak mengherankan bila kemudian dikatakan kalau kekuasaan kolonial di nusantara selama 350 tahun, *tanpa* mau melihat rentangan waktu masing-masing wilayah yang diduduki.

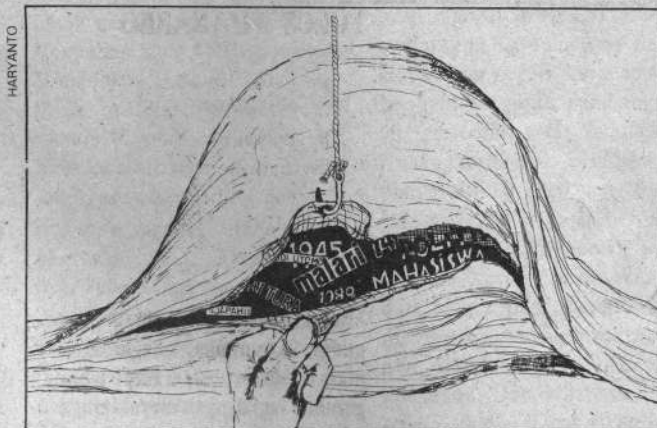
Pada penulisan babat kita melihat, Pujangga Kraton

Sementara di situ tidak diceritakan lingkungan di luar kraton, serta interaksi antara kraton dengan pihak luar. Babat merupakan salah satu bahan untuk menulis sejarah

teks kolonial menjadi pahlawan dalam konteks Indonesia merdeka. Lalu kita juga sering bicara tentang perumpasan yang dalam logika sejarah adalah mustahil. Seandainya PKI berkuasa di Indonesia, pahlawankah Semaun dan Aidit?

Sebaliknya seandainya PKI berhasil berontaknya, pahlawankah Soekarno, Hatta dan sederet nama lainnya?

Memang, kekuasaan menjadi faktor penentu pula dalam sejarah. Ada pula contoh dari Barat. Revolusi Perancis dengan penjara Bastille yang diserbu massa untuk membebaskan sejumlah besar tahanan politik dan penentang raja di-



ideologis. Banyak sejarah politik dalam arti sejarah kerajaan dan penokonan mengacu pada penulisan babat. Akibatnya tidak terdiskripsikan keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Borobudur sebagai bangunan monomental misalnya, ditunjukkan hanya satu dinasti yang membangun, tetapi tidak tersebut berapa jumlah korban akibat pembangunan monomental itu.

Dalam Babat Tanah Jawi yang mengadaptasikan unsur agama Islam dengan budaya kejawaan.

Sejarah Kontemporer

Mitos-mitos tentang sejarah demikian berkembang hingga penulisan sejarah kontemporer. Pengacau, penjajah pemberontak dan kon-

jadikan mitos sebagai simbol pembebas dari monarki absolut. Ternyata seorang sejarawan Perancis Kontemporer dengan data baru membantah banyaknya jumlah tahanan yang dipenjarakan di Bastille. Ia mengatakan: isi penjara itu tidak sebanyak jumlah yang sering dituliskan. Kalau memang data itu valid, maka tampak betapa kekuasaan begitu sangat mempengaruhi tulisan sejarah.

yang diceritakan adalah kehebatan Sultan Agung sebagai raja besar yang memerintah dan berkuasa di Jawa. Di sana tidak terlihat faktor lain berupa dampak negatif yang dialami masyarakat dalam memeluk agama, karena tindakan Sultan Agung

Perspektif kekuasaan membuat sejarah dipandang sinis. Tidak heran apabila muncul sebutan "sejarah pornografi", yakni sejarah yang dibuka-buka dan ditutup-tutup. Bukan suatu yang salah bila disebut begitu. Tetapi peristiwa sebagai fakta sejarah bagaimanapun bentuknya tetap dicatat. Adapun penulisan untuk konsumsi masyarakat tergantung kepada siapa yang berkuasa.

Belum lama berselang, Korea memprotes Jepang agar merevisi sejarah nasionalnya. Sebab sejarah nasional Jepang menulis, seolah-olah Jepang bersih dari noda. Sementara bangsa Korea memandang yang sebaliknya, terutama ketika Jepang menduduki Korea. Ceausescu semasa berkuasa memasukkan kalimat pengagungan dirinya ke dalam buku-buku akademik tanpa perkecualian. Begitu juga istrinya. Semasa hidup suami istri ini, sejarah bangsanya diubah demi kebesarannya. Demikianlah, terdapat kecenderungan manipulasi sejarah dari sisi kekuasaan.

Banyak sejarah para tokoh dan bangsa yang kadang berkaitan erat dengan mitos. Seperti kata Soekarno yang membuktikan bahwa sejarah selamanya bertolak dari landasan moral tertentu, maka sejarah bisa jadi "media" penghasil mitos. Namun demikian Resink menunjukkan bahwa sejarah bukan cuma penghasil mitos, tetapi juga untuk pendewasaan kehidupan intelektual yang dapat membebaskan diri dari mitos. Memang diperlukan kearifan dalam melihat sejarah. Bukankah sebagai fakta ia tetap ada? Tetapi persoalannya: dari sudut mana sejarah dipandang?

Mari kita melihat peristiwa (sejarah) berikut ini (dengan arif). Bergabungnya kekuatan Islam, Komunis dan Bandit dalam pergolakan di Jawa Tengah selepas kemerdekaan yang dikenal dengan *Peristiwa*

Tiga Daerah seakan lepas perhatian kita. Peristiwa itu sendiri lebih sering disebut perampokan, pemberontakan dan penyelewengan dari perjuangan dan pergerakan. Karena peristiwa ini terlepas dari rangkaian kebijaksanaan Pemerintah Pusat (Revolusi). Peristiwa ini pula kadang disebut sebagai gerakan komunis, *tanpa* mengkaji kaitannya dengan kondisi sebelumnya.

Peristiwa yang aktual adalah kasus Tanjung Periok dan Lampung yang juga merupakan peristiwa sejarah. Lukisan dari peristiwa ini adalah aksi makar yang dikatakan ingin mengubah konstitusi yang sah dan ingin mendirikan negara baru yang berlabel agama. Kasus tersebut perlu dikaji kaitan antara peristiwa itu sendiri dengan masalah lain yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi. Sebab simbol-simbol agama kadang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya guna melepaskan diri dari penderitaan.

Kesimpulan

Dari deskripsi di atas kita melihat bagaimana sejarah ditulis dengan tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan hingga sejarah dapat menimbulkan mitos-mitos tertentu demi keagungan bangsa dan para tokoh. Kebenaran sejarah bisa "berubah" ketika berada dengan kekuasaan. Sejarah ideologis sebagai bagian sejarah Indonesia telah menunjukkannya.

"Setiap sejarah yang benar adalah sejarah masa kini," demikian kata Benedetto Croce. Atau seperti yang dimaksudkan Wertheim: sejarah masa kini bisa memberikan sumbangannya untuk memahami sejarah lebih baik.

Penulis,
mahasiswa
Fakultas Sastra UGM

EKONOMIKA : AGEN SEKULERISASI PERADABAN



TULUS WIJANARKO

Mungkin terlalu gegabah menuduh ekonomika sebagai agen utama sekulerisasi. Tetapi lebih gegabah lagi dengan meyakinkannya sebagai jalan utama mencapai kemakmuran.

Sebuah kalimat dramatis yang diucapkan oleh seorang ekonom kita. "Sepatutnya kita berterima kasih kepada Iran dan Irak, karena perang antara keduanya berdampak positif pada harga minyak kita." Ucapan itu memang dilontarkan ketika perang antara kedua negara tersebut sedang mencapai puncaknya. Dramatis, karena beliau mengucapkan sambil tersenyum kepada para mahasiswa. Tengah bercandanya. Namun ada baiknya kita tak menelan begitu saja kalimatnya dengan senyum. Kajian-kajian yang lebih serius dan segala referensi penting tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan akan mendorong kita untuk bersikap lebih arif.

Tak ada yang membantah, minyak masih merupakan nadi utama dalam denyut pembangunan (ekonomi) negeri ini. Naik atau turunnya harga minyak di pasaran internasional, akan berpengaruh pada kebijaksanaan dan strategi pembangunan di dalam negeri. Kita lihat, betapa *kepanikan* terjadi di kalangan pemegang policy ekonomi akibat terjerembabnya harga minyak pada beberapa tahun silam (bahkan pernah mencapai 8 dollar/barel pada Juni 1986). Bersama-sama faktor lain, merosotnya harga minyak ini akan menciptakan kelesuan ekonomi, yang pada ujung-ujungnya akan berakibat pada terpengkasnya pertumbuhan yang diharapkan cukup tinggi. Inilah kekhawatiran utamanya.

Telah dipahami, dalam konsep pertumbuhan ini, pemenuhan kebutuhan akan modal dan penggunaan teknologi canggih adalah syarat mutlak (Michael P. Todaro: *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*). Akumulasi modal diciptakan untuk menciptakan investasi produktif dengan tujuan memperbesar output di kemudian hari. Teknologi canggih dibutuhkan untuk mempertajam

efisiensi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Entah di mana letak salahnya, yang jelas mulai dari para teoritis sampai para praktisi, dari pemegang policy sampai pelaku-pelaku langsung di "lapangan", melulu hanya menggunakan pendekatan ekonomika dalam merealisasikan dua kebutuhan pokok tersebut. Pertimbangan-pertimbangan lain seperti kepentingan masyarakat banyak, dampak-dampak sosial, keseimbangan lingkungan dan sebagainya tidak diperhitungkan. Setidaknya jarang.

Secara esensial, dengan demikian yang terjadi sebenarnya adalah pengabaian secara sadar terhadap moralitas dan nilai-nilai. Celakanya, karena dalam kazanah ilmu ekonomi hal-hal tersebut di atas tidak mendapat tempat dalam perhitungan dan analisa, sikap dan tindakan membelakangi nilai-nilai tersebut dianggap halal dan sah belaka.

Kita tiba-tiba menjadi gancang ketika menyadari, bahwa kesahan tersebut berakar kuat pada ajaran paling dasar tentang ekonomi: meraup keuntungan sebesar-besarnya *cost* sekecil mungkin. Inilah credo sakti yang meniscayakan cara-cara mechiavelis menjadi demikian merasuk. Karena semuanya telah dilegitimasi atas kepentingan ekonomi. Moral dan nilai-nilai dengan demikian tidak hanya menjadi subordinat, bahkan ia tiba-tiba menjadi naif berhadapan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi tersebut.

Masih ingatkan anda dengan **Gordon Gecko**, seorang *big-boss* dalam film *Wallstreet*? Sikap dan sepak terjangnya yang tanpa kompromi serta tidak kenal ampun terhadap saingan-saingan usahanya mengesankan kepada kita bahwa ia bukan lagi seorang manusia, tetapi lebih menyerupai seekor rubah yang tamak. Begitu juga dengan **Bud Fox** —tokoh pialang dalam film yang sama—

yang nyaris tega menghabisi perusahaan ayahnya sendiri demi keuntungan yang melimpah. Meskipun cuma terjadi di film, tetapi tak pelak lagi hal itu merupakan cerminan kenyataan-kenyataan yang ada.

Dalam konteks keseharian, kita menjadi saksi berkembangnya SDSB —perjudian yang dilegitimasi, sekedar didahului alasan: demi memobilisir dana dari masyarakat. Dampak-dampak sosial dan kultural yang terjadi dianggap angin lalu. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan devisa, kita mengekspor (barangkali ini dianggap sebagai komodite non migas yang harus digalakkan di Arab Saudi. Cerita-cerita yang pilu sering mengiringinya, tak hendak menghentikan pemerintah untuk menggalakkan proyek ini. Kemudian yang kini lagi ngetop konglomerat! Siapakah yang tidak melihat, bahwa bentuk monopoli yang berlindung di balik alasan-alasan efisiensi ini, tanpa persetujuan kita dengan ringan menggilas usaha-usaha bermalas-malasan. Dan celakanya, keberadaan konglomerat yang semakin menggorut ini amat didukung keberadaannya (secara diam-diam maupun tidak) oleh pemerintah.

Apa yang bisa dijelaskan mencermati semua itu? Sederhana sekali: inilah keterjebakan kita semua pada jurang dogma-dogma ekonomika! Terjebak, dan sudah dalam sekali. Dan karena kini ekonomika sudah demikian *mengurati* darah daging peradaban kita, bias sekularisme yang dipancarkannya pun menegrasikan dalam rekayasa peradaban itu sendiri. Dan inilah yang sedang kita bangun bersama: sebuah peradaban yang amat menghargai "tapakan-tapakan praktis", yang pada dasarnya dihadirkan untuk melayani hasrat-hasrat hedonistik belaka. Meskipun untuk itu harus dikorbankan nilai-nilai.

Modernisasi, kemajuan, pembangunan, tinggal landas dan konsep-konsep sejenis ke-

mudahan menjadi bungkus yang mempilarutamai rekayasa peradaban kita. Kita tak akan menjadi sedih, kalau saja hal itu tidak menyebabkan manusia menjadi terasing. Terasing dari hakekat kemanusiaannya, dari kesadaran telah terjadinya eksploitasi terhadap harkat kemanusiaan, dari kewajiban berkasih sayang terhadap sesama, dan sebagainya.

Konglomerasi kita beri peluang hingga semakin menggurita, tidak lain karena teori memberikan legitimasinya, bahwa dengan demikian perekonomian akan semakin efisien. Devisa semakin besar ditangguk, karena produksi kita mempunyai daya saing di pasaran internasional. Teori pun memberikan legitimasinya pula untuk perpanjangan proyek SDSB, juga untuk pengiriman para TKW kita ke luar negeri, karena amat bermanfaat untuk pembangunan (ekonomi) kita. Sedangkan rusaknya mental masyarakat, para pemodal kecil yang tergilas, para TKW yang bernasib sial, dan mereka-mereka yang menjadi korban harus menyadari bahwa pada peran itulah mereka bisa memberikan andilnya dalam pembangunan dan kemajuan. Dalam bahasa teori, secara singkat dapat dikatakan, mereka inilah korban berlakunya konsep *ceteris paribus* ekonomika.

Dari manakah sebenarnya awal keterjebakan ini? Barangkali berangkat dari kesalahan kita memberi batasan dan isi terhadap konsep-konsep pembangunan, modernisasi, kemajuan serta kemakmuran. Khusus kita di sini semua konsep tersebut kita jiplak lumat-lumat dari Barat —pusat sekularisasi dunia. Kita menjiplaknya dan menerapkannya di sini dengan menafikan unikum-unikum keindonesiaan. Akibatnya proses itu melahirkan benih-benih sekuler pada rekayasa yang tengah berlangsung. Benih yang dengan sadar (atau tidak?) kita pupuk hingga semakin meng-

hutan.

Mungkin terlalu gegabah menuduh ekonomika sebagai agen utama sekularisasi peradaban. Tetapi lebih gegabah lagi dengan meyakini sebagai jalan utama mencapai kemakmuran. Hingga dalam proses pembangunan dengan pengertian (yang amat luas), ia kita tempatkan sebagai penglima.

Dalam perspektif lain, keterjebakan tersebut menyebabkan kaum tenokrat menempati posisi kunci dalam rekayasa. Kolobarosasinya dengan kekuasaan, ditambah kapasitas yang dimilikinya sungguh memberikan peluang gerak yang amat leluasa untuk mendaratkan ide-ide serta konsep-konsepnya. Celakanya, bersamaan dengan dominannya posisi serta pengaruh kaum teknokrat ini, pada saat itu pula mulai surut peran kaum moralis (ulama). Para penjaga gawang nilai-nilai ini mengalami marginalisasi dan dipaksa menyinkir untuk menempati pinggir-pinggir peradaban. Ini menyedihkan, dan berbahaya!

Jika keadaan tersebut sudah menjadi bagian dari kesadaran kita, apa yang bisa dilakukan? Apakah yang kita butuhkan saat ini adalah kehadiran seorang nabi? Tentu tidak karena zaman kenabian telah usai. Karena pada dasarnya persoalan ini berhulu dari dibelakangnya nilai-nilai, dari situ pulalah upaya perbaikan harus dimulai. Yaitu berupa menumbuhkan kepedulian kita semua kepada nilai dan norma, serta menghormatinya tentu. Sebenarnya ini pun bukan persoalan mudah, selain juga membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Namun untuk sekarang, di awal dekade 90-an yang baru saja melangkah, situasi tersebut setidaknya bisa dijadikan bahan kajian dan renungan. Itu saja.

**Penulis, mahasiswa FE UGM
Anggota kelompok
studi TIMBANG**

Salah satu momentum historis, yang telah terbentuk abad lalu namun senantiasa mempengaruhi trend hingga hari ini adalah Revolusi Industri. Peradaban manusia kontemporer yang dapat dilihat di planet bumi, bahkan di luar-nya, tak bisa dipungkiri disemaikan dari momentum tersebut. Revolusi industri pula yang telah membentuk asumsi bahwa kemajuan kebudayaan sebuah bangsa ditandai dengan pertumbuhan industrinya. Sehingga tak mengherankan jika seluruh negara saat ini tengah berlomba menuju negara industri, tak terkecuali Indonesia.

Perluasan basis industri yang tengah dilakukan di Indonesia saat ini dimaksudkan untuk menghadapi persaingan internasional dan berdasarkan kemajuan yang akan dicapai. Pilihan Indonesia atas industri bukan semata-mata pilihan yang mendadak; melainkan sudah mulai direntas sejak kedua Repelita pertama (1969-1979) dengan prioritas industri yang mendukung sektor pertanian. Pola pengembangan Industri Nasional menggariskan strategi industri sampai Pelita IV, dengan sasaran lepas landas ekonomi dengan adanya industri yang kokoh dan sanggup menjamin dinamikanya sendiri.

Yang diungkapkan Railon dalam buku ini adalah rangkaian historis pertumbuhan industri Indonesia selama pemerintahan Orde Baru sebagai antisipasi atas keambrokan ekonomi Indonesia selama kekuasaan Orde Lama. Namun buku ini bukan saja merupakan deskripsi pertumbuhan industri Indonesia. Railon pun mencoba memprediksikannya untuk tahun 2000 dengan berdasar pada trend yang tengah berlangsung beserta hasil-hasil yang telah dicapai.

Industrialisasi di Indonesia pada prosesnya beriringan dengan keberhasilan Revolusi Hijau dan bom minyak pada awal 70-an. Bom minyak telah memungkinkan Indonesia untuk membiayai pembangunannya dengan uang sendiri. Sementara Revolusi Hijau, yang dicirikan dengan dibangunnya industri yang menunjang sektor pertanian, telah membentuk kesan baik Indonesia akan industri.

Dorongan pertama industri dalam ekonomi Indonesia terletak pada peningkatan sektor manufaktur dua kali lipat, dari 6 % pada 1965 menjadi 13 % PDB (Produk Domestik Bruto) pada 1985. Namun sampai tahun itu pula terjadi kepincangan dalam distribusi industri manufaktur di wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi yang berlebihan dari investasi asing dan nasional di Jawa.

MERAMAL

NEGARA INDUSTRI BARU

Ekspor produk manufaktur harus mencapai satu tingkatan yang tinggi agar sasaran Pelita IV dapat tercapai, yakni pertumbuhan PDB rata-rata pertahun sebesar 5 %, industri manufaktur 9,5 %. Kebijakan industrialisasi yang dipusatkan pada ekspor didasari oleh dua kelebihan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia, yakni tersedianya sumber alam dan tenaga kerja yang melimpah serta murah. Namun keduanya belum sanggup menghadapi persaingan internasional sehubungan dengan upaya mengurangi penggunaan konsumsi energi di negara-negara konsumen serta trend otomatisasi dan robotisasi. Sehingga, agar mampu bersaing, industri Indonesia harus mau melirik teknologi yang canggih.

Untuk mengantisipasinya, lewat otak B.J. Habibie, disusunlah Rencana Produksi Progresif, yang membagi industrialisasi di Indonesia menjadi empat tahap. Pertama, teknologi yang ada digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dengan lisensi. Kedua, mengintegrasikan teknologi yang ada dalam produk-produk dan model-model baru dengan menggunakan teknologi sejenis atau mengawinkan teknologi-teknologi yang ada. Ketiga, teknologi yang ada diperdalam dan bahkan dicoba menciptakan suatu teknologi baru. Dan tahap terakhir merupakan riset dasar sistematis.

Railon optimis, dalam belasan tahun Indonesia akan menjadi sebuah Negara Industri Baru. Optimisme ini didasari oleh analisisnya tentang berbagai industri yang telah dan tengah dibangun di Indonesia bukan saja manufaktur, bahkan termasuk pula industri strategis—seperti aeronotika, perkapalan, perhubungan darat dan pertahanan. Asal saja, menurut Railon, mampu mengatasi beberapa kendala yang diidentifikasinya sebagai akses terhadap teknologi, sumber pembiayaan dan pendidikan serta latihan tenaga kerjanya. Dan juga tergantung pada derajat industri alisasi yang akan dicapai.

Buku ini cukup komprehensif dalam menggambarkan Indonesia pada sisi pertumbuhan industrinya. Selain lengkap menunjukkan berbagai sektor industri yang



Francois Railon, Indonesia Tahun 2000 -Tantangan teknologi & industri, (CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990). Judul asli: Indonesia 2000: le pari industriel et technologique. Alih bahasa: Nasir Tamara. ix + 217 halaman

ada, data-data yang ditampilkan pun cukup rinci dengan angka-angka statistik yang cukup baru. Sehingga sangat wajar jika buku ini menjadi semacam bacaan wajib bagi mereka yang tertarik tentang perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia, tentunya bagi mereka yang berbahasa ibu Prancis.

Namun, sedemikian asiknya Railon dengan angka-angka statistik, boleh jadi ia lupa dengan sisi lain industrialisasi, terutama yang berkenaan dengan masalah sosial budaya. Railon kurang memasukkan faktor tatanan nilai dan kondisi psikologis yang tentunya berpengaruh dalam memprediksikan Indonesia sebagai Negara Industri Baru. Padahal, seperti yang ditulisnya sendiri, "hambatan-hambatan psikologis dalam menghadapi modernitas merupakan kendala yang paling kritis dalam strategi teknologi". Hasil analisisnya ini tentu tidak cukup ditanggapi dengan optimismenya bahwa perubahan mentalitas masyarakat tampaknya berjalan mulus: "televisi yang ada di setiap desa ditonton tanpa menimbulkan masalah".

(Yayan Sopyan)

ISTILAH-ISTILAH KUNCI PSIKOLOGI



Frank J. Bruno, Ph.D., *Kamus, Istilah Kunci Psikologi*, (Kanisius, Yogyakarta, 1989), 362 halaman.

Walaupun dapat digolongkan sebagai ilmu masih muda, Psikologi ternyata berkembang sangat pesat dan banyak diminati oleh banyak orang. Hal ini dapat disadari karena ilmu ini berbicara tentang manusia dan ini berarti bahwa manusia berbicara tentang dirinya sendiri. Suatu ilmu yang berusaha untuk menjadi cermin bagi manusia. Suatu usaha manusia untuk mengenali siapa dirinya sendiri.

Perkembangan Psikologi dan aliran-alirannya pun semakin banyak bermunculan, seperti aliran psikoanalisa dari Sigmund Freud, behaviorisme, dan yang akhir-akhir ini masih ramai menjadi perbincangan adalah kemunculan 'psikologi humanistik' atau "Mazhab ketiga". Yang terakhir ini mulai dikenalkan oleh Abraham Maslow, ia menganggap betapa pentingnya aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan ilmu psikologi dapat dilihat dari istilah-istilah yang ada di dalam ilmu itu sendiri banyak digunakan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari seperti "stress" dan "depresi". Pada saat ini psikologi semakin populer di masyarakat dan semakin banyak bidang kehidupan yang memeransertakan psikologi, sehingga dapat dikatakan psikologi menjangkau kemana-mana. Hal ini berakibat positif bagi ilmu itu sendiri, yaitu dengan banyak digunakannya istilah-istilah psikologi maka semakin populer ilmu tersebut. Hal itu tentunya baik asal penggunaan kata atau istilah tersebut tepat dan sesuai dengan apa yang dimaksud. Misalnya, orang mengatakan "saya sedang stress", mungkin yang dimaksud dalam keadaan tertekan dan tegang.

Hal itu yang mendasari atau menjadi alasan utama Frank Bruno menyusun buku ini yang kemudian diterjemahkan oleh Cecilia G Sumekto. Di dalam buku ini pengertian "stress" merupakan sistem tekanan dari dalam tubuh, organik atau psikologik yang cenderung menjadikan fisik lemah.

Secara keseluruhan buku ini mencakup semua aliran psikologi, istilah dan tokohnya. Seperti pada mazhab pertama Sigmund Freud dengan psikoanalisisnya, Mazhab kedua

dengan Pavlov sebagai tokoh di mazhan behavioristik, mazhab ketiga yang dikenal dengan mazhab humanistik dengan tokohnya Maslow.

Buku ini, karena berupa kamus disusun secara sistematis dalam tiga bagian; definisi, contoh, dan hubungan. Dalam definisi diterangkan arti pokok atau arti kata dalam bentuk abstrak. Pada bagian contoh dikemukakan abstraksi dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya dengan contoh-contoh langsung yang menarik perhatian, dalam arti pengalaman sehari-hari. Sedang dalam hubungan, tiap-tiap istilah dijabarkan dalam kerangka kerja yang lebih luas, menonjolkan asosiasi dan keterkaitannya dengan aspek-aspek pemikiran psikologis yang lain.

Ciri-ciri lain dari buku ini ialah dengan daftar judulnya. Daftar Judul yang ada disesuaikan dengan istilah baku yang ada sehingga memudahkan mencari kata-kata. Kemudian daftar nama, gambaran singkat tentang tokoh-tokoh penting, dan daftar istilah. Di dalam gambaran singkat tentang tokoh-tokoh penting diberikan data biografi tokoh yang memelopori dan mengembangkan psikologi, sedang di dalam daftar istilah disusun istilah-istilah dari semua kata penting yang didefinisikan serta istilah lain yang berhubungan dengan bagian hubungan yang dikemukakan.

Buku ini secara keseluruhan menarik untuk dibaca dan dipunyai, tidak hanya oleh mahasiswa psikologi atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia psikologi. Tetapi juga oleh mahasiswa dari jurusan ilmu sosial lainnya serta mereka yang ingin tahu tentang psikologi. Perpustakaan-perpustakaan perlu menyediakan buku ini karena saya yakin buku ini banyak dibutuhkan. Kelebihan dari buku ini ialah tidak akan pernah usang atau kadaluwarsa karena sifatnya sebagai kamus, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dibaca kembali. Namun demikian buku ini harus selalu mendapat revisi sehingga istilah yang ada tidak ketinggalan zaman.

(Eko Indarwanto)

PERTEMUAN DENGAN MOHRING

ra kontemplasi begitulah istilah *keren* untuk masa-masa perenungan yang baru saja saya masuki, telah menghadirkan **Dietrich Mohring**, penulis buku *TGouristikmedizin* yang terbit di Stuttgart, Jerman Barat, pada tahun 1977. Mohring hadir dalam mimpi saya tiga hari yang lalu. Dalam pertemuan saya dengan Mohring itu, kami sempat bicara soal emansipasi wanita.

"Wanita sekarang masih berada di dasar piramid karya," begitu katanya. Tentu saja saya tidak memberikan pembenaran seratus persen terhadap pendapatnya itu. Boleh jadi Mohring benar kalau penilaian itu ditujukan untuk wanita di negaranya. Di Indonesia persoalannya lain. Wanita telah mengisi segala sektor yang tersedia. Karya mereka pun telah turut memberi warna keseluruhan karya yang tercipta di negeri ini. Meski belum jelas kapan mengorbit, toh Pratiwi masih punya sebutan calon astronot Indonesia yang pertama dan mengalahkan rival-rival prianya. Walaupun banyak dikecam, wanita seperti Nani Sudharsono mampu menghias wajah Indonesia dengan porkas ketika ia menjabat sebagai menteri sosial. Apalagi Mbak Tutut. Ia selalu memenangkan tender proyek jalan tol ataupun jalan layang. Bukahkah forum-forum diskusi justru mengisyaratkan perempuan – kata perempuan yang mengikuti forum-forum itu diskriminasi, lho – pun semakin menjamur?

Mohring tertawa mendengar contoh-contoh yang saya bentangkan. Lalu ia mengingatkan bahwa pengamatan saya hanya satu sisi saja. Pertanyaan yang kemudian diajukan membuat saya harus kembali berpikir. Bagaimana dengan sekian banyak wanita yang masih tertindas, artinya yang berada dalam budaya yang menceraabutnya dari keutuhan?" tanya Mohring. "Lalu karya apa yang telah dilahirkan forum-forum perempuan itu selain diskriminasi itu sendiri?" tanyanya lagi. Kemudian ia mempertanyakan pula soal apa yang dimaksud dengan karya. "Masihkah bernama karya bila ia harus menghancurkan lembaga keluarga?" katanya dengan suara sayup-sayup yang semakin menghi-lang. Pada saat saya ter-



IKA DEWI ANA

bangun, pertanyaan-pertanyaan Dietrich Mohring masih terngiang dalam benak saya. Saya mengakui, Mohring benar.

Mekanisme asosiatif dalam pusat susunan saraf saya segera memunculkan buku Mohring. Di dalam bukunya Mohring menulis bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama berpengaruh terhadap wanita dan hanya sedikit yang berpengaruh langsung pada lelaki. Ia memberikan contoh yang sangat pas. Dietrich Mohring bicara soal teknologi kontrasepsi dan transportasi. Dicontohkannya begini. Seorang wanita yang berkeliling dunia dengan pesawat jet sekarang sukar menentukannya kapan dia harus minum pil kontraseptif. Ketika terbang ke Timur atau ke Barat, karena kita dapat ber-

keliling dunia dalam dua hari dan mengalami perubahan waktu dari zone ke zone.

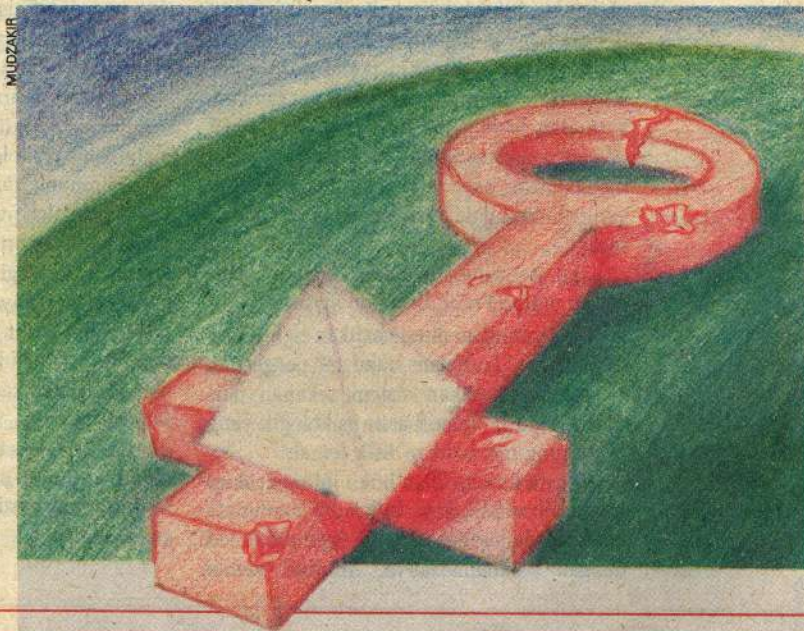
Kasus yang dicontohkan Mohring itu membuat saya membayangkan wajah wanita masa depan. Tergambar dalam benak bagaimana pada masa datang fungsi-fungsi yang biasa dijalankan oleh wanita – dan manusia, dalam ranah yang lebih luas – akan digantikan hanya oleh mesin atau komputer. Barangkali fungsi reproduksipun akan digeser oleh temuan-temuan baru. Pergeseran tersebut tentunya akan mengubah wajah keluarga masa depan.

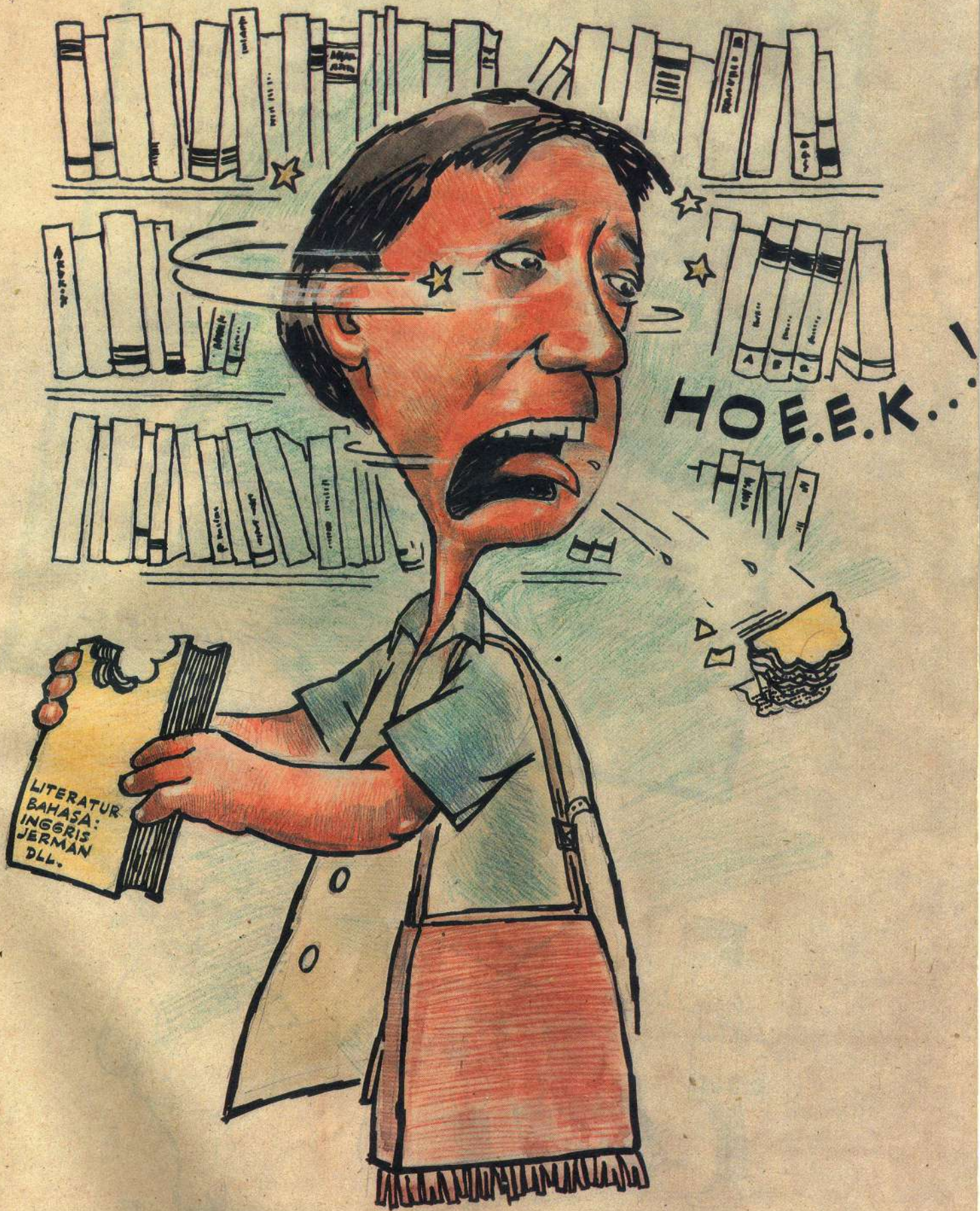
Dalam keadaan semacam itu apa yang akan memperkuat wanita selain kesadaran bahwa *mother-child bonding* tidak bisa diganti, reproduksi manusia tidak bisa diserahkan kepada laboratorium, ter-

lalu besar yang harus dikorbankan untuk mengganti dapur keluarga dengan sebuah restoran, jalan raya tidak bisa menjadi tempat pembinaan budi pekerti anak, dan materi tidak bisa mengganti kasih sayang? Namun pada masa sekarang – tidak usah terlalu jauh ke masa depan – masihkah kesadaran semacam itu tersisa? Semoga Mohring datang lagi, suatu ketika, untuk mengasah kedalam batin saya.

Ika Dewi

Penulis, mahasiswa FKGM UGM





"Bahasa Asing Syndrom", Peserta Lomba Karikatur Balairung 1987

Menurut Pembantu Rektor II UGM, Prof. Dr. Bambang Riyanto, banyak dosen UGM yang ngobek di luar daripada di dalam kampus sendiri. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada almamaternya.

Berapa banyak yang masuk kantong pribadi ? Mendapat proyek, fasilitas tinggal pinjam universitas, tenaga tinggal kerahkan mahasiswa. Mengajar di tempat lain, mahasiswa sendiri ditelantarkan.

DPR jika terus menerus dibohongi oleh pemerintah tak ubahnya seperti *badut politik*. "Daripada jadi badut politik lebih baik saya mundur dari anggota DPR," ujar wakil ketua komisi V, Ir. Anwar Datuk

Badut-badut yang lain siap menggantikannya.

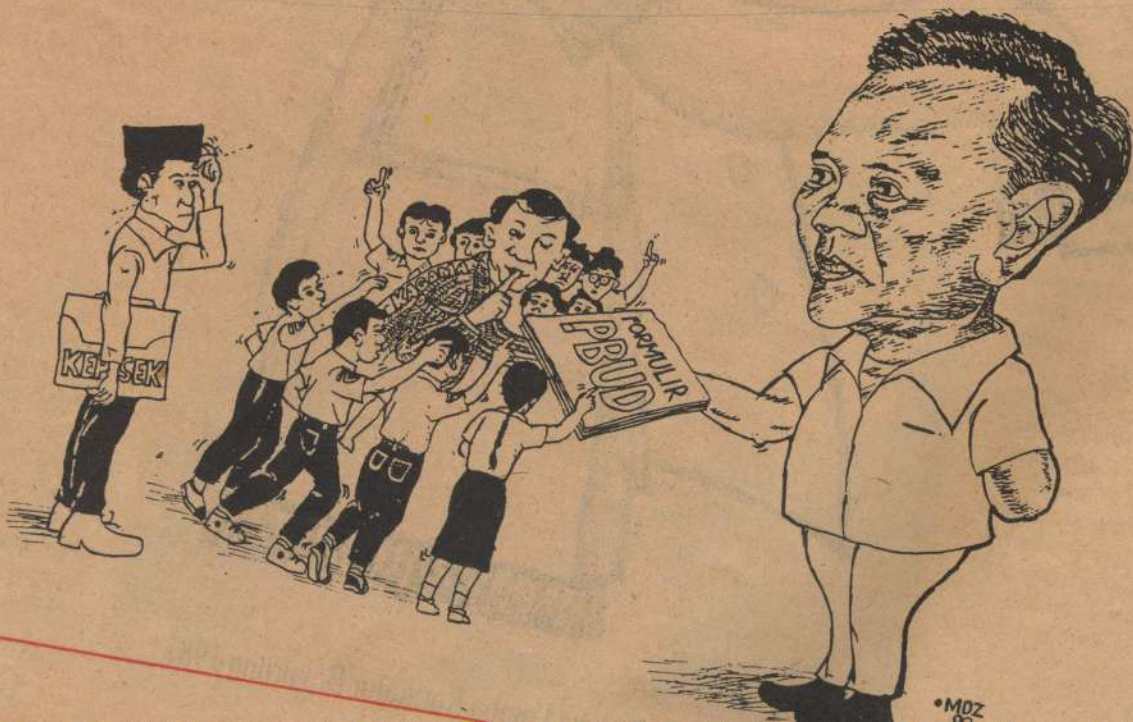
Institut Teknologi Bandung menerima mahasiswa tanpa tes. Lulusan SLTA yang beruntung adalah mereka yang mempunyai prestasi olah raga.

Maksudnya mau mengolahragakan ITB. Moga-moga nanti ITB tidak dijangkiti *hooliganisme*.

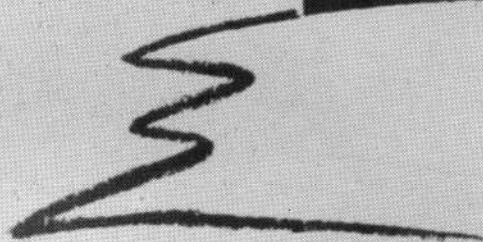
Menteri Pendidikan Korsel (10/7) diusir dari Universitas Sejong, Seoul dan mobilnya diinjak-injak mahasiswa, setelah gagal membujuk mereka untuk balik kuliah.

Siapa berani bertaruh hukumannya akan lebih berat dari mahasiswa Indonesia yang tidak mau berdiri menyambut pejabat tinggi yang datang kekampusnya.

D.K.R. R.N.



BALAIRUNG



Profesionalisme. Teruji melalui Reputasi.



Profesionalisme adalah Jasa Indonesia



Profesionalisme Jasa Indonesia selalu ditingkatkan, dengan menggali dari aset utama yaitu sumber daya manusia. Ini telah terbukti dengan pelayanan akseptasi dan klaim yang memadai.

Dengan banyaknya jenis asuransi kerugian yang ditangani dan bahkan kemampuan melayani asuransi khusus berdasarkan permintaan, menunjukkan Jasa Indonesia lebih profesional.



**PT ASURANSI
JASA INDONESIA**

Kantor : Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 61
Jakarta Selatan Tel. (021) 799-4508, 799-4708
Telex 47365/47366 AJIKP IA
Fax 62-021, 7995364